

Sri Ilham Nasution

BUNGA RAMPAI SOSIAL BUDAYA



Harakim
Publisher

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis aturkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya, dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Salawat dan salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya dapat mengamalkan ajaran Islam yang telah beliau risalahkan, kita memperoleh syafa'atnya, kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Buku ini dapat digunakan sebagai media memperluas wawasan keilmuan tentang sosial budaya yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya.

Buku ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca akan sangat berarti bagi penulis untuk menyempurnakannya pada terbitan mendatang.

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah turut berperan dalam proses penulisan buku ini, khususnya kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang telah bersedia menerbitkan buku ini sebagai edisi pertama.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan buku ini memberi manfaat demi peningkatan kualitas bangsa yang berkepribadian luhur.

Bandarlampung
Penulis,

2014

Sri Ilham Nasution

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. Perspektif Antropologi Dalam Memaknai Kaum Muda.....	
1	
B. Konflik dan Integrasi.....	
14	
C. Pembangunan Kebudayaan Indonesia di Tengah-tengah Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.....	33
.	
D. Pluralistik Agama Kajian Tentang Peluang Konflik dan Integrasi Bangsa.....	
45	
.	
E. Integrasi sosial antar suku.....	
58	
.	
F. Fenomena Zakat: Sebuah Mata Rantai Sosial Ekonomi (Untuk Kemaslahatan) Umat Yang Terputus.....	76
G. Citra Kaum Ibu di Indonesia Merajut Benang Merah Antara Feminisme dan Islam.....	87
H. Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal pada Daerah Konflik.....	
97	
I. Peran Ganda Wanita yang Bekerja.....	
119	
J. Semangat Religius Dan Religionsentrisme Dalam perspektif antaragama.....	
132	
K. Pola Adaptasi Dalam Hubungan Antaretnik Studi Deskriptif Pada Kelompok Etnik Mandailing Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.....	143

PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DALAM MEMAKNAI PERILAKU KAUM MUDA

I. PENGANTAR

Dalam pergeseran mode produksi dan mode konsumsi yang sangat dipengaruhi oleh tahap tiga transformasi masyarakat, yaitu ekspansi pasar (kapitalisme), berbagai definisi dan nilai menjadi bergeser dengan pengaruh sistem dunia yang sulit untuk dihindari, meskipun mode artikulasi akan sangat berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain (Featherstone, 1990;1995). Dalam konteks pergeseran semacam ini, definisi ulang tentang konsep-konsep anak-anak, remaja, kaum muda, orang tua, atau gender, keluarga, perkawinan, seksualitas, makan, agama, dan lain-lain mengalami pergeseran. Untuk itu definisi-definisi (seperti definisi keluarga, kaum muda) harus dikaji ulang kesahihannya mengingat definisi lama tidak mampu menjadi wakil dari penjelasan apa itu keluarga dan siapa atau bagaimana kaum muda; pada saat solidaritas antar anggota bergeser akibat mobilitas yang menjadi secara umum maupun perkembangan informasi dan IPTEK.

II. TRANSFORMASI SOSIO-KULTURAL

Hall pernah mengatakan bahwa diservitas, diferensiasi, mobilitas, komunikasi, dan internalisasi sedang menjadi panglima. Identitas kita, nilai pribadi dan subyektifitas semuanya ini merupakan tanda bahwa kita sedang mengalami proses transformasi, yang semuanya tanda bahwa kita sedang dalam era kehidupan baru (lihat Giddens, 1993:666). Apa yang dikatakan

Hall sesungguhnya telah menjadi kesadaran umum tentang bagaimana perubahan kontemporer telah terjadi dengan kecepatan tinggi dan pengaruhnya dapat ditemukan di hampir semua aspek kehidupan. Kecenderungan ini dapat dilihat dalam proses globalisasi, yang merupakan tanda penting dari pengaruh ekonomi pasar. Konsep globalisasi yang ditujukan untuk menjelaskan berbagai fenomena periode kapitalisme akhir dewasa ini, meminjam istilah Jameson (1984), kenyataannya berkaitan erat dengan persoalan nasionalisme, orientasi kebudayaan, dan tatanan sosial (Featherstone, 1990). Orientasi global dianggap sebagai kekuatan besar dalam mendorong manusia untuk memiliki praktik sosial modern atau cara hidup modern yang dapat diukur dari gaya hidup seseorang. Gaya hidup ditentukan oleh cara seseorang memilih dan menggunakan benda atau oleh proses konsumsi (Tomlinson, 1990). Dengan kata lain, konsumsi merupakan suatu proses yang penting untuk diteliti karena ia merupakan dalam bentuk dalam siklus, yang didalamnya barang-barang yang melekat pada acuan personal dapat dimiliki oleh setiap orang, dan dapat menjadi ciri-ciri kepribadian, tanda identitas, dan tanda hubungan antar pribadi dan kewajiban-kewajiban yang khusus (Gell, 1986; 12-113).

Munculnya pasar swalayan dan pusat-pusat perbelanjaan di hampir semua kota (dan kota kecil) menjelaskan betapa mudahnya mendapatkan barang-barang global. Hal itu pun dapat dianggap sebagai tanda penting dari era ekonomi baru dan konsumerisme yang meluas di kota-kota Indonesia. Di Yogyakarta, Gelael yang hampir merupakan satu-satunya pasar swalayan (global) di tahun 1980-an, telah mendapat saingan di tahun 1990-an, seperti pasar swalayan Hero dan Rimo. Malioboro Mal menjadi pusat perbelanjaan yang paling berpengaruh bersama Galeria. Dunia perdagangan ini

merupakan arena yang tepat untuk mengukur kapasitas belanja dan perubahan gaya hidup berbagai kelompok masyarakat, termasuk kaum muda.

Kentucky Fried Chicken, Texas Fried Chicken, California Fried Chicken, Mac Donald dan Pizza Hut merupakan contoh lain yang menunjukkan bahwa cita rasa estetis keluarga kelas menengah sedang mengalami perubahan. Makanan semacam itu telah menjadi simbol kehidupan modern dikalangan kelas menengah kota. Konsumsi makanan dianggap sebagai bagian reaksi, bukan hanya pemenuhan kebutuhan dasar. Citra tentang makanan disini sangat berbeda dengan citra yang dimiliki di tempat asalnya, tempat makanan itu dianggap sebagai 'makanan jalanan'. Adalah bermanfaat untuk mengajukan pertanyaan tentang faktor-faktor yang menentukan pembentukan nilai suatu barang sehingga dalam praktiknya suatu barang dapat menjadi instrumen bagi artikulasi diri (identitas). Fakta itu menegaskan kembali ide bahwa produk global memiliki makna-makna yang berbeda di dalam konteks sosial yang berbeda (Gell, 1986). Dari sini kita dapat menjelaskan bahwa globalisasi bukan merupakan proses satu arah karena tampak ada kecenderungan untuk terjadi dialog dengan sifat-sifat lokal yang menentukan penerimaan atau penolakan unsur-unsur dan barang baru dalam bentuk berbagai diskursus.

Perubahan yang paling tampak dalam kehidupan perkotaan adalah berlangsung sejak awal tahun 1990-an dan ditandai dengan perkembangan media massa. Pembentukan tatanan nilai dalam masyarakat, tempat media massa mengambil bagian, merupakan bukti meningkatnya peran agen non pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan televisi dan media cetak juga menjadi penting jika kita menyadari fakta bahwa melalui iklan suatu media memainkan peran dalam menarik minat massa untuk mengonsumsi produk global dan modern. Media merupakan saluran yang berpengaruh dalam kontribusi kebudayaan lokal yang secara langsung mempengaruhi gaya hidup baru. Film dan bacaan dari Jepang dan Barat memonopoli pembentukan identitas remaja dan kepribadian kaum muda.

Dalam distribusi barang dan global kaum muda memainkan dua peran utama. Pertama, mereka merupakan agen dalam pembentukan kebudayaan konsumen. Di sini kaum muda terlibat dalam iklan dan distribusi barang-barang kapitalis di pasar. Oleh karena itu, tidak heran jika istilah seperti 'muda' atau tanpa kmuda' telah menjadi kata kunci dalam diskursus estetis. Pernyataan seperti 'kelihatan muda' atau seringkali digunakan untuk menyimbolkan proses modernitas. Kedua, kaum muda merupakan pasar potensi bagi produk global. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa kebiasaan konsumsi merupakan indikator dari ekspresi diri. Selera estetika merupakan pasar yang baik bagi benda-benda tersebut. Selera dan gaya hidup kaum muda tidak dapat dilihat secara terpisah dari proses sosialisasi yang dimulai segera pada usia muda.

Gaya hidup modern sesungguhnya dimulai di rumah (Lofgren, 1993:10). Sejak 1980-an Rumah Indonesia telah berisi individu-individu modern yang bebas dari ikatan kolektif dan identitas tradisional. Hubungan-hubungan sosial yang dibentuk dalam rumah telah menjauhkan hubungan (emosional) anak dengan orang tua. Pada masa sekarang ini bukan hanya televisi yang memiliki posisi utama dalam kehidupan anak-anak, tetapi juga Nintendo dan berbagai permainan game dan permainan elektronik.

Materialisasi hubungan orang tua-anak merupakan suatu gejala yang mencolok. Proses ini menjelaskan banyak hal tentang transformasi dan formasi tata nilai dan gaya hidup. Perubahan antar generasi telah pula memberi pengaruh besar terhadap integrasi kebudayaan subjektif ke dalam kebudayaan objektif.

Kaum muda, dalam hubungan generasi, dalam suatu masyarakat tidak hanya merupakan agen dalam pendefinisian ulang nilai-nilai, tetapi juga istilah kaum muda telah menunjuk pada kisah pembangkang atau kisah-kisah di seputar proses. Pada saat gejala ini muncul, kitapun mulai memahaminya sebagai perilaku devian, yang keluar dari nilai-nilai umum atau aturan normatif dalam lingkungan sosial tertentu (Bradley, 1996).

Tindakan kaum muda sebaliknya harus dilihat sebagai bentuk pilihan rasional yang dibuat oleh mereka sendiri dalam satu ruang tertentu, sehingga proses nasionalisasilah yang perlu dipahami.

Pada saat kaum muda melakukan praktik seks pranikah yang menjadi fenomena dewasa ini, hal itu tidak bisa didefenisikan sebagai masalah moral, tetapi harus dilihat sebagai tindakan yang rasional yang dilakukan di dalam kondisi-kondisi tertentu. Atau kehadiran diskotek, tempat transaksi ekstasi berlangsung, yang masih pro dan kontra, belum dapat dipahami dengan tepat karena batas-batas sosio kultural dari pelaku bercampur aduk.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, pertama, gaya hidup kaum muda memperlihatkan berlakunya nilai-nilai yang bervariasi. Nilai-nilai tersebut sama sekali tidak terbagi, baik menjadi bagian dari suatu komunitas budaya yang terdefinisikan maupun menjadi bagian dari sub komunitas kaum muda. Variasi kelompok kaum muda itu sendiri perlu dilihat berdasarkan

berbagai parameter (gender, kelas, desa-kota, agama dan lain-lain) sehingga pendefinisian kebudayaan sebagai sesuatu yang dibagi bersama harus dipikirkan kembali keabsahannya.

Kedua, kehadiran kaum muda dengan nilai-nilai yang bervariasi sesungguhnya merupakan agen perubahan karena sikap permisif yang dimiliki dan juga karena ia berpotensi untuk melepaskan untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan primordial yang diengkulturasikan dan disosialisasikan dalam berbagai wacana sosial (Davis, 1990: Featherstone, 1990). Dari sini sesungguhnya dapat dikatakan bahwa kaum muda tidak lagi sebagai konsumen terhadap nilai-nilai yang dirumuskan oleh generasi generasi tua dalam suatu lingkungan (setting sosial), tetapi mereka mulai ikut mengendalikan nilai dan menegosiasikan praktik-praktik sosial (Griffin, 1993). Untuk itu, adalah suatu kesalahan besar jika kemudian menemukan kebudayaan kaum muda dilakukan dengan menghubungkannya dengan kebudayaan general, tanpa melihat subkultur yang dibentuk secara independen atau dalam konteks proses sosial yang begitu bervariasi seperti media.

Persoalan yang dihadapi di sini adalah: karena kebudayaan merupakan suatu ideologi, dia cenderung memarginalkan kelompok yang memiliki ideologi yang berbeda. Fakta hubungan antar generasi ini justru menegaskan betapa sesungguhnya nilai-nilai di dalam masyarakat (seperti antara satu generasi dengan generasi lainnya) tidak pernah dapat dibagi dan menjadi milik bersama. Kaum muda telah dimarginalkan akibat proses peraturan jaring makna yang tidak melibatkan mereka.

III. BEBERAPA KECENDERUNGAN

Apa yang terurai di atas adalah konsekuensi logis dan nyata dari perkembangan teknologi modern yang menimpa masyarakat dan negara-negara industri maju. Walaupun teknologi dimanfaatkan dan bahkan dikembangkan di negara-negara berkembang, hal itu tidaklah berarti dengan sendirinya seluruh perangkat dan jaringannya terbentuk disitu karena masing-masing negara menunjukkan sikap yang berbeda-beda dan tergantung *local genius* yang mereka pupuk dan ketahanan bangsa yang akan bangun untuk menghadapinya secara bijaksana. Bangsa Indonesia yang telah mengenal teknologi dalam abad ke dua puluh ini dan memanfaatkannya dengan tingkat yang semakin intensi sampai sekarang tidak terlepas dari dampak pengaruh kecenderungan teknologi itu sendiri. Kedatangan teknologi yang membawa serta struktur tersendiri dan jaringan otomatisasi yang mampu memasuki seluruh bidang kehidupan masyarakat sudah pasti menimbulkan benturan-benturan yang cukup jauh dalam kehidupan tradisional, seperti tercermin dalam kecenderungan dan perubahan gaya ataupun cara hidup masyarakat. Empat kecenderungan yang perlu kita catat sebagai masalah yang perlu kita analisis serta kita cari jalan dan penanganannya, yaitu reifikasi, manipulasi, fragmentasi, dan individualisasi.

Keempat kecenderungan itu merupakan proses yang sedang berjalan dan an sich bukanlah melawan ataupun menghambat pembangunan nasional melainkan gejala “normal” yang dapat diamati bersamaan dengan pembangunan. Namun kalau dibiarkan berkembang, tidak mustahil hal itu akan memberikan pengaruh yang cukup menentukan terhadap pembangunan.

Dengan reifikasi (res = benda) dimaksudkan disini sebagai timbulnya anggapan yang semakin meluas bahwa kenyataan harus diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lahiriah dan diukur secara kuantitatif. Kepuasan akan datang apabila orang dihadapkan pada barang secara material, angka, statistik, tingkah laku lahiriah, rupa, suara, ucapan, dan lain-lainnya. Keberhasilan keluarga berencana adalah sejumlah akseptor, kemajuan penghidupan beragama adalah terwujudnya pembangunan gedung ibadah dan lain-lainnya. Sebagai makhluk jasmani, manusia memang harus pula dengan sarana-sarana jasmani dan dinilai melalui keberhasilan lahiriah. Johannes Kepler sendiri sebagai salah seorang tokoh ilmu pengetahuan dalam zaman Renaissance menyatakan budi manusia diciptakan untuk melihat segala sesuatu dengan jelas dalam hitungan kuantitatif dan, oleh karena itu, hal-hal nonmaterial pun akan menjadi jelas apabila dituangkan dalam hitungan yang kuantitatif pula.

Namun, perlu disadari bahwa khusus dalam hal-hal yang rohani sifatnya, kuantitas dimaksud sebagai indikasi yang mengartikulasikan konsep, sedangkan indikator tidak mungkin secara ekshaustif menejermahkan suatu konsep. Dibelakang rumusan angka dan benda itu sebetulnya terkandung asumsi yang kurang dieksplisitkan dan kurang dijabarkan bahwa sejumlah benda itu dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan baik. Namun, persepsi yang tidak betul itulah mulai tampak dalam masyarakat, khususnya di antara kaum terpelajar, yang melihat seakan-akan benda yang dirumuskan secara kuantitatif merupakan suatu ukuran yang mempunyai kedudukan tersendiri sehingga timbul apresiasi berlebihan. Minum coca cola bukan lagi keluarga sejahtera melainkan yang baik adalah minum coca cola; bukan lagi keluarga sejahtera

melainkan keluarga kecil adalah (perwujudan) keluarga sejahtera melainkan kerluarga sejahtera adalah keluarga kecil; bukan lagi si Upik berkuasa melainkan kekuasaan adalah si Upik.

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, dengan iklan dan media massa yang didukung oleh teknologi maju memegang peranan besar dalam menyampaikan informasi, proses manipulasi (Freinberg, 1978: 85-100) semakin agresif dan menyebar sampai ke pelosok-pelosok desa. Teknologi itu sendiri memiliki daya manipulatif untuk mengolah dan mengubah benda-benda alamiah lagi secara artifisial sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik bagi kepentingan manusia. Namun apa yang terjadi tidaklah selalu demikian. Bukan mengabdikan sarana dan prasarana demi meningkatkan mutu kehidupan masyarakat melainkan memainkan minat, hasrat, dan ambisi manusia melalui iklan dan propaganda untuk kepentingan pemasaran produksi. Dengan demikian meluap dan banjirlah barang-barang luks ke segenap kota, kampung, desa, pelosok-pelosok tanah air untuk menjadi kebutuhan artifisial yang baru, yang akhirnya mampu membuat masyarakat menjadi objek manipulasi itu sendiri. Iklan seperti “majulah bersama bir bintang”, “Pakailah Lowery Organ, Gensi dong!” dan “Ardath rokok masa kini” merupakan contoh-contoh dari sekian banyak iklan yang bertendensi manipulatif.

Akibatnya adalah bahwa yang semula sebagaimana masyarakat cukup mempergunakan obat-obatan dan jamu tradisonal, kini merasa perlu mempergunakan kapsul yang tersaji secara rapi buatan pabrik modern, yang notabene konon kabarnya tidak boleh beredar lagi di luar negeri. Limun yang diproduksi oleh rakyat kecil tidak lagi dianggap “represntatif” untuk perjamuan dan pesta elit sehingga akhirnya terdesak iklan Seven Up atau

Mirinda atau terpaksa menghilang dari peredaran. Demikian pula macam olah raga dan ragam merk/tipe kendaraan bermotor semakin meningkat; bukan pertama-tama karena kadar kesehatan atau keamanannya yang dapat diperoleh daripadanya melainkan karena sekedar selera zaman yang mencerminkan status, seperti tergambar dalam majalah-majalah ataupun terpampang dalam iklan sepanjang jalan. Perbuatan manipulatif ini berjalan dalam masyarakat menjadi pemalsuan bukan saja dalam kualitas manusia, istilah ijazah 'Aspal' merupakan contoh manipulasi kualitas semacam itu. Manipulasi terjadi juga dalam persepsi masyarakat.

Cerita film dan TV yang sering kali dan berulang kali menyuguhkan tokoh kejahatan yang serba seram dan adegan yang menegangkan tidak kurang membentuk persepsi, pemikiran, dan imajinasi masyarakat ke arah yang negative. Pendidikan masyarakat dan pemberitaan media massa semata-mata instruktif dan kurang informatif tidak mendorong mereka untuk berfikir secara mandiri dan membentuk opini serta penilaian yang objektif terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, tantangan pokok di sini ialah bagaimana menumbuhkan rasa harga diri pada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan bangsa yang berkepribadian sehingga mereka tidak terombang-ambing dalam lautan kemewahan yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan asing dari luar.

Dalam derapnya proses pembangunan bangsa kemajuan, teramat juga gejala-gejala fragmentasi dan bidang-bidang dan pola kehidupan masyarakat. Cara kerja baru dengan mempergunakan teknologi menuntut adanya pembagian kerja dan profesionalisme. Spesialisasi dalam cabang ilmu pengetahuan membawa serta diferensiasi dalam disiplin ilmu itu sendiri. Dengan demikian, keterampilan dan keahlian dalam satu bidang

tertentu adalah tuntutan yang semakin dihargai untuk dapat memperoleh pekerjaan, namun kekaguman menghargai seseorang dalam jabatannya, dalam kedudukannya, dan dalam keahliannya sehingga martabatnya sebagai manusia yang seharusnya mendasari penghargaan itu semakin terdesak dan akhirnya tidak berperanan.

Hubungan yang terselenggara di dalam masyarakat tidak begitu tampak lagi bertumpu pada hubungan manusiawi melainkan pada hubungan jabatan, kedudukan atau profesi. Dengan demikian, orang tidak lagi merasakan adanya satu masyarakat manusia-manusia tetapi masyarakat yang manusiawi, tetapi masyarakat yang dikotak-kotakkan dalam jabatan, kedudukan, dan profesi. Orang berkumpul dengan kelompok seprofesi dan membicarakan masalah-masalah yang khas profesional. Pola hidup demikian itu mempersulit seseorang spesialis untuk memahami masalah-masalah sosial dan menghambat komunikasi lintas profesi sebab bukan saja cara hidupnya profesional melainkan juga jalan pikirannya pun profesional, yang artinya terkotak-kotak dalam dunianya sendiri.

Individualisasi merupakan kecenderungan pula yang perlu kita perhatikan dalam proses modernisasi masyarakat yang masih komunal ini. Yang menjadi ciri-ciri hakiki individualisasi ialah makin merenggangnya ikatan seseorang dengan masyarakatnya dan semakin besarnya peranan individu dalam tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat mengarah kepada dua jurusan. Pertama kearah individuisme, sehingga seseorang, mulai sadar dan mempunyai kepercayaan akan kemampuan dirinya dalam berinisiatif dan berprestasi, bertindak rasional, dan memiliki rasa tanggung jawab. Sikap yang demikian itu menjadi tumpuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua

menjurus kearah egoisme yan tidak sehat, mau menang sendiri, seperti dapat teramati dalam kesemrawutan lalu lintas dan penyereobotan-penyerobotan di bidang lain, dan tak kalah pula dalam sikap mumpung untuk memanfaatkan kesempatan. Individualisasi yang tidak didasari oleh rasa kemanusiaan cenderung menjalankan tindak serakah dan destruktif bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam proses individualisasi ini tantangan pokok ialah bagaimana menumbuhkan rasa dan sikap rasional serta bertanggung jawab dalam masyarakat bukan saja secara bersama, melainkan juga secara personal. Kesadaran etis dibutuhkan untuk mempergunakan teknologi, tetapi juga untuk mengembangkan dan menjalankan alih teknologi itu sendiri (Goulet, 197; Rusnadi 1979: 33-41).

Keempat, kecenderungan tertera diatas berjalan secara terkait mengait dalam tingkah laku sesorang secara individual. Namun, pengamatan juga menunjukkan bahwa hal itu sudah mulai menjadi pola dalam kehidupan masyarakat sehingga penanganan terhadap proses itu tidak cukup diarahkan kepada tingkah laku yang semata-mata tergantung pada seseorang tetapi juga dan lebih-lebih kepada struktur kehidupan masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Featherstone, Mike. 1990. Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity. London: Sage Publications.

Featherstone, Mike. 1990. Undoing Culture : Globalization, Postmodernism and Identity . London: Sage Publications.

Giddens, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity. Cambridge : Polity Press.

Griffin, C. 1993. Representation of Youth. London : Polity Press.

Hall, Stuart and Paul Du Gay. 1996. Questions of Cultural Identity. London : Sage Publications.

Berger, P. L. Th. Luckman. 1996. The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge. Harmondsworth: Penguin Books.

Rusnadi Suotomo. 1979. Dilema Ketergantungan Pengalihan Teknologi dan Disiplin Nasional Dunia Ketiga. Prisma v. VIII. No. 5.

KONFLIK DAN INTEGRASI

Abstract

Diversity of ethnics, cultures and religions in Indonesia put Indonesia as a most plural country in the world. Plurality in a side, is one in of Indonesia assets which be a essential factor to achieve country's development, but in other side could be instrument to obscure social and economic development when diversity appears as a conflicts trigger. According to Sociology and Antropology theories, attitudes and behavaviours of cultures and religions embracers, and their ability to accommodate each other, are essential factors to for materializing and maintening social and political integration.

Kata Kunci : Konflik, Integrasi

PENDAHULUAN

Kajian tentang Kehidupan sosial dan keagamaan kontemporer masih sangat sedikit dilakukan, keanekaragaman agama dan faham dalam agama di Indonesia, seperti juga halnya keanekaragaman suku bangsa, merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Konsekwensi dari keanekaragaman tersebut telah mengiring pada terciptanya perbedaan-perbedaan dan batas-batas golongan sosial yang tidak jarang menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, apabila ada faktor-faktor tertentu yang mempertajam dan mempetegas batas-batas golongan sosial tersebut. Konsep mengenai perbedaan dan pertentangan golongan sosial, batas-batas golongan sosial, dan struktur golongan sosial yang bersifat memecah belah dan sekaligus juga mendorong terwujudnya integrasi dari dua polarisasi tersebut telah terbentuk dua persepsi sosiologi. Pertama mempertajam batas-batas

golongan sosial dalam kemajemukan struktur golongan sosial akan menciptakan terjadinya konflik sosial. Kedua melonggarkan batas-batas sosial dan berusaha hadir dalam struktur sosial yang lebih makro mengakomodasi kepentingan kolektif stuktur sosial yang berbeda akan menciptakan terjadinya interaksi sosial.

Syaifuddin mengatakan keanekaragaman agama seperti juga halnya seperti keanekaragaman suku bangsa akan berimplikasi kepada perbedaan-perbedaan dan batas-batas golongan sosial yang tak jarang bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, apabila ada factor-faktor tertentu yang mempertajam perbedaan dan mempertegas batas-batas golongan sosial tersebut.¹ Selanjutnya dengan mengutip pendapat Frederik Bart dalam bukunya *ethnic groups dan boundaries*. Syaifuddin mengemukakan agar tercipta integrasi sosial, harus tercipta sejumlah pranata yang mengikat semua golongan sosial sehingga setiap warga dapat mengidentifikasikan diri pada suatu ciri yang juga dimiliki oleh warga golongan sosial yang lain, seperti nilai-nilai nasionalisme yang mampu merangkul harapan jutaan rakyat Indonesia dengan berbagai macam latar belakang etnis, agama, adat istiadat dan budaya untuk terlepas dari belenggu penjajahan asing dan mengikat persatuan.²

Fakta menunjukan kepluralitas masyarakat Indonesia (suku bangsa, agama dan golongan sosial lainnya) sudah merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kepluralitasan itu sudah menjadi hukum alam (*natural law*) menurut para penganut positivisme dan hukum tuhan

¹ Syaifuddin, Fedyani, Achmad, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm 59

² M. Fahrudin Muhdi, *Republika*, 20 Mei 2000

(*sunatullah*) dalam paradigma agamawan. Paradigma apapun yang diajukan, yang pasti di balik diferensiasi masyarakat Indonesia itu mengendap keragaman kebudayaan, karena sistem nilai budaya yang dimiliki oleh seorang atau kelompok yang terwujud dalam bentuk-bentuk perilaku yang terpola (*pettern of social behavior*). Agama sebagai salah satu elemen dari kemajemukan bangsa ini menurut Durkheim merupakan suatu fakta sosial, karena agama mempunyai seperangkat sistem nilai budaya keagamaan yang berfungsi sebagai acuan norma sosial dalam pola perilaku penganutnya.³

Perasaan kolektif oleh sistem nilai budaya keagamaan telah memunculkan identitas kolektif pemeluk suatu agama budaya dalam realitas sosial. Walau bagaimanapun dari lima agama formal yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia telah ikut mewarnai pola perilaku masyarakat Indonesia yang terdeferensiasi oleh berbagai sistem nilai budaya keagamaan yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Problematika sosial muncul ke permukaan, manakala masing-masing kelompok keagamaan tersebut melakukan klaim kebenaran (*truth claim*) terhadap nilai sistem budaya keagamaan mereka masing-masing sebagai referensi sosial, untuk memahami dan menghadapi lingkungan sosialnya.

Auguste Comte sebagai “lokomotif” Sosiologi dalam pembelaannya terhadap kemestian kehidupan kolektif bagi manusia mengemukakan, naluri untuk hidup bersama itu sudah dimiliki manusia, inilah yang diistilahkan dengan *Gregarious Instinc*. Lebih tajam lagi Solo Soemardjan mengatakan interaksi sosial merupakan prasyarat esensial bagi kehidupan dalam

³ Johnson, Paul Doyle, *Teori Sosiologi Kalsik dan Modern*, (Jakarta : Gramedia, 1986), hlm 76

mengembangkan potensi spiritual dan intelektual manusia.⁴ Karena dengan kehidupan bersama dapat saling belajar, saling meniru, saling isi mengisi dan saling mengembangkan pengertian dan kemampuannya di bidang spiritual dan intelektual. Ibnu Khaldun, dalam sebuah karyanya yang sangat terkenal Muqaddimah mengemukakan bahwa kehidupan bersama manusia yang terefleksi lewat organisasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survive of life*) merupakan indikasi terhadap keterbatasan kehidupan individual.⁵

Dalam proses interaksi sosial, antar orang-perorang, perorang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok mempertegas garis batas di antara kelompok sosial yang menguatkan identitas kelompok yang berimplikasi dalam perjuangan kepentingan kelompok dengan cara menepis kepentingan kelompok lain sering kali menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Karena dalam pola interaksi seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ian Craib factor kepentingan kelompok mengatasi consensus sosial yang di atur oleh norma sosial. Pola interaksi sosial dalam terminologi Sosiologi Antropologi diistilahkan dengan Interaksi Sosial Dissosiatif (konflik).

Pada sisi lain proses interaksi sosial yang terjadi dengan cara memperlonggar batas-batas kelompok sosial mengutamakan persamaan dan saling ketergantungan di antara kelompok dalam struktur yang lebih makro, mematuhi. Konsensus sosial yang merupakan refleksi dari norma-norma sosial akan menciptakan terjadinya interaksi sosial. Karena dalam pola interaksi semacam ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mannheim,

⁴ Soemardi, Selo, *Sterotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, (Jakarta, 1988), hlm 3

⁵ Tuhu Leley, Said, *Permasalahan Abad XXI : Sebuah Agenda*, (Yogyakarta, 1993), hlm 58

Berry dan Durkheim, bahwa factor konsensus yang didasarkan pada norma-norma sosial mengatasi faktor-faktor kepentingan termasuk juga kepentingan kelompok. Lebih tegas lagi Durkheim mengatakan : Norma-norma sosial itu adlah sesuatu yang berbeda di luar individu, membatasi dengan mengadili tingkah laku mereka. Oleh karena itu pola Durkheim mengatakan fakta sosial itu tidak bisa direduksi ke individu, karena fakta sosial itu tercipta bukan karena kepentingan individu tetapi atas dasar kepentingan sosial.⁶ Pola semacam ini disebut dengan pola interaksi sosial Assosiatif (integrasi).

Dalam proses sosial konflik dan integrasi sudah merupakan hukum alam (*natural law*), tidak salah kiranya jika Dahrendorf, seorang tokoh yang menelaah aliran Fungsional Struktural menyaksikan bahwa kita akan dapat memahami semua masalah realitas sosial, karena sisi yang dilihat barulah sebagian dari realitas sosial itu. Masyarakat menurut Dahrendorf bermuka dua; integrasi dan nilai-nilai versus penggunaan kekerasan dan kepentingan-kepentingan.⁷

Dari statemen di atas dapat di pahami bahwa konflik sosial itu adalah sebuah perjuangan terhadap nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan terhadap status kekuasaan dan kelangkaan sumber daya, dimana tujuan dari konflikkelompok tidak hanya untuk memperoleh nilai-nilai yang diinginkan tetapi juga untuk menetralkan, melukai dan melenyapkan lawan-lawan mereka. Konflik bisa terjadi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Konflik intra dan

⁶ Taneko, G. Saleman, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm 67

⁷ Dahrendorf, Ralf, *Konflik dan Integrasi Dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritik*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm 191

inter group sudah inheren dalam kehidupan sosial. Sedangkan integrasi sosial dimaksudkan sebagai penyatuan kelompok-kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan melenyapkan perbedaan-perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada sebelumnya. Integrasi sosial juga diartikan sebagai diterimanya seorang individu oleh anggota-anggota lain dari suatu kelompok.⁸

Konflik Sosial

Dalam *The Little Oxford Dictionary* edisi ke VI, konflik (conflict) mempunyai makna yang bervariasi, seperti fight (perkelahian, pertengkaran, pertarungan), struggle (perjuangan), opposition (perlawanan), clashing (perselisihan).⁹ Sedangkan Soekanto mendefinisikan conflict dengan pertikaian, pertarungan yakni proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku.¹⁰

Syaifuddin dan Margaret M. Poloma mengutip beberapa proposisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Konflik berfungsi menegakan dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Konflik antara suatu kelompok dan kelompok lain memungkinkan ditegaskannya kembali identitas kelompok satu sama lain dan mempertahankan batas-batasnya terhadap lingkungan sosial di luarnya.
2. Konflik tidak selalu bersifat disfungsional dalam konteks hubungan dimana konflik tersebut terjadi, sebaliknya seringkali konflik

⁸ Syaifuddin, Fedyani, Achmad, op. Cit, hlm 7

⁹ Swannel, Julia, *The Little Oxford Dictionary*, (Oxford, Clarendon, 1986), hlm. 110

¹⁰ Soekanto, Soeryono, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : Rajawali, 1983), hlm. 60

diperlukan untuk mempertahankan hubungan tersebut. Tanpa cara-cara menyalurkan kebencian satu sama lain, anggota-anggota kelompok cenderung sepenuhnya beraksi keras, atau barangkali menarik diri, oleh karena itu konflik dapat berfungsi sebagai katup pengaman, sehingga sistem sosial tersebut dapat dipertahankan dalam batas-batas tertentu.

3. Dilihat dari konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka terdapat dua macam konflik, yakni konflik realistic dan realistic. Konflik yang timbul karena tuntutan tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu disebut konflik non-realistic. Sebegitu jauh konflik adalah sarana mencapai tujuan. Sebaliknya dalam konflik-konflik non-relistic, konflik itu sendiri adalah tujuan, tidak di kondisikan oleh objek tertentu, dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang bertentangan.
4. Konflik yang lebih radikal dapat terjadi dalam keadaan hubungan dekat. Terbentuk perkumpulan dan organisasi oposisi dalam hubungan tersebut dapat mempertajam konflik secara khas. Semakin besar keikutsertaan dalam kelompok dan keterlibatan pribadi anggota-anggotanya maka semakin besar terjadinya konflik. Reaksi terhadap ketidaksetiaan pada kelompok juga makin besar dan kesetiaan pada kelompok adalah dua aspek dalam hubungan yang sama.
5. Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah-belah dan menegakkan persatuan. Sebegitu jauh, konflik yang dapat meredakan ketegangan. Sehingga dengan demikian dapat pula

bahwa konflik berfungsi stabilisator sistem sosial. Walaupun demikian, tidak semua konflik memiliki fungsi positif bagi hubungan tersebut, melainkan konflik yang hanya menyangkut tujuan, nilai-nilai, atau kepentingan-keentingan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat dimana hubungan ditegakkan. Selain itu konflik yang membahayakan konsensus masyarakat dapat diredam oleh hadirnya kelompok berstruktur longer dengan orientasi yang tersebar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

6. Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilkan mobilisasi energi para anggota kelompok yang bersangkutan, sehingga kohesi setiap anggota kelompok ditingkatkan. Apakah meningkatnya sentralisasi kelompok tentulah tergantung pada ciri dan sifat konflik dan jenis kelompok yang ada. Sentralisasi biasanya lebih terjadi pada kejadian perang dimana terdapat diferensiasi dalam struktur yang memerlukan pembagian kerja yang jelas. Depotisme nampaknya kurang terkait dengan kurang kohesi. Unsur ini dibutuhkan untuk menyalurkan pertentangan dimana tidak cukup terdapat solidaritas dalam kelompok yang bersangkutan untuk menggerakkan energi para anggotanya. Pada kelompok yang bertentangan dengan kelompok diluarnya, sentralisasi dan depotisme tergantung pada sistem nilai dan struktur kelompok sebelum terjadinya konflik tersebut.
7. Ada tiga aspek struktur kelompok yang harus dipertahankan, dan situasi sosial. Yang dimaksud dengan situasi sosial tersebut adalah, apakah pertentangan tersebut terus menerus atau kadangkala aspek-

aspek di atas tidak bisa berdiri sendiri, karena yang satu terkait dengan yang lainnya.

8. Suatu konflik dimana para pelakunya merasa bahwa mereka semata-mata wakil konflik atau kelompok cenderung lebih radikal, karena kesadaran bahwa perjuangan karena dilandaskan pada ideologi tertentu yang tidak semata-mata pribadi sifatnya. Keyakinan agama dapat dimasukkan dalam kategori ini.
9. Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru diantara pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya ada. Konflik berlaku sebagai ransangan untuk menciptakan aturan-aturan dan sistem norma yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang bertentangan tadi sehingga keteraturan sosial kembali terwujud.
10. Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan, koalisi dan organisasi dapat timbul dimana kepentingan praktik utama pada pelakunya terlibat.¹¹

Suparlan mengatakan konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai.¹² Kekelahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai suatu tujuan untuk memenangi tujuan yang ingin di capai. Berbeda dengan persaingan atau kompetisi yang memiliki untuk pencapaian kemenangan melalui

¹¹ Poloma M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali, 2000), hlm 107-120

¹² Suparlan, Parsudi, *Konflik sosial dan Alternatif Pemecahannya* (dalam Antropologi Indonesia, Th, XXIII, No. 58, 1999), hlm. 1

keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik, tujuannya adalah penghancuran pihak lawan, karena itu tujuan untuk memenangi sesuatu yang ingin di capai acapkali menjadi tidak penting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan.

Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individu, umum terbentuk dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Sesuatu perang sebagai simptom, umumnya terjadi karena ketiadaan, tidak cukupnya atau telah hancurnya prosedur-prosedur yang dapat digunakan untuk menjebatani perbedaan-perbedaan yang dapat memecahkan atau menghentikan perang atau konflik tersebut. Menurut para sosiolog dalam konflik kepentingan-kepentingan yang dimiliki orang-perorang atau kelompok berada diatas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dahrendorf mengemukakan kehidupan manusia di masyarakat didasari oleh konflik, yang bukan semata-mata dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan karena berbagai aspek yang ada dalam masyarakat, yang dilihat sebagai organisasi sosial.¹³ Organisasi menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata. Karena itu warga suatu masyarakat akan tergolong kedalam mereka yang mempunyai dan miskin, dalam kaitan dengan kekuatan sosial atau kekuasaan. Karena organisasi itu juga membatasi berbagai tindakan manusia, maka pembatasan-pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan oleh mereka yang hanya memiliki kekuasaan. Mereka yang miskin kekuasaan yang terkena oleh pembatasan-

¹³ Dahrendorf, Ralf, *op. Cit.*, hlm. 106

pembatasan secara organisasi oleh yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu konflik meruoakan sesuatu yang endemic atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Model gotong-royong dan anti individualisme atau anti individualitas dengan aturan main yang datangnya dari atas selama pemerintahan orde baru, telah menghasilkan berbagai bentuk konflik terselubung, konflik tersebut sebagai konflik terbuka, karena tidak seimbangny hubungan kekuatan sosial yang dipunyai oleh yang berkuasa, dengan yang dipunyai oleh yang dikuasai atau rakyat sehingga rakyat tidak berani menentang kekuasaan pemerintah secara terang-terangan. Konflik terselubung terjadi antara mereka yang menikmati berbagai bentuk kekuasaan dan fasilitas pemerintah orde baru dan yang tidak.¹⁴

Alqadri mengemukakan beberapa faktor penyebab timbulnya konflik, antara lain sebagai berikut : pertama faktor budaya dan psikologis. Konflik yang dipicu oleh faktor ini antara lain berkaitan dengan perbedaan budaya yang terdapat pada kelompok etnis/agama yang sedang mengadakan hubungan. Perbedaan-perbedaan budaya antara suatu kelompok dengan kelompok lain terwujud atau dikemukakan antara lain dalam bentuk sistem nilai budaya (*cultural value sistem*) dan orientasi nilai budaya (*cultural value orientation*). Kedua unsur budaya diatas, yang menjelma secara konkrit dalam bentuk mentalitas dan perilaku, cenderung mempengaruhi berhasil atau tidaknya proses atau program pembangunan dari kelompok yang bersangkutan, atau dari suatu bangsa. Sikap mentalis, perilaku dan perbuatan dari atau yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat kelompok etnis/agama tertentu (umumnya tidak sesuai dengan kebaisaan, tradisi dan

¹⁴ Suparlan, Parsudi, op. Cit., hlm. 8

adat kelompok etnis lainnya, khususnya kelompok etnis setempat, cenderung menimbulkan keresahan, ketidakpuasan, kekecewaan dan luka atau kepedihan. Kedua, faktor struktural yang berkaitan dengan ekonomi dan politik, ini mengambil bentuk dalam kompetisi sosial ekonomi dan politik yang tidak adil. Keterlibatan aparat pemerintah yang berkolusi dengan konglomerat dan anggota kelompok pendatang. Mereka meminggirkan atau memarginalisasi para anggota kelompok setempat melalui dominasi atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam.

Etnis/agama dengan identifikasi politik atau ekonomi sulit untuk melihat apakah konflik itu berbau etnis/agama atau sekedar komoditas politik atau ekonomi.¹⁵ Selo Soemartjan menyebut beberapa faktor penyebab terjadinya konflik etnis/agama antara lain sebagai berikut : a) ada dua suku /agama yang hidup berdampingan, b) dalam hubungan sosialnya terjadi suatu interaksi, c) dalam interaksi itu dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak bahwa ada unsur-unsur budaya yang bertentangan, ada ketimpangan sosial, atau ada sumber penghidupan yang menjadi rebutan.¹⁶

Integrasi Sosial

Disamping interaksi sosial yang dissosiatif (konflik sosial) di dalam masyarakat terdapat juga pola interaksi sosial asosiatif yang berimplikasi pada terciptanya masyarakat yang berintegrasi, terpadu dalam satu keatuan, As Homby mengatakan integrasi merupakan kata benda dari kata kerja integrate yang berarti Combine (Parts) into Whole bring or come into equal membership of society; and racial etc. Integration or being integrated; the

¹⁵ Salam, Alfitra, Melayunisasi (dalam tempo, 25 Mei 2001)

¹⁶ Selo Soemartjan, Kompas, 22 Maret 2001

integration of black children into the school system in the southern state of America.

Kontowijoyo mengutip pendapat Wyron Weiner mendefinisikan integrasi dengan Which hold a society and a political system together. Fokus dari integrasi sosial tersebut adalah bagaimana sistem-sistem, lembaga-lembaga sosial itu saling terkait dan saling menunjang.¹⁷ Masyarakat yang terintegrasi tersebut biasanya dikat oleh suatu sistem nilai budaya. Suparlan yang mengutip pendapat Talcott Persons dan Edward Shills mengatakan; proses-proses sosial yang terwujud sebagai tindakan-tindakan sosial pada dasarnya bertujuan untuk dapat saling bekerja sama para pelaku yang merupakan warga masyarakat.¹⁸ Karena itu proses-proses sosial mempunyai fungsi-fungsi yang menekankan tujuan untuk terwujudnya kehidupan sosial dan kemasyarakatan yang bercorak keseimbangan atau ekuilibrium diantara unsur-unsurnya, sehingga menghasilkan adanya integrasi sosial dan integrasi kemasyarakatan. Oleh Persons dan pengikutnya, tindakan-tindakan yang terwujud sebagai konflik dilihat sebagai penyimpangan, atau tidak fungsional dalam kehidupan manusia.

Menurut Persons sebagaimana terintegrasinya bagian-bagian dari organisme biologi dari tubuh manusia, masyarakat pun dalam melaksanakan fungsi-fungsi diantara institusi yang ada juga punya saling ketergantungan yang sangat tinggi.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Dimensi Kultural Integrasi Bangsa* (dalam Republika, 15 Desember 2000)

¹⁸ Suparlan, Parsudi, *Konflik sosial dan Alternatif Pemecahannya* (dalam Antropologi Indonesia, Th. XXIII, No. 58, 1999)

Kahmad mengatakan inti pembahasan Persons adalah konsep sistem, yang merupakan hal yang sangat sentral dalam tindakan.¹⁹ Teori umumnya tentang tindakan mencakup empat sistem yaitu sistem kebudayaan sosial kepribadian dan perilaku organisme. Sistem kebudayaan yang unit analisisnya adalah sistem simbol yang didalamnya terdapat keyakinan agama, bahasa dan nilai-nilai kebangsaan, ketika nilai-nilai sosial ini menginternal dalam masyarakat sosial ini menginternal dalam masyarakat sehingga terjadi sosialisai nilai-nilai tersebut merupakan kekuatan integrasi dalam melaksanakan kontrol serta mengikat semua masyarakat sistem kebudayaan tersebut mempengaruhi cara orang berinteraksi. Oleh karena itu sistem sosial tersebut ditentukan oleh sistem kebudayaan. Terciptanya masyarakat yang terintegrasi didasari oleh sistem kebudayaan yang mengikat perilaku masyarakat.

Jhonson mengemukakan Durkheim menyebut istilah integrasi sosial atau kekompakan sosial dengan istilah solidaritas sosial menjadi dua bagian; solidaritas mekanik dan solidaritas organis sesuai dengan kondisi masyarakatnya.²⁰ Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu “Kesadaran kolektif” yang menunjukkan pada totalitas kepercayaan dan pola normatif yang sama pula. Karena itu individualitas tidak berkembang; individualitas itu terus menerus dilumpuhkan oleh tekanan yang besar sekali untuk konformitas. Bagi Durkheim indikator yang paling jelas untuk solidaritas mekanik adalah ruang lingkup dan kerasnya hukuman yang bersifat menekan (repressive). Hukum-hukum ini mendefinisikan setiap perilaku

¹⁹ Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, (Bandung : Rosda Karya, 2000), hlm 63

²⁰ Jhonson, Paul, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta : Gramedia, 1986), hlm 181-184

sebagai sesuatu yang jahat, yang mengancam atau melanggar kesalahan kolektif yang kuat itu, hukuman terhadap penjahat memperlihatkan pelanggaran moral, karena merusak dasar keteraturan sosial.

Hukuman tidak harus mencerminkan pertimbangan rasional yang mendalam mengenai jumlah kerugian secara obyektif yang menimpa masyarakat, juga tidak merupakan pertimbangan yang diberikan untuk menyesuaikan hukuman itu dengan kejahatan; sebaliknya hukuman itu mencerminkan dan menyatakan kemarahan kolektif yang muncul tidak terlalu banyak oleh sifat orang yang menyimpang atau tindakan kejahatannya seperti penolakan terhadap kesadaran kolektif yang diperlihatkannya. Ciri khas yang penting dari solidaritas mekanik adalah solidaritas itu didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi di dalam kepercayaan, sentiment dan sebagainya. Homogenitas semacam itu hanya kalau pembagian kerja bersifat sangat minim.

Berlawanan dengan ini solidarities organik yang muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Munculnya perbedaan-perbedaan di kalangan individu merombak kesadaran kolektif itu, yang pada gilirannya menjadi kurang penting lagi sebagai dasar untuk keteraturan sosial dibandingkan dengan saling ketergantungan fungsional yang bertambah antara individu-individu yang memiliki spesialisasi dan secara relatif lebih otonom sifatnya. Durkheim mempertahankan bahwa kuatnya solidaritas organik itu ditandai oleh pentingnya hukum yang bersifat memulihkan (restitutive) dari pada yang bersifat represif. Tujuan kedua hukum itu sangat berbeda. Hukum restitutive

berfungsi untuk mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang kompleks antara berbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena itu hukuman yang diberikan kepada penjahat berbeda dalam kedua hukum itu. Tipe sanksi yang bersifat restitutif, Durkheim mengatakan bukan bersifat balas dendam, melainkan sekedar memulihkan keadaan.

Dalam sistem organik, kemarahan kolektif yang timbul karena perilaku menyimpang menjadi kecil kemungkinannya, karena kesadaran kolektif itu tidak begitu kuat. Sebagai hasilnya hukum lebih bersifat rasional, disesuaikan dengan parahnya pelanggaran dan bermaksud untuk memulihkan atau melindungi hak-hak dari pihak yang dirugikan atau menjamin bertambahnya pola saling ketergantungan yang kompleks yang mendasari solidaritas sosial. Pola restitutif ini jelas terlihat dalam hukum-hukum pemikiran, hukum kontrak hukum perdagangan dan peraturan administratif dan prosedur-prosedur.

Syaifuddin yang mengutip pendapat Clifford Geertz dalam analisisnya mengenai konflik dan interaksi agama di Jawa dalam perspektif antropologi mengatakan aspek-aspek kebudayaan primordial sebagai unsur lama yang tetap bertahan pada tingkat tertentu dalam kebudayaan Jawa masa kini bisa berfungsi sebagai pengikat ke tiga varian keagamaan di Jawa, yakni abangan, santri, dan priyayi.²¹ Di lain pihak, berkembangnya kebudayaan nasional dilihat Geertz sebagai faktor yang ikut mewujudkan interaksi masyarakat tersebut.

Toneko menggambarkan masyarakat yang terintegrasi tersebut dengan masyarakat yang selalu melaksanakan kerjasama dalam segala aspek

²¹ Syaifuddin, Fedyani, Achmad, op. Cit, hlm 68

kehidupan.²² Dalam konsep-konsep sosiologi, kerjasama biasanya disebut dengan “cooperation”, konsep cooperation dapat dibedakan antara lain, “spontaneous cooperation”, “directed cooperation”, “contractual cooperation” dan “traditional cooperation”. Yang kedua merupakan hasil perintah atasan/penguasa, yang ketiga merupakan bentuk kerjasama sebagai bagian atau unsur-unsur sosial.

Asumsi-asumsi atau proposisi-proposisi yang dikemukakan oleh teoritis konflik dan consensus (integrasi) diatas akan penulis gunakan untuk menganalisa dan memahami bagaimana masing-masing pemeluk agama mengakomodasi perbedaan nilai keagamaan yang mereka miliki sebagai referensi sosial dalam melaksanakan interaksi sosial yang menguatkan batas-batas golongan sosial sehingga tercipta kontak sosial dan bagaimana masing-masing pemeluk agama melonggarkan perbedaan nilai-nilai keagamaan yang mereka miliki dan berusaha berinteraksi dalam struktur sosial yang lebih makro sehingga tercipta integrasi sosial.

²² Toneko, G. Saleman, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali, 1990), hlm 118

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadrie, Ibrahim, Syarif, *Konflik Etis di Ambon da Sambas : Suatu Tinjauan Sosiologis* (dalam Antropologi Indonesia, 1999, Th, XXIII No. 58)
- Berry, David, *Teori-Teori Sosial Modern dari Persons sampai ebermas*, Jakarta : Rajawali, 1983
- Dahrendorf, Ralf, *Konflik dan Integrasi Dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritik*, Jakarta : Rajawali, 1986
- Johson, Paul, Doyle, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (terjemahan) Jakarta : Gramedia, 1986
- Keesing, M. Reger, *Antropologi Budaya Perspektif Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1992
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung : Rosda Karya, 2000
- Kuntowijoyo, *Dimensi Kultural Integrasi Bangsa* (dalam Republika, 15 Desember 2000)
- Pelly, Usman, *Teori-Teori Sosial Budaya*, Jakarta : P & K, 1994
....., *Akar Kerusuhan di Indonesia Disintegrasi Nasional* (dalam Antropologi Indonesia, Th, XXII. No. 58, 1999)
- Poloma M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta : Rajawali, 2000
- Soemardjan, Selo, *Konflik Antar Suku di Indonesia*, dalam kompas, Kamis 23 Maret 2001
- Suparlan, Parsudi, *Konflik sosial dan Alternatif Pemecahannya* (dalam Antropologi Indonesia, Th, XXIII, No. 58, 1999)
- Soekanto, Soejono, *Karl Mannhim, Soziologi Sistemtis*, Jakarta : Rajawali, 1985
....., *Kamus Sosiologi*, Jakarta : Rajawali, 1983

Syaifuddin, Fedyani, Achmad, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*, Jakarta : Rajawali, 1986

Salam, Alfitra, Melayunisasi (dalam tempo, 25 Mei 2001)

Taneko, G. Saleman, *Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta : Rajawali, 1990

PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN INDONESIA DI TENGAH KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

I. PENDAHULUAN

Ki Hajar Dewantara dalam seboyannya pada awal tahun 1950-an menegaskan bahwa agar kebudayaan nasional disusun dari puncak-puncak kebudayaan daerah bukan berlandaskan sense of reality. Kebudayaan itu sendiri adalah manifestasi budi manusia yang selalau tersusun dalam konfigurasi nilai-nilai. Dalam buku *Values as Integrating Force in Personality, Society and Culture* terdapat perumusan tentang nilai-nilai yang timbul dari aktivitas proses berfikir manusia menjadi enam nilai (S. T. Alisjahbana, 1977).

Keenam nilai itu adalah (1) nilai teori atau ilmu yang berusaha menrumuskan identitas tiap-tiap benda atau peristiwa; (2) nilai ekonomi yang berusaha memperoleh utilitas segala sesuatu; (3) nilai agama yang melihat segala sesuatu di dunia sebagai penjelmaan kekudusan dan tidak dapat diketahui manusia dengan akalanya; (4) nilai seni yang menjelmakan keindahan; (5) nilai kekuasaan yang melihat hubungan sesama manusia secara vertikal dari organisasi sosial yang menjelma dalam hubungan politik; (6) nilai solidaritas yang merupakan poros horizontal dari organisasi sosial dan terjelma cinta, kasih sayang, persahabatan, gotong royong dan sebagainya.

Diakui bahwa letak peradaban antara kebudayaan daerah dengan lainnya adalah konfigurasi yang berbeda-beda. Apabila ditinjau dari

kacamata sejarah, maka terdapat suatu daerah yang kuat unsur Hindhu-Budhanya dan di daerah lain unsure Islamnya yang menonjol atau mungkin di daerah lain lagi ditemukan unsur-unsur kebudayaan yang dibawa agama Kristen dan sebagainya. Keadaan demikian akibat adanya kontak-kontak kebudayaan yang berbeda-beda waktu dan frekuensi atau tingkat kontak itu sendiri. Di sinilah perjalanan sejarah yang dialami bangsa Indonesia turut membentuk keanekaragaman kebudayaan bangsa (Uka Tjandrasasmita, 1991/1992:42).

Dengan demikian ketiga kebudayaan (Hindu-Budha, Islam, dan Kristen) dapat dikatakan kebudayaan yang dikuasai nilai agama. Kebudayaan jenis ini banyak memakai imajinasi, intuisi, dan perasaan yang disebut kebudayaan ekspresif. Sebaliknya adalah kebudayaan progresif yang dikuasai oleh pengetahuan dan diperoleh melalui pemikiran rasional tentang dunia nyata yang dapat ditangkap oleh pancaindra (S. T. Alisjahbana, 1982:21). Dalam konfigurasinya pengetahuan disebut ilmu. Dengan ilmunya manusia mengetahui hukum dan kemungkinan-kemungkinan alam. Berdasarkan itu manusia dapat menciptakan teknologi yang dipakainya dalam ekonomi yang bersifat utilitas bagi kepentingan manusia.

Arnold J. Toynbee mengatakan bahwa perkembangan teknologi dan ekonomi membuat manusia makmur, tetapi kemudian manusia menjadi budak dari lingkungan yang diciptakannya (Arnold J Toynbee, 1988:39). Apabila kondisi seperti itu dibiarkan berlarut-larut, maka manusia akan semakin menderita baik fisik dan psikis, bahkan terjadi situasi yang menurunkan derajat manusiawinya (C. A. van Peursen, 1976:194). Realitas semacam inilah yang memunculkan suatu pemikiran bahwa warisan

kebudayaan (*material-culture and immaterial culture*) mempunyai peranan penting dalam pembangunan bangsa.

Pada dewasa ini tampak perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi semakin cepat. Kondisi itu menciptakan pandangan bahwa iptek terpisah jauh dari kebudayaan, yang pada gilirannya diikuti sikap manusia lebih tergantung pada mesin. Tanpa menyadari atau mungkin juga ketidaktahuan bahwa dibalik ilmu dan teknologi terdapat budaya. Kondisi semacam ini yang perlu digaris bawahi. Menurut S. T. Alisjahbana :

“.... Kegagalan kita sekarang ialah kita banyak mengetahui tentang ilmu, teknologi dan ekonomi baik tentang teori maupun praktek. Akan tetapi dilupakan orang bahwa kebudayaan yang dikuasai nilai ilmu dan ekonomi mempunyai mentalitas, sikap hidup dan cara berfikir yang menentukan kelakuan dalam hal ini tampak oleh kita bahwa ilmu, teknologi maupun ekonomi modern belumlah menjadi bagian yang hakikidarim kelakuan bangsa kita, semuanya masih disangkal dan belum menentukan pikiran maupun cara berbuat....”(S. T. Alisjahbana, 1981:23)

Statmen yang dikemukakan oleh S. T. Alisjahbana itu masih ada relevansinya dengan kondisi sekarang, yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Sebagai *social control*, maka diperlukan pula pembangunan mentalitas, sikap hidup dan cara berfikir sebagai imbalan dari kemajuan yang dicapai ilmu dan teknologi, agar pembangunan nasional tidak menemui stagnasi.

II. PEMAHAMAN KEBUDAYAAN DAN PEMBANGUNAN

Pembangunan sering dianalogikan dengan modernisasi, yang dibarengi dengan kemajuan terus-menerus dari ilmu dan teknologi. Adanya pengkotakan pendidikan justru memperbesar perbedaan yang semakin tajam antara kebudayaan dan iptek. Padahal teknologi lahir dari kebudayaan progresif yang dikuasi ilmu dan ekonomi, dengan kata lain ilmu dan ekonomi bersama-sama melahirkan teknologi.

Bagi bangsa Indonesia Negara yang sedang membangun, salah satu masalah pokok adalah di satu sisi bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat dan di sisi lain tetap mempertahankan identitas budayanya. Fenomena itu terwujud dalam pembangunan dan kebudayaan nasional, yang menimbulkan pertanyaan bagaimana menemukan sarana paling efisien dan efektif untuk memasukkan pengetahuan dan sikap baru pada masyarakat agar sejalan dengan alam pembangunan? Akan tetapi fenomena itu masih sulit diselesaikan, karena strategi pembangunan cenderung berasumsi bahwa pranata dan tradisi masyarakat sulit berkembang selama program pembangunan diperkenalkan. Sebaliknya dalam bunga rampai yang disunting oleh Nat J. Colleta dan Umar Kayam berpendapat bahwa kebudayaan asli dapat dan harus digunakan sebagai media pembangunan.

Kebudayaan local dilihat sebagai media atau sarana dalam pembangunan, salah satu faktornya karena mempunyai legitimasi tradisonal di mata masyarakat pendukungnya (Nat J. Colleta dan Umar Kayam, 1987:157). Dengan demikian dapat dikatakan kebudayaan sebagai alat bagi pembangunan bukan penghalang. Sebagai contoh sistem subak di Bali yang mempunyai hubungan sosial sangat rumit antara *land* dan *mand* untuk menunjukkan bahwa pranata itu mengikat banyak segi dari proses produksi.

Pranata semacam ini dapat dijadikan media bagi introduksi teknologi baru di bidang pertanian. Ada lagi misalnya sistem banjar yang juga dianggap penting sebagai sarana pengembangan pranata keluarga berencana dan sebagainya.

Pada pihak lain apa yang dialami pembangunan itu sendiri? Gambaran umum tentang pembangunan yang muncul selama ini hanyalah peningkatan sektor ekonomi. Sebenarnya makna pembangunan lebih luas yaitu pembangunan sebagai pembebasan manusia dari kemiskinan dan kelemahan. Di samping itu membebaskan rakyat dari struktur sosial yang menindas dan eksploitatif dengan sasaran member motivasi kepada rakyat untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan baru (Soedjatmiko, 1985:108-109). Realitas dalam masyarakat memperlihatkan kondisi yang berbeda sama sekali dengan cita-cita pembangunan seperti yang dipikirkan Soedjatmiko. Pelanggaran hak-hak asasi dengan dalih untuk kepentingan nasional pemupukan kekayaan di tangan segelintir orang dan sebagainya. Pola pembangunan dan segala kebijaksananya janganlah bersifat menghancurkan, tetapi hendaknya bersifat mendukung terhadap kebebasan serta martabat manusia.

Untuk memperkokoh kebebasan manusia dalam masyarakat maka pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara perubahan – ketertiban – keadilan. Namun demikian yang terjadi adalah kesibukan yang berlebihan terhadap kestabilan dan keamanan (sekali pun hal ini tidak bisa dipungkari untuk memperlancar pembangunan). Sampai-sampai menghambat dan melumpuhkan perubahan yang perlu, mematikan kreatifitas dan kemampuan inovatif di samping pertumbuhan dan sosial menuju kemandirian masyarakat dan daya pembaharu cultural.

Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa dapat dianalogikan dengan modernisasi. Cita-cita modernisasi yang mencoba mengendalikan beberapa segi modernitas yang kurang diharapkan dan mencoba mempertahankan paling tidak beberapa segi tradisi, pada dewasa ini diungkapkan oleh gerakan kebudayaan kaum muda dengan *counter culture* (budaya tandingan). Seperti yang dapat kita lihat akhir-akhir ini di Yogyakarta sebagian kaum muda berupaya kembali pada cara hidup lebih sederhana dan dianggap lebih sehat, misal sepeda onta yang semakin populer dilengkapi asesoris tempo doeloe. Kondisi semacam itu tampaknya sesuai dengan yang dikemukakan Peter L. Berger bahwa adanya ketidakpuasan terhadap dehumanisasi dan kemajemukan (keterasinga) dalam masyarakat modern, dan hasrat untuk memelihara beberapa sari kebudayaan pribumi (Peter L. Berger, 1976:127).

Proses pembangunan seharusnya mengkaitkan beberapa bidang kehidupan manusia. Pembangunan tidak hanya usaha penanaman modal dan kemudian *profit oriented*, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana pola untuk memperhatikan eksistensi manusia secara keseluruhan.

Terlepas dari berbagai manfaat dan kenyamanan yang diberikan, laju perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat telah menciptakan ancaman-ancaman. Proses adaptasi manusia yang belum paripurna, inovasi yang melimpah telah melahirkan *technostress* dalam bentuk *technoanxieties* yaitu yang membuat orang menentang adaptasi *tecnocenteredness* yaitu keyakinan yang berlebihan terhadap kemampuan teknologi (T. Jacob, 1988:40). Di samping itu adanya kebebasan manusia yang terkekang, dehumanisasi, kompetensi yang negatif seperti alkoholisme dan sebagainya akibat perbedaan akses terhadap ilmu dan teknologi.

Ilmu dan teknologi merupakan produk manusia atau salah satu dari nilai kebudayaan. Ia mempunyai fungsi utama sebagai alat perpanjangan dan penguat otot dan otak manusia dalam menata kehidupan serta beradaptasi dengan alam. Dalam perkembangannya ilmu dan teknologi ternyata membawa tabiat-tabi'at yang sukar dikendalikan penciptanya. Akibatnya manusia sering lepas control dan terpaksa terhanyut oleh keinginan barang ciptaanya. Ilmu dan teknologi menjadi tuan dan manusia menjadi hambanya. Menurut T. Jacob untuk menghindari hal itu mutlak diperlukan, demi kemanusiaan, kemerdekaan dan kebebasan manusia.

Oleh karena itu perlu ditemukan pegangan untuk bertahun dari seretan arus perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam hal ini Soedjatmiko mengajurkan agar agama dilibatkan dalam politik pembangunan dan menegaskan bahwa agama merupakan salah satu sektor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia (Soedjatmiko, 1985:196-207).

Kebijakan pembangunan lebih mengarah kepada pembangunan fisik sehingga pembangunan non fisik tertinggal. Menurut Sartono Kartodirjo bahwa untuk membangun perangkat keras bukan suatu pekerjaan sulit. Misalnya mendirikan gedung berlantai 200 akan dapat secara mudah dirancang oleh arsitek, tetapi membangun perangkat lunak dibutuhkan waktu lama dan penanganan sulit (Sartono Kartodirjo, 1990:11). Operasionalnya, membangun perangkat keras hasilnya bisa langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya, tetapi membangun perangkat keras hasilnya bisa langsung dilihat dan dirasakan manfaatnya, tetapi membangun perangkat lunak memerlukan waktu dua sampai tiga generasi sehingga hasilnya tidak dapat secara langsung dirasakan.

Memang diakui bahwa kebutuhan material merupakan hal yang sangat penting, tetapi pembangunan jiwa manusianya sendiri juga menduduki posisi sejajar, sebab kalau tidak jiwa itu akan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Kondisi inilah yang mengkhawatirkan masa depan bangsa. Di sinilah letak arti pentingnya ilmu-ilmu humaniora untuk memahami suatu perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi dalam pembangunan nasional.

III. STRATEGI KEBUDAYAAN

Dengan melihat masalah dan tantangan pembangunan bangsa seperti terurai di atas, demikian pula berkiblat pada orientasi dasar mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang secara lebih kongkrit tertuang dalam tujuan periode Repelita IV, yaitu melanjutkan usaha pembangunan nasional secara berkesinambungan serta menciptakan kerangka landasan untuk dapat tinggal landas, maka perlu disusun suatu catatan ada baiknya dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama-tama, penyusunan strategi perlu dibuat dengan persepsi budaya yang komprehensif, yang mempunyai cakupan luas terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Persepsi budaya tidak terarah hanya kepada kesenian semata-mata dan strategi budaya bukanlah strategi kesenian. Aspek strategi dari kesenian ialah bahwa ia merupakan kritalisasi kenyataan-kenyataan sosial dan oleh karena itu itu, dengan bercermin pada ulah dan gejolak seni yang terungkap, kita dapat mengikuti dan menyadari situasi sosial yang sebenarnya. Namun, mengubah persepsi, cara hidup, dan tingkah laku masyarakat bukanlah kesenian. Cakupan luas yang

dimaksudkan itu secara ringkas menyangkut semua faktor budaya, yaitu anthrhopos, oikos, tekne, dan etnhos.

Kedua, strategi kebudayaan dimaksudkan untuk menghadapi masa depan dengan segala masalah dan tantangannya dan, oleh karena itu, wajarlah berorientasi ke depan. Warisan budaya perlu dihargai, tetapi agar warisan dari masa lampau itu dapat menunjukkan maknanya bagi kehidupan masyarakat sekarang ini, maka perlu dibuat tafsiran-tafsiran yang kreatif, seperti telah dikemukakan oleh Gadamer dalam membahas fungsi sejarah (Gadamer, 1975; Linge, 1977). Dengan dilengkapi dengan tafsiran-tafsiran kreatif itu, berpijak dan bermodalkan warisan dan budaya bangsa, strategi kebudayaan mampu memberikan optimism serta menanamkan rasa kebanggaan dan kepercayaan akan kemampuan bangsa sendiri untuk mengatasi permasalahan.

Ketiga, strategi kebudayaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam kehidupan yang eksistensial manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan, baik jasmani maupun rohani. Untuk itu, diadakan usaha-usaha dalam menyediakan, memperbanyak, memperluas dan meningkatkan sarana dan sektor kehidupan dengan dukungan ilmu, teknologi dan sistem pengelolaan yang maju. Namun, perlu disadari bahwa seluruh sarana dan prasarana itu mempunyai kedudukan instrumental dan hanya akan berarti dan bermakna sejauh diarahkan dan digunakan untuk kepentingan manusia. Jadi, ada satu yang perlu diartikulasikan, sedangkan arti dan makna manusiawi akan terwujud sejauh manusia berhasil mentransformasikannya ke dalam dirinya sehingga mutu dan taraf hidup masyarakat ditingkatkan. Dengan demikian, terjadi suatu perubahan dalam kehidupan manusia menuju ke tingkat yang lebih baik dan lagi terbentuk

suatu suasana kehidupan yang memungkinkan kelancaran komunikasi dan informasi antar manusia.

Dengan memperhatikan catatan kaki di atas, strategi kebudayaan dapat dirumuskan sebagai berikut “menciptakan tingkat dan suasana kehidupan masyarakat mandiri”. Dalam rumusan itu terkandung adanya kondisi dinamis untuk berbuat secara mandiri, tidak tergantung, ataupun menyalahkan diri kepada kebaikan masyarakat ataupun bangsa lain; suatu harga diri dan kebangsaan nasional yang terbuka terhadap bantuan asing, tetapi tidak menjadikan bantuan itu sebagai temuan hidup. Kehidupan yang mandiri pada hakikatnya menunjukkan adanya kepribadian yang artinya tidak tenggelam dalam arus sarana dan prasarana yang senantiasa mengalir dan dalam arus komunikasi modern zaman sekarang, tetapi bahkan dapat merelativisasikannya dengan diri pribadi sebagai manusia dan ukuran.

Oleh karena itu, kepribadian mengacu kepada sikap hidup sederhana, yang pertama-tama perlu ditafsirkan dalam makna bathiniah (*innerlich*), yang seseorang dengan kelugasan, kejujuran, serta tanggung jawabnya dapat memperlihatkan diri secara lahiriah sebagai Selbst tanpa manipulasi apapun. Sikap yang mandiri ini tidak cukup diungkapkan dalam satu perbuatan, tetapi harus menjadi disposisi habitual, yang artinya sudah menjadi cara hidupnya sehingga memiliki kesadaran, biasa, dan cenderung untuk melakukan perbuatan secara mandiri. Dalam tingkatan kehidupan yang demikian itu, masyarakat di satu pihak memiliki kekuatan akulturatif, yaitu terbuka terhadap unsure-unsur budaya dari luar, menerimanya secara selektif, dan mampu mengintegrasikannya ke dalam sejarah sejak datangnya kebudayaan Hinduisme dan seterusnya sampai sekarang. Di samping itu, terkandung pula daya kreatif untuk belajar dari pengalaman dan

keberhasilan bangsa lain dan mempunyai keberanian untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang perlu. Pada lain pihak proses pembangunan nasional ini bangsa Indonesia perlu menyadari pentingnya usaha untuk menghindari bahaya terjerumus ke dalam jaringan kekuatan transnasional dan mencari menurut irama musik yang mereka atur.

IV. SIMPULAN

Dari urian di atas dapatlah ditarik suatu konklusi sebagai berikut:

1. Sebenarnya proses pembangunan yang berlangsung mereferasi pada manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya.
2. Kehidupan modern sesuai dengan perkembangan pembangunan yang diciptakan adalah sebuah kehidupan tempat ilmu dan teknologi mengabdikan, bukan memperbudak umat manusia.
3. Dalam konteks ini yang lebih menentukan ketahanan hidup suatu unsure budaya adalah vitalitas, reseptivitasnya oleh calon penerima-penerima. Kebijakan Bhineka Tunggal Ika menjamin sifat mozaik sebagai ciri khas kebudayaan Indonesia.

KEPUSTAKAAN

- Alisjahbana, S. T., 1977, *Values an Integrating Force in Personality, Society and Culture*, Jakarta, Idaya Press.
- Berger, peter L., 1976, *Pyramids Of Sucrifice, Political Ethics And Sosial Change*, New York, Anchon Pres.
- Colleta, Nat J., dan Umar Kayam, 1987, *Kebudayaan dan Pembangunan Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirjo, Sartono, *Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*, dalam Cendekia, No. 11, Agustus 1990.
- Jacob. T., 1988, *Manusia, Ilmu dan Teknologi – Pergumulan Abadi Dalam Perang dan Damai*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
- Linge, David. E. Editor. 1977. *Philosophical Hermenuetiscs*. Los Angeles: Univ. of California Press.
- Prisma, No. 11 November 1981, Tahun X, Peursen, C.V. Van., 1976, *Strategi Kebudayaan*, (terj: Dick Hartoko), Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Soedjatmiko, 1984, *Pembangunan dan Kebebasan*, Jakarta, LP3ES.
- , 1985, *Etika Pembebasan*, Jakarta, LP3ES.
- Tjandrasasmita, Uka, *Peranan Warisan Kebudayaan Bangsa Dalam Pembangunan Nasional*, Dalam *Majalah Kebudayaan*, No. 1, Th. X, 1991/1992, Depdikbud.
- Toynbee, Arnold J., 1988, *Menyelematkan Hari Depan Manusia*, (terj: Nin Bakdi Sumanto), Yogyakarta, Gajah Mada Unversity Press.

PLURALISTIKA AGAMA

KAJIAN TENTANG PELUANG KONFLIK DAN INTEGRASI

BANGSA

Abstrak

Dinamika kemajkan yang kritis yang berujung kepada konflik disebabkan oleh adanya stereotipe negative yang memandang pihak lain dari sudut pandang sendiri dan ketegangan yang muncul kemudian dianggap sebagai peluang untuk melakukan konflik terbuka setara dengan perang habis-habisan – saling memusnahkan. Isu kristenisasi dan konflik SARA yang terjadi di Indonesia pada dasawarsa terakhir, penyerangan FPI terhadap Ahmadiyah dan penyegehan gereja-gereja di Bandung, dan perbedaan mayoritas-minoritas pemeluk agama yang mengarah pada diskriminasi politik, budaya, pendidikan, dan, ekonomi, serta pemahaman agama yang fanatic tidak bisa dikesampingkan dalam kaitannya dengan konflik sosial tersebut.

Kata Kunci : Pluralitas Agama, konflik, integrasi

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (Pluralistik society)²³. Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambing Negara republic Indonesia “Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda namun satu). Kemajemukan Indonesia ditandai oleh berbagai perbedaan, baik horizontal maupun vertical. Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan

*Sri Ilham Nasution, adalah Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Bandar Lampung.

²³ Kemajemukan dimaksudkan terdapat di dalam Berbagai Hal : seperti suku, ras, Bahasa, adat istiadat, agama dan lain sebagainya.

agama. Sedangkan perbedaan yang bersifat vertical yakni menyangkut perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah dalam masyarakat kita saat ini sangat tajam, baik di bidang sosial, ekonomi, politik maupun budaya.

Di sinilah sebenarnya arti penting keberadaan dan peranan penting institusi pemerintah untuk membina masyarakat yang sering dihadapkan pada problematik kemajemukan. Dalam hal ini kemajuan agama misalnya, yakni bukan sebagai Negara sekuler dan juga bukan sebagai Negara agama. Hal ini tercermin dalam formasi pasal 29 UUD 1945 tentang agama dan juga dalam berbagai GBHN tentang agama. Hanya saja pasal ini belum dijabarkan secara luas sebagaimana halnya pasal-pasal UUD 1945 lainnya. Oleh karena itulah secara struktural dan secara historis fungsional, Negara memandang perlu mendirikan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Pendirian departemen ini merupakan implementasi dari dasar Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing.

Tugas pokok Departemen Agama digariskan sebagai penyelenggara sebagian dari tugas umum pemerintah dan membangun dalam sektor agama. Departemen agama melayani, membimbing dan membina kehidupan beragama warga Negara Indonesia. Tugas menjaga dan membina akidah umat adalah fungsi majlis dan pimpinan agama. Dalam kaitannya dengan ormas termasuk lembaga keagamaan, pemerintah mempunyai wewenang sebagai pembina lembaga dan organisasi masyarakat agar pranata-pranata yang ada di dalamnya berkembang sehat dan mandiri. Namun pemerintah dalam hal ini Departemen Agama menyadari memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menangani seluruh problematik umat-umat beragama secara sendiri. Departemen agama tidak mempunyai pretense bahwa seluruh

persoalan dan problemaa umat dapat ditangani dan diatasi secara sepihak oleh pemerintah. Apalagi kita belum memiliki suatu kaidah baku tentang hubungan antar umat beragama dan kaidah sosial menyangkut etika dan moral umum.

Peluang konflik dan integrasi

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah. Oleh karena itu harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agalam lebih melibatkan aspek emosi daripada rasio, lebih menegaskan “Klaim kebenaran” daripada “mencari kebenaran”. Kebijakan untuk mengatasi hal ini antara lain, di samping mengeluarkan berbagai pedoman berkaitan dengan masalah keagamaan, juga memberi fasilitas bagi jalangan umat beragama untuk berdialog dan bekerja sama.

Saifuddin mengatakan: Keanekaragaman agama seperti juga halnya keanekaragaman suku bangsa akan berimplikasi kepada perbedaan-perbedaan dan batas-baas golongan sosial yang tak jarang bisa menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial, apabila ada batas-batas golongan sosial tersebut²⁴. Selanjutnya dengan mengutip pendapat Frederik Bart dalam bukunya *Ethnic-groups and Boundaries*, saifudin mengemeukakan : agar tercipta integrasi sosial, haruslah tercipta sejumlah pranata yang mengikat semua golongan sosial sehingga setiap warga dapat mengidentifi-kasin dirinya pada suatu cirri yang juga dimiliki oleh warga golongan sosial yang lain, seperti nilai-nilai nasionalisme Indonesia yang mampu merangkum harapan jutaan rakyat Indonesia dengan berbagai

²⁴ Achmad Saifuddin Fedyani, *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hal . 126

macam latar belakang etnis, agama, adat-istiadat dan budaya untuk terlepas dari belenggu penjajahan asing dan mengikat persatuan²⁵. Fakta menunjukkan kepluralitasan masyarakat Indonesia (suku bangsa, agama dan golongan sosial lainnya) sudah merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri.

Kepluralitasan itu sudah merupakan hukum alam (natural law) menurut para pengamat positivism dan hukum Tuhan (sunnatullah) dalam paradigma para agamawan. Paradigma apapun yang diketengahkan, yang pasti dibalik diferensiasimasyarakat Indonesia itu mengendap keragaman kebudayaan, karena sistem nilai budaya yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok akan terwujud dalam bentuk-bentuk perilaku yang terpola (pattern social behaviour).

Agama, sebagai salah satu elemen dari kemajemukan bangsa ini, menurut Durkheim, merupakan suatu fakta sosial (social fact), karena agama mempunyai seperangkat sistem nilai budaya keagamaan yang berfungsi sebagai acuan norma sosial dalam pola perilaku penganutnya²⁶. Istilah, “representasi kolektif” sering digunakan oleh Durkheim untuk menunjukkan gejala ini.

Perasaan kolektif yang dibentuk sistem nilai budaya keragaman telah memunculkan identitas kolektif pemeluk suatu agama dalam realitas sosial. Walau bagaimanapun dari lima agama formal (yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia) telah ikut mewarnai pola perilaku masyarakat Indonesia yang terdiferensiasi oleh berbagai sistem nilai budaya keagamaan yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Problematika sosial

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lihat, Durkheim dalam Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Terj. (Jakarta Gramedia : 1986), h. 76

muncul ke permukaan manaka masing-masing kelompok keagamaan tersebut melakukan klaim kebenaran (truth kebenaran) terhadap sistem nilai budaya keagamaan mereka masing-masing sebagai referensi sosial untuk memahami dan menghadapi lingkungan sosialnya.

Auguste Comte sebagai lokomotif sosiologi dalam pembelaannya terhadap kemestian kehidupan kolektif bagi manusia mengemukakan; naluri untuk hidup bersama itu sudah dimiliki oleh manusia. Inilah yang diistilahkan dengan “Gregarious Instinct”. Lebih tajam lagi Selo Soemardjan mengatakan; interaksi sosial yang merupakan prasyarat esensial bagi kehidupan kolektif merupakan alat untuk mengisi, menghadapi serta mengembangkan potensi spiritual dan intelektual manusia.²⁷ Karena dengan kehidupan bersama manusia dapat saling belajar, saling meniru, saling mengisi dan saling mengembangkan pengertian dan kemampuannya di bidang spiritual dan intelektual.²⁸

Tuhuleley (1993) dalam sebuah pengantar penyunting terhadap sebuah buku yang berjudul : Permasalahan abad XXI : Sebuah Agenda dengan mengutip pendapat Ibnu Khaldun dalam sebuah karyanya yang sangat terkenal Muqaddimah, mengemukakan: kehidupan bersama manusia yang terefleksi lewat organisasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup (survive of live) merupakan indikasi terhadap keterbatasan kehidupan individual.

Dalam proses interaksi sosial, antara orang-perorangan, perorangan dengan kelompok, kelompok dengan kelompok mempertegas garis batas di antara kelompok sosial yang menguatkan identitas kelompok yang

²⁷ Selo Soemardjan, *stereotip Etnik, Asimilasi, Intergrasi Sosial*, (Jakarta : Pustaka Grafika 1988), h. 7.

²⁸ *Ibid.*

berimplikasi kepada perjuangan kepentingan kdi antara kelompok sosial yang menguatkan identitas kelompok yang berimplikasi kepada perjuangan kepentingan kelompok dengan cara menepis kepentingan kelompok lain seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Karena dalam pola interaksi sosial seperti itu sebagaimana dikatakan ian Craib, bahwa factor kepentingan termasuk di dalamnya kepentingan klompok mengatasi konsesnus yang diatur oleh norma sosial. Po;a interaksi semacam ini dalam terminology Sosiologi – antropologi diistilahkan dengan “interaksi sosial dissosiatif” (konflik).

Pada sisi lain proses interaksi sosial yang terjadi dengan cara memperlonggar batas-batas kelompok sosial, mengutamakan persamaan dan saling ketergantungan di antara kelompok dalam struktur yang lebih makro, mematuhi konsesus sosial yang merupakan refleksi dari norma-norma soail akan menciptakan terjadinyaintegrasi sosial. Karena dalam pola interaksi soail semacam ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Mainnheim, Berry dan Burkheim, bahwa factor konsesus yang didasarkan pada norma-norma sosial mengatasi factor-faktor kepentingan termasuk juga kepentingan kelompok.

Lebih tegas lagi Durkheim mengatakan : norma-norma sosial itu adalah sesuatu yang berada di luar individu. Membatasi mereka dan mengadili tingkah laku mereka. Oleh karena itu pula Durkheim mengatakan fakta sosial itu tidaka bisa direduksi ke individu, karena fakta sosial itu tercipta bukan karena kepentingan individu tetapi atas dasar kepentingan sosial. Pola interaksi sosial semacam ini disebut denga pola interaksi sosial assosiatif (integrasi).

Dalam proses sosial, konflik dan integrasi sudah merupakan hukum alam (natural law), tidak salah kiranya jika Dahrendorf, seorang tokoh yang menelaah aliran Fungsional Struktural menyangsikan bahwa kita tidak akan dapat memahami semua masalah realitas sosial, karena isis yang dilihat berulah sebagian dari realitas sosial itu. Masyarakat menurut Dahrendorf bermuka dua: integrasi dan nilai-nilai versus penggunaan kekerasan dan kepentingan-kepentingan.²⁹

Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai “

*... a struggle over values or claims to status, power and scarce resources, in which the aims of the conflicting parties are not only to gain the desired values but also to neutralize, injure, or eliminate their rivals. Such conflicts may take place between individuals and collectivities. Intergroup as well as intergroup conflicts are perennial features of social life...*³⁰

Dari statemen di atas dapat dipahami bahwa konflik sosial itu adalah sebuah perjuangan terhadap nilai-nilai atau tuntutan terhadap status, kekuasaan dan kelangkaan sumber daya, dimana tujuan dari konflik tidak hanya untuk memperoleh nilai-nilai yang diinginkan tetapi juga untuk menetralkan, melukai atau menenyapkan lawan-lawan lainnya. Konflik bisa terjadi antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok. Konflik inter dan intra group sudah inheren dalam kehidupan sosial. Sedangkan integrasi sosial dimaksudkan sebagai penyatuan kelompok-kelompok yang tadinya terpisah satu sama lain dengan

²⁹Ralf Dahrendorf, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritis*, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 191.

³⁰Coser, *International Encyclopedia of the Social Sciences*, 1971, h. 232.

melenyapkan perbedaan-perbedaan sosial dan kebudayaan yang ada sebelumnya. Integrasi sosial juga diartikan sebagai diterimanya seseorang individu oleh anggota-anggota lain dari suatu kelompok.³¹

Parsudi Suparlan mengatakan bahwa konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai sesuatu tujuan utama untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai³². Berbeda dengan persaingan atau kompetisi yang memiliki tujuan pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik, tujuannya adalah penghancuran pihak lawan, karena itu, tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai acapkali menjadi tidak penting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan.

Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individual, dua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Suatu perang se bagai sebuah simpton, umumnya terjadi karena ketiadaan, tidak cukupnya atau telah hancurnya prosedur-prosedur yang dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dapat memecahkan atau menghentikan perang atau konflik tersebut. Menurut para sosiolog dalam konflik kepentingan-kepentingan yang dipunya orang – perorangan atau kelompok berada di atas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dahrendorf mengemukakan bahwa kehidupan manusia dalam bermasyarakat didasari oleh konflik kekuatan, yang bukan semata-mata

³¹ Achmad Saifuddin Fedyani, *Op. Cit.*, h. 7.

³² Parsudi Suparlan, “Konflik dan Alternatif Pemecahannya” dalam *Antropologi Indonesia*, Th. XXIII, No. 58, (1999, h. 1)

dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh karl marx, melainkan karena sebagai aspek yang ada dalam masyarakat³³, yang dilihat sebagai organisasi sosial. Organisasi menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata. Karena itu, warga suatu masyarakat akan tergolong kedalam mereka yang kaya dan yang miskin, dalam kaitan dengan kekuatan sosial atau kekuasaan. Karena organisasi itu juga membatasi berbagai tindakan manusia, maka pembatasan-pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan secara organisasi oleh mereka yang mempunyai kekuasaan, akan berada dalam konflik dengan mereka yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu konflik telah merupakan suatu yang endemic atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Model gotong royong yang anti individualisme dengan aturan main yang datangnya dari atas pemerintahan orde baru, telah menghasilkan sebagai bentuk konflik terselubung. Konflik tersebut tidak berwujud sebagai konflik terbuka karena tidak seimbangny hubungan kekuatan sosial yang berkuasa (pemerintah) dengan yang dikuasai (rakyat). Masalah etnik dan agama terbukti baru muncul sebagai konflik terbuka setelah orde baru tumbang dan terus berlangsung hingga kini. Peristiwa ini ibarat gunung es ditengah lautan, kemunculannya seolah-olah tiba-tiba saja, padahal sudah mampu diprediksi dan terdeteksi jauh sebelum kemunculannya ke permukaan.

Alqadari menyebutkan beberapa factor penyebab timbulnya konflik, antara lain factor budaya, psikologis dan sikap mentalitas, dan perilaku dan

³³ Dahrendof, *Op. Cit.*, h. 306.

perbuatan, serta factor structural.³⁴ Sikap mentalitas dan perilaku yang dikerjakan oleh suatu kelompok atau masyarakat kelompok etnik atau agama tertentu umumnya pendatang yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau tradisi setempat cenderung menimbulkan keresahan, ketidakpuasan, kekecewaan. Factor structural mengambil bentuk dalam persaingan ekonomi dan politik yang tidak seimbang, akan meminggirkan (memarginalkan) kelompok lain melalui dominasi dan eksploitasi yang berlebihan atas kelompok yang lemah.

Penutup

Dalam kaitan ini patut direnungkan dan dicari solusinya mengapa masih terjadi fenomena bahwa umat islam yang sekaligus mewakili masyarakat pribumi di Indonesia yang mayoritas justru berada pada posisi marginal dan menjadi komoditas politik dan ekonomi dengan memanfaatkan symbol-simbol agama. Dari berbagai peristiwa konflik antar umat beragama, teridentifikasi bahwa dinamika kemajemukan yang kritis yang berujung kepada konflik disebabkan oleh adanya stereotipe negative yang memandang pihak lain dari sudut pandang sendiri dan ketegangan yang muncul kemudian dianggap sebagai peluang untuk melakukan konflik terbuka yang setara dengan perang habis-habisan setara saling memusnahkan.

Tekanan dan dominasi ekonomi dan politik secara structural dan mentalitas yang lemah “dibangun orde baru” ternyata telah menjadi pembelajaran praktis bahwa pada satu sisi integrasi dapat terwujud, namun

³⁴ Ibrahim Syarif Alqadarie, “konflik Etnis di Ambon dan Sambas : Suatu Tinjauan Sosiologis” dalam Antropologi Indonesia, Th. XXIII No. 58, 1999

pada sisi yang lain menghasilkan akumulasi tekanan seperti “gunung es” yang siap meletus menjadi chaos yang sangat berbahaya bagi tatanan berbangsa. Diantara indikatornya adalah adanya rasa tidak nyaman warga Negara di bawah naungan dan “jaringan bangsa sendiri”, yaitu dengan adanya pemerintahan yang tidak adil. Sehingga terjadi krisis multi dimensional yang berkepanjangan, dan terjadilah kekerasan sosial horizontal di mana-mana di republic ini.

KEPUSTAKAAN

Al Munawar, Said Agil Husin.(2004). *Fikh Hubungan Antar Umat Agama*.
ciputat Press. Jakarta.

Alqadarrie, Ibrahim, Syarif (1999) : *Konflik Etnis di Ambon dan Sambas : Suatu tinjauan Sosiologis* (dalam antropologi Indonesia, Th. XXIII No. 58)

Berry, David (1983) *Teori-Teori Sosial Modern dari Persons sampai Hebermas*, Jakarta : Rajawali

Coser, (1971), *International Encyclopedia of the Social Scienses*.

Dahrendorf, Ralf (1986) : *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri sebuah Analisa Kritik*, Jakarta : Rajawali

Ismail, Faisal. (2003). *Paradigma Kebudayaan Islam*. Titian Ilahi Press. Yogyakarta.

Johnson, Paul, Doyle (1986). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terjemahan)*, Jakarta Gramedia.

Kahmad, Dadang (2000) : *sosiologi Agama*, Bandung : Rosda

Kuntowijoyo (2000) : *Dimensi Kultural Integrasi Bangsa* (dalam Republika 15 desember 2000)

Madjid, Nurkholish, dkk. (2000). *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern ; Respond an Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*. Mediacita. Jakarta.

Soemardjan, Selo (2001) *Konflik Antar Suku di Indonesia* (dalam Kompas, Kamis 23 maret 2001)

_____ (1988) : *Sterotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, Jakarta : Pustaka Grafika.

Suparlan, Parsudi (1999) : *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya* (dalam Antropologi Indonesia, Th. XXIII, No. 58)

Saifudin, Fedyani, Achmad (1986) : *Konflik Dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Jakarta : Rajawali

INTEGRASI SOSIAL ANTARSUKU

ABSTRAK

Konsep hubungan antarsuku bangsa tidak hanya mencakup integrasi sosial antara suku bangsa yang bersangkutan, lebih jauh juga akan berkaitan dengan masalah kontak kebudayaan antara suku bangsa, yang dalam kelangsungannya dapat bersifat positif dan negatif. Positif dapat mengarah pada bentuk kerjasama, asimilasi ataupun integrasi sosial di antara suku bangsa, sedangkan sisi negatif dapat muncul dalam bentuk pertentangan atau konflik ataupun persaingan, yang pada akhirnya mungkin saja membawa mereka pada konflik fisik.

Kata Kunci: Integrasi Sosial

A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (*plural society*), yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa, memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, serta mempunyai bahasa dan corak kebudayaan yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Di antara suku bangsa itu (baik secara perorangan maupun secara kelompok) ada yang melakukan perpindahan dan menetap di daerah lain yang berbeda lingkungan sosial budayanya dari daerah asalnya. Meskipun mereka telah menetap di tempat yang baru dalam waktu yang cukup lama bahkan sampai beberapa generasi, namun bukan berarti bahwa mereka secara otomatis telah menyatu dengan masyarakat setempat yang telah lebih dahulu menetap di daerah itu. Bahkan sebaliknya, hal itu dapat merupakan salah satu sumber konflik yang sewaktu-waktu meledak menjadi ketegangan dan kerusuhan yang mengganggu keamanan dan kestabilan hidup, seperti ketegangan dan

kerusuhan yang terjadi antara suku Madura (pendatang) dengan suku bangsa dayak (penduduk asli) di kabupaten Sampit propinsi Kalimantan Tengah³⁵

Dalam masyarakat yang mejemuk seperti Indonesia, pengetahuan tentang integrasi sosial antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya sangat penting karena dengan mengetahui dan memahami kondisi yang dapat menimbulkan dan mempengaruhi bentuk interaksi sosial tertentu diharapkan akan dapat menjadi sumbangan bagi usaha pembangunan masyarakat dan negara.³⁶

Kontak sosial ataupun kontak budaya antarsuku bangsa, dalam keragaman suku bangsa yang ada seperti di Indonesia ini adalah merupakan hal yang tidak terelakkan. Terutama di daerah-daerah tempat pertemuan berbagai suku bangsa, seperti daerah perkotaan. Ini biasa terjadi sebagai akibat semakin tingginya tingkat mobilitas suku bangsa itu sendiri dengan berbagai latar belakangnya serta didukung oleh semakin memadainya sarana dan prasarana transportasi yang tersedia.

Di lain pihak pemerintah sangat mendukung terjadinya mobilitas suku bangsa ini, dengan demikian diharapkan pembauran antar suku bangsa akan mudah tercapai guna terbentuknya suatu bangsa Indonesia, atau sebagaimana yang disebut oleh Koetjanraningrat sebagai pencapaian integrasi nasional. Lebih jauh Koentjaraningrat mengidentifikasi adanya tiga keadaan yang berlainan di kota-kota di Indonesia mengenai pluralitas penduduk; (1) kota-kota pusat pemerintah yang penduduk aslinya belum mempunyai banyak tenaga terdidik untuk mengisi jabatan pemerintah dan profesional yang dibutuhkan, (2) kota-kota pusat perdangan dan industri

³⁵ Suparlan, Parsudi, Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, (Jakarta 1993), h 134

³⁶ Soekato, Soejono, Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta 1983), h 38

dengan penduduk plural, dengan aneka ragam suku bangsa dan dengan suku-suku bangsa yang dominan, dan (3) kota-kota pusat pemerintah dengan penduduk plural dari aneka warna suku bangsa tapi tanpa adanya satupun kebudayaan suku bangsa yang dominan. Dengan demikian kota akan menjadi tempat pertemuan berbagai macam budaya, kepentingan, sikap, kesempatan, dan perilaku. Kesemuanya ini mengandung potensi untuk terjadinya interaksi maupun konflik antarsuku.

Namun demikian tempat terjadinya kontak antar suku bangsa bukanlah mutlak milik daerah perkotaan saja. Seperti yang diperlihatkan Bart bahwa kontak antarsuku bangsa juga dapat terjadi atas dasar perspektif ekologi, demografi, ataupun atas dasar saling membutuhkan (ketergantungan antarsuku bangsa tersebut. Hal ini dapat berlangsung di mana saja dan secara tradisional hal tersebut telah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang dibangun oleh suku bangsa yang berbeda tersebut.³⁷

Secara garis besarnya, fakta sosial terdiri atas dua tipe. Masing-masing adalah struktur sosial (*social structure*) dan pranata sosial (*social institution*). Secara lebih terperinci, Ritzer mengemukakan bahwa fakta sosial itu terdiri atas kelompok, kesatuan masyarakat tertentu (*societies*), sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintah, dan sebagainya³⁸.

³⁷ Koetjajaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Jakarta 1984), h 128

³⁸ Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta 1992), h 22

1. Integrasi Sosial

Integrasi sosial merupakan proses penyatupaduan berbagai kelompok dalam masyarakat melalui suatu identitas bersama dengan menghilangkan perbedaan dan identitas bersama dengan menghilangkan perbedaan dan identitas masing-masing. Integrasi sosial adalah *“the process where by individuals or group ince disimiliar become identified their and out look”*.³⁹ Jadi integrasi sosial merupakan proses yang individu atau kelompok berbeda mengadakan penyesuaian-penyesuaian untuk menjadi sama dalam kepentingan dan sikap atau pandangannya. Dalam hal ini proses interaksi bukanlah suatu proses yang berjalan dengan cepat karena integrasi sosial menyangkut suatu proses mental yang hanya bisa diproses secara lambat dan bertahap.

Integrasi sosial merupakan harapan dan keinginan dari kebanyakan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Kebanyakan sosiolog sepakat berpendapat bahwa integrasi sosial sangat perlu bagi suatu masyarakat demi keharmonisan, kesejahteraan, dan kestabilan masyarakat tersebut.

2. Proses Integrasi Sosial

Sebagai suatu proses dan kondisi sosial, integrasi sosial sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain. Oleh karena itu kekuatan yang mempengaruhi interaksi sosial pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap proses integrasi sosial. Pada dasarnya proses integrasi sosial akan melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut dapat berlangsung secara evolusioner dari tahap

³⁹ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta 1987), h

yang rendah, yaitu tahap terisolasinya (terpisahnya) kelompok minoritas dari kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan menuju tahap yang paling tinggi, yaitu tahap bercampurnya kelompok minoritas kedalam kehidupan sosial dan kebudayaan kelompok dominan. Namun kadang kala dapat pula terjadi loncatan dari tahap yang paling rendah ke tahap yang paling tinggi secara cepat. Proses integrasi sosial pada umumnya melalui beberapa tahap, yaitu tahap-tahap segregasi atau separatisme, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi.⁴⁰

Tahap pertama dalam proses integrasi sosial adalah tahap segregasi atau separatisme (pemisahan). *Segregation can be defined as the involuntary separation of residential areas, services or other facilities on the basis of the ethnic or racial characteristic of the people using them. The most extreme form of self segregation is separatism, when the minority group aspires to set up a totally independent society of its own.* Tahap segregasi (segregation) menggambarkan usaha-usaha untuk memisahkan kelompok minoritas, baik secara de jure maupun secara de facto. Secara de jure artinya bahwa pemisahan itu didukung oleh kekuatan hukum, seperti politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan beberapa puluh tahun yang lalu. Sedangkan secara de facto artinya bahwa pemisahan itu terjadi dalam kenyataan dan tak perlu didukung oleh kekuatan hukum.

Tahap kedua adalah tahap akomodasi (*accommodation*). *Accommodation occurs when two groups co-exist as separate cultures in the same society. "Accommodation occurs when the members of a minority group are aware of dominant norms and values without having internalized them".* Tahap akomodasi merupakan tahap yang para anggota dari

⁴⁰ Hess, Berth B, Sosiologi, (New York 1988), h 29

kelompok minoritas menyadari norma-norma dan nilai-nilai dari kebudayaan kelompok dominan, namun mereka tak perlu merubah norma-norma dan nilai-nilai kebudayaan mereka sendiri. Mereka menyesuaikan diri dengan kebudayaan kelompok dominan tanpa berpartisipasi secara penuh di dalamnya atau tidak menginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Apabila dua kelompok hidup bersama dalam satu masyarakat yang sama sementara kebudayaannya tetap terpisah, maka hal itu disebut akomodasi. Secara esensial mereka mempunyai kebudayaan yang sejajar (parallel) namun masing-masingnya tetap dengan institusi-institusinya sendiri. Meskipun akomodasi sedikit-tidaknya memberikan dorongan lahir terhadap norma persamaan (*the norm of equality*).

Pada tahap akomodasi, integrasi sosial yang dicapai akan memperlihatkan adanya suatu keseimbangan dalam integrasi antara orang perorangan kelompok-kelompok manusia sehubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Keseimbangan yang dicapai hanya bersifat sementara, yakni selama norma dan nilai yang mengatur dalam masyarakat tersebut dipatuhi.

Tahap ketiga adalah tahap akulturasi (*acculturation*). Popenoe mengemukakan bahwa: "*acculturation is the process in which a minority individual or group seeks to blend into a society by taking on its cultural characteristics*" Tahap akulturasi terjadi bila orang-orang dari kelompok minoritas telah mengadopsi norma-norma, nilai-nilai dan pola-pola perilaku dari masyarakat kelompok dominan. Namun pada tahap ini mereka masih belum diakui atau diterima dalam kelompok masyarakat dominan tersebut secara lebih intim (akrab).

Akulturası mencakup pembelajaran bahasa, sejarah, dan perilaku atau tata karma dari kelompok dominan. Ia juga melibatkan penerima kesetiaan dan nilai-nilai kelompok dominan sebagai miliknya sendiri. Namun penerimaan disini bukanlah penerimaan secara penuh (utuh). Bila penerimaannya dilakukan secara penuh (utuh), maka hal itu sudah berarti termasuk tahap asimilasi, dimana kelompok minoritas terintegrasi secara utuh kedalam institusi-institusi masyarakat dominan dan kelompok bawahan (subordinate group).

Tahap keempat adalah tahap asimilasi (*asimilasion*). Popenoe menjelaskan bahwa “*Assimilation is the absorption into the dominant society of the culture and social structure of an incoming group. Another term for assimilation is the melting pot*”. Asimilasi merupakan suatu proses yang kelompok-kelompok dengan identitas berbeda, yakni antara kelompok minoritas dan kelompok dominan menyatu (terpadu) secara sosial dan kultural. Tahap ini terjadi apabila kelompok minoritas telah membaaur (menyatu) kedalam masyarakat dominan secara penuh (utuh) melalui persahabatan (*friendship*) atau pergaulan-pergaulan karib lainnya. Pada tahap kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaanya akan bergaul secara integrative untuk jangka waktu yang cukup lama maka kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri.⁴¹

Tahap akhir dari proses integrasi sosial adalah tahap amalgamasi (*amalgamation*) Popenoe mengemukakan bahwa: “*While assimilation means a social and culture merging. Amalgamation refers to biological merging of an alienic a racial group with the native population*”.

⁴¹ Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, (Jakarta 1984), h 58

Amalgamasi akan terjadi apabila berbagai kebudayaan atau ras (dua atau lebih) bercampur (secara biologis) sehingga membentuk tipe-tipe kebudayaan dan ras yang baru. Cara yang paling utama dalam tahap amalgamasi adalah melalui perkawinan campuran.

3. Faktor Penghalang Integrasi Sosial

Ada tiga penghalang utama yang dapat menghambat terwujudnya integrasi sosial, yaitu prasangka negative (*negative prejudice*), diskriminasi, dan rasisme terlembaga (*institutionalized racism*).⁴²

a. Prasangka negative (*negative prejudice*).

“Prejudice... means an attitude (usually negative) toward the members of some specific group (racial, ethnic, religion, etc) which causes the person holding it to evaluate others negatively, solely on the basis of their identification with that group”. Prejudis adalah sikap prasangka yang biasanya negatif dari seseorang atau para anggota kelompok terhadap sekelompok orang tertentu, baik kelompok etnik, agama, ataupun ras dan kelompok organisasi lainnya, yang menyebabkan seseorang yang berprasangka tersebut menilai orang-orang dari kelompok lain secara negative semata-mata berdasarkan identitas mereka terhadap kelompok tersebut. Misalnya apabila seseorang tidak menyukai orang dari suatu kelompok suku bangsa, lalu ia memberikan penilaian bahwa mereka merupakan orang yang kotor, atau tidak bertanggungjawab, cenderung jahat, tidak bermoral, pemalas, susah bergaul, dan sebagainya.

Prejudice biasanya selalu dihubungkan dengan stereotype, yaitu suatu kesan dan kepercayaan tertentu yang dimiliki seseorang atau

⁴² Hess, Berth Sociology (New York 1988) h.253

sekelompok orang dimana seperangkat cirri atau karakteristik baik yang positif atau negative dihubungkan terhadap sekelompok orang lain dari suatu kelompok sosial tertentu secara keseluruhan, baik kelompok ras, etnik, atau bangsa. Prejudice adalah stereotype, yakni suatu kepercayaan bahwa orang-orang yang mempunyai kategori yang sama mempunyai karakteristik yang sama dan stereotype tidaklah selalu buruk.

Prejudice erat kaitannya dengan etnosentrisme (ethnosentrisme), yaitu kepercayaan dari seseorang atau sekelompok orang bahwa cara-cara perilaku (budaya dan struktur sosial) mereka adalah yang paling benar dan baik, sedangkan cara-cara perilaku orang atau kelompok lain bukan hanya tidak benar dan baik tapi juga mengancam.

b. Diskriminasi.

Tentang diskriminasi, Brinkerhoff dan Federico menjelaskan *“Treating people unequally because of the categories they belong to is discrimination”*.⁴³ *“Discrimination is the unequal treatment of individuals based on their assumed membership in a particular group”*.⁴⁴ Diskriminasi merupakan tindakan (perilaku) dari seseorang yang memperlakukan orang lain secara tidak seimbang disebabkan kategori keanggotaan yang mereka miliki. Diskriminasi mempunyai kaitan yang erat dengan prejudice dan stereotype, yakni bahwa stereotype yang tidak baik akan menimbulkan prejudice yang pada gilirannya sering menyebabkan timbulnya diskriminasi. Sebaliknya diskriminasi akan kembali menimbulkan atau memperkuat

⁴³ Brinkerhoff, David B. & Lynn White, *Essential of Sociology*, (New York 1989), h 182

⁴⁴ Federico, Ronald C *Sociology*, (Canada 1979) h. 155

stereotype yang kemudian akan menimbulkan prejudice lagi seperti dalam suatu lingkaran setan.

Sebagaimana halnya prejudice, diskriminasi juga sering didasarkan atas hal-hal yang tidak logis irasional. Diskriminasi dan prejudice merupakan dua dimensi yang berbeda. Diskriminasi merupakan suatu perilaku (behavior) atau tindakan (action), sedang prejudice merupakan suatu sikap (attitude), yang keduanya oleh psikolog sosial mengacu kepada hal-hal yang negative⁴⁵.

Diskriminasi tidak selalu bebarengan dengan prejudice (Zanden, 1988:259). Seseorang bisa saja memiliki prejudice tanpa harus mendiskriminasikan atau terpisah dari seseorang. Artinya mereka bias saja hidup bersama-sama dalam suatu kelompok masyarakat. Sebaliknya orang-orang yang tanpa prejudice terhadap suatu kelompok bias saja memperlakukan suatu kelompok secara diskriminatif.

c. Rasisme atau diskriminasi terlembaga (Instituionalized racism).

Rasisme atau diskriminasi terlembaga adalah diskriminasi yang mempengaruhi seluruh struktur norma dan perilaku yang diperkuat (didukung) oleh agen-agen control sosial, baik formal maupun informal. Dalam hal ini orang-orang dari suatu kelompok ras atau suku bangsa ditekan (ditindas) atau dieksploitasi oleh institusi-institusi dalam suatu masyarakat yang control oleh kelompok ras atau suku bangsa lain.

Diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh para individu atau orang perorangan, institusi-institusi masyarakatpun bias melakukan

⁴⁵ Brinkerhoff, David B, *Essentials of Sociology*, (New York 1989), h. 182

diskriminasi secara sistematis terhadap para anggota dari suatu kelompok, baik institusi sosial maupun institusi politik atau ekonomi. Institusi-institusi sekolah, bisnis, rumah sakit, pemerintah dan institusi lainnya kadang-kadang tidak mau mengangkat karyawan/pegawai atau siswa-siswa dari orang yang tidak mereka sukai sehingga terjadi diskriminasi. Hal ini tentu saja akan menghambat terwujudnya integrasi sosial.

Di samping itu Soejono Soekanto secara ringkas mengemukakan pula beberapa factor yang dapat menjadi penghalang terwujudnya integrasi sosial dalam suatu masyarakat, yaitu: 1). Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat (biasanya golongan minoritas) kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi, 3) perasaan takut terhadap suatu kebudayaan yang dihadapi, 4) perasaan bahwa kebudayaan suatu golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya, 5) perbedaan warna kulit atau ciri-ciri badaniah tertentu, 6) perasaan “in group” yang kuat, yaitu perasaan yang kuat sekali bahwa individu yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan kelompok yang bersangkutan, 7) gangguan-gangguan golongan yang berkuasa terhadap golongan minoritas dan 8) perbedaan kepentingan yang kemudian diikuti oleh kepentingan-kepentingan pribadi.

4. Faktor Pendorong Integrasi Sosial

Ada beberapa faktor atau kekuatan yang dapat mendorong terwujudnya integrasi sosial antara lain:

1. Perbedaan dan saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok (*differentiation and interdependence among the pars*) atau pertukaran fungsional antara kelompok yang berbeda (*functional reciprocity*). Artinya apabila perbedaan-perbedaan diantara kelompok-kelompok meningkat maka rentang aktivitas atau ruang gerak yang dilakukan oleh masing-masing kelompok akan menyempit, sehingga masing-masing kelompok akan menjadi lebih saling tergantung. Saling ketergantungan yang terdapat pada suatu organisasi atau masyarakat yang sangat terferensiasi (berbeda) merupakan factor penting dalam menjaga solidaritas (yang menurut Durkheim disebut dengan solidaritas organik) dan integrasi. Keadaan saling ketergantungan akan memaksa kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda untuk bekerja sama satu sama lain.
2. Persetujuan atau konsesus (*consensus*). Artinya apabila para individu atau kelompok memiliki norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang sama maka mereka akan terpatrit (terikat) bersama-sama melalui suatu jaringan kebudayaan bersama. Bahkan keutuhan mereka berasal dari kesamaan ini. Aktivitas kehidupan mereka dipandu oleh perasaan saling mengharapkan, sehingga secara cultural mereka ibarat “tiruan carbon-copy” satu sama lain.
3. Integrasi normatif (*normative integration*). Artinya dalam suatu masyarakat terdapat keselarasan antarnorma-norma dan perilaku masyarakat, dan adanya tingkat kepatuhan yang tinggi dari anggota masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.
4. Konflik. Meskipun secara umum konflik sering diartikan sebagai sesuatu yang negatif dan bersifat memecah belah namun ia juga

memiliki fungsi-fungsi positif yang dapat meningkatkan solidaritas dalam kelompok. Konflik di antara kelompok-kelompok yang ada bisa jadi merupakan satu-satunya cara bagi sebagian kelompok agar mereka bias berkomunikasi satu sama lain mengenai masalah-masalah yang selama ini perlu diatasi.

5. Penggunaan otoritas (*the use of authority*). Artinya, orang-orang yang mempunyai otoritas atau pengaruh yang kuat pada pusat-pusat lembaga sosial seperti pemimpin-pemimpin politik, penguasa, pemimpin informal dan sebagai, bias pula menggunakan otoritasnya untuk mencegah terjadinya konflik dan perpecahan atau segmentasi dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, mereka dapat menginteraksikan kelompok masyarakat yang tersegmentasi melalui pengaruh atau otoritas yang mereka miliki.
6. Mobilitas sosial (*social mobility*) Artinya, orang-orang yang mempunyai mobilitas yang tinggi dalam suatu masyarakat, yaitu orang-orang yang mempunyai keinginan dan kemampuan dalam memahami berbagai kebudayaan khusus (*subcultures*) dalam masyarakat, bisa berfungsi sebagai mediator dalam mengatasi berbagai perselisihan antara kelompok-kelompok yang berselisih berdasarkan kemampuan dan pemahaman terhadap kebudayaan-kebudayaan khusus masing-masing kelompok yang dimilikinya.
7. Kekerasan dan pemaksaan. Artinya, pemisahan atau segmentasi dalam masyarakat bisa pula dihindari melalui penggunaan kekerasan dan pemaksaan, yakni memberlakukan aturan-aturan dan kontrol atas kelompok-kelompok melalui ancaman atau penggunaan kekuatan. Bakat atau kesanggupan untuk membunuh, misalnya, bias

merupakan instrument penting dalam kontrol sosial, yang dengan sendirinya dapat berguna dalam mengintegrasikan orang-orang atau kelompok secara paksa.

Sementara itu Soerjono Soekanto mengemukakan pula beberapa factor yang dapat mempermudah terjadinya integrasi sosial diantara kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaannya dalam suatu masyarakat, yakni; 1) adanya sikap saling toleransi diantara kelompok-kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat, 2) adanya kesempatan-kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, 3) adanya sikap saling menghargai terhadap kebudayaan yang didukung oleh masyarakat lain dengan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing, 4) adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, yang antara lain diwujudkan dalam pemberian kesempatan yang sama bagi golongan minoritas dalam berbagai bidang kehidupan sosial, 5) pengetahuan akan persamaan unsure-unsur dalam kebudayaan masing-masing kelompok melalui berbagai penelitian kebudayaan khusus (subcultures), 6) melalui perkawinan campuran antara berbagai kelompok yang berbeda kebudayaan dan 7) adanya ancaman musuh bersama dari luar kelompok-kelompok masyarakat tersebut yang menyebabkan kelompok-kelompok yang ada mencari suatu kompromi agar dapat bersama-sama menghadapi musuh dari luar yang membahayakan masyarakat yang bersangkutan.

Pada dasarnya manusia membutuhkan kehidupan bersama dengan manusia lainnya (*zoon politicon*). Dalam menjalani kehidupan bersama, manusia akan terlibat dalam suatu hubungan timbale balik yang di sebut integrasi sosial yang pada gilirannya berkembang kepada inter-relasi sosial.

Integrasi sosial merupakan bentuk yang paling utama dalam suatu proses sosial. Ia juga merupakan syarat mutlak bagi terjadinya aktivitas sosial. Dalam interaksi sosial akan terjadi hubungan-hubungan sosial timbal balik (*social inter-relationship*) yang dinamis antar perorangan, antar kelompok dan antar perorangan dengan kelompok orang. Interaksi sosial dalam kenyataannya mungkin berwujud dalam bentuk kerjasama kepada konsensus dan integrasi, atau mungkin juga dalam bentuk persaingan yang bermuara kepada konflik dan disintegrasi.

Mengacu kepada segolongan orang (komunitas) dengan latar belakang asal usul dan budaya yang sama sehingga mereka mempunyai rasa identitas sosial yang sama pula. Sehingga suku bangsa dengan demikian dapat diidentifikasi sebagai golongan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa golongan sosial sebagai satu komunitas yang terwujud karena adanya kesatuan ciri-ciri obyektif yang melekat padanya sehingga akan menimbulkan rasa identitas sosial dan adanya satu system norma yang mengatur komunitas tersebut⁴⁶

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep hubungan antarsuku bangsa tidak hanya mencakup interaksi sosial antara suku bangsa yang bersangkutan, lebih jauh juga akan berkaitan dengan masalah kontak kebudayaan antarsuku bangsa, yang dalam kelangsungannya dapat bersifat positif maupun negative. Positif dapat mengarah kepada bentuk kerja sama, asimilasi ataupun integrasi sosial di antara suku bangsa, sedangkan sisi negative dapat muncul dalam bentuk pertentangan (konflik) ataupun persaingan, yang pada akhirnya mungkin saja membawa mereka pada

⁴⁶ Koentjaraningrat, Beberapa pokok Antropologi Sosial. (Jakarta 1985) h.149

bentrokan fisik. Hal ini tidak dapat dielakan kerana masyarakat itu pada dasarnya bersifat kompetitif dan kooperatif.⁴⁷

⁴⁷ Soekanto, Soejono, Sosiologi tentang perubahan social (Jakarta 1983), h.59

DAFTAR PUSTAKA

- Barth, Frederik (ed). 1988. Kelompok Etnik dan Batasannya. Jakarta: UI pres.
- Bruner, Edward M, 1984. Kerabat dan Bukan Kerabat, Dalam T.O.Ihromi. Pokok-
- Brinkerhoff, David B. & Lynn White. 1989. Essential of Sosiologi. New York:West Publishing Company.
- Pokok Antropologi Budaya. Jakarta: Sinar Harapan.
- Johnson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 1. (Alih Bahasa: Robert M.Z. Lawang). Jakarta: PT Gramedia.
- 1990. Teori Sosiolog Klasik dan Modern jilid II. (Alh Bahasa: Robert M.Z. Lawang). Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- _____. (1987). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

Suparlan, Parsudi (1993). Manusia Kebudayaan, dan Lingkungannya.
Jakarta:PT. Raja Grafindp Persada.

Koentjaraningrat. 1984. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta:
Djambatan.

-----, 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: PT. Dian
Rakyat.

-----, 1990. Lima Masalah Integrasi Nasional.

1990. Masalah-Masalah Pembangunan Nasional Bunga Rampai Antropologi
Terapan. Jakarta: LP3ES.

FENOMENA ZAKAT:
Sebuah Mata Rantai Sosial Ekonomi
(untuk Kemaslahatan) Umat yang Terputus

Abstrak

”Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang demi berjuang di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
(QS: At-Taubah:60).

Kata Kunci: Zakat

Pengantar

Dalam konsep Islam, menjadi kaya secara material bukanlah suatu tuntutan atau tujuan namun diperlukan bagi upaya meningkatkan kualitas iman melalui rangkaian peribadatan kepada Allah Swt. Dengan kekayaan yang dilimpahkan oleh Allah Swt melalui berbagai usaha yang dimiliki, setiap umat diharapkan dapat menjadikannya sebagai alat untuk kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat, agama dan bangsanya dalam bingkai-bingkai ibadah kepada Allah Swt. Peribadatan itu merupakan perwujudan atas rasa syukur, patuh dan taat kepada Allah swt.

Pintu kekayaan bagi umat pada dasarnya telah dibuka lebar oleh Allah Swt. Pertama, tidak satupun kita jumpai manusia ciptaan Allah Swt dilahirkan tanpa kecerdasan akal dan nurani (qolbu) yang menjadi modal utama sekaligus ciri pembeda dengan makhluk lainnya. Kedua, kemunculan manusia di muka bumi diiringi dengan modal pendamping berupa kekayaan alam. Kebermaknaan umat dengan demikian baru akan terlihat manakala dengan kecerdasan dan nuraninya setiap umat itu mampu mengolah, memberdayakan, dan memanfaatkan potensi diri dan potensi alam semesta untuk kemaslahatan umat dalam rangkaian ibadah sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta.

Sebagaimana konsep keseimbangan dalam hidup yang bersifat dualism mutualisme, keberadaan golongan mampu atau kaya akan berpasangan dengan golongan kurang mampu atau miskin. Tuntutan sekaligus tuntunan tentang tanggung jawab umat atau masyarakat yang mampu atau kaya terhadap golongan yang tidak mampu atau miskin dalam Islam dengan tegas tertuang dalam rukun Islam yang keempat, yakni kewajiban membayar zakat. Ini berarti permasalahan kemiskinan, kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat, terutama golongan kurang mampu, telah "diagendakan" oleh Allah swt. untuk menjadi perhatian bagi umat atau masyarakat yang beruntung termasuk dalam golongan mampu.

Kondisi Sosial Ekonomi dan Zakat

Indonesia pascakrisis adalah Indonesia yang terluka parah, pengangguran meningkat, kemiskinan dan dampaknya merajalela dimana-mana., termasuk banyak anak-anak yang terancam putus sekolah. Jika

dirunut lebih jauh, sebagian besar dari mereka adalah umat islam. Dengan logika umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini, maka jumlah orang-orang yang tidak beruntung adalah umat Islam itu sendiri.

Penyakit sosial ini sampai sekarang melanda dunia Islam, termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan hanya sebagai penyakit sosial (patologi sosial), tetapi juga bisa menggerogoti keimanan seseorang, bahkan dalam salah satu hadis, Rasulullah mengatakan "kemiskinan dapat mendekatkan orang pada kekufuran". Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bersama untuk memikirkan persoalan ini. Salah satunya adalah melalui pilar ajaran Islam yang keempat, yaitu membayar zakat.

Allah swt sangat menganjurkan umatnya untuk mengeluarkan zakat untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Di dalam Alquran ditegaskan bahwa "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat serta menunaikan zakat; demikian itulah agama yang lurus (QS: Al Bayyinah/98:5). Persepsi kita terhadap agama yang lurus adalah yang selalu mengajarkan orang untuk berbuat baik dan menegakan kebenaran. Mengeluarkan zakat sebagai upaya menolong sesama kaum muslimin adalah perbuatan terpuji yang akan mengantarkan pelakunya menjadi penganut agama yang lurus (hanif).

Perintah berzakat bagi umat muslim selain bermakna sebagai media ibadah dan instrumen kepedulian bagi umat yang baik hati dan ikhlas atas hartanya untuk mengatasi kehidupan orang-orang miskin, juga dapat dimaknai sebagai bentuk lain dari pertolongan Allah swt kepada umatnya. Zakat memiliki prospek ekonomi dan sosial yang sangat kuat karena dapat menggerakkan sendi-sendi perekonomian dan sosial masyarakat.

Perintah membayar zakat memang jelas namun karena mekanismenya secara umum di masyarakat belum dilakukan secara profesional cenderung menjadikan pemberdayaan zakat hingga saat ini belum optimal dan belum dilirik sebagai sumber ekonomi umat Islam yang amat potensial untuk dimanfaatkan.

Menjadikan Masjid sebagai Basis Perekonomian

Indonesia hingga saat ini masih sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim. Dengan kondisi tersebut berarti keberadaan sarana ibadah umat muslim baik berupa surau atau musholla dan masjid secara kuantitas signifikan dengan keberadaan umatnya. Dengan gambaran umum bahwa dalam satu kampung atau kelurahan di Indonesia terdapat rata-rata seribu penduduk wajib zakat yang terkumpul di masjid atau musholla, berarti jumlah dana yang terkumpul dari umat muslim cukup potensial.

Asumsi ini berangkat dari fenomena pengelolaan zakat di Indonesia secara umum masih ditangani secara mandiri oleh masing-masing pengurus masjid atau musholla, tidak dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah pusat maupun PEMDA, semisal BAZIS atau BAZ. Permasalahan bahwa hingga saat ini pengelolaan oleh masyarakat cenderung dana yang terkumpul langsung dibagi habis kepada orang-orang yang berhak, adalah hal lain yang harus diatasi dengan pembinaan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepercayaan.

Tentang adanya pengelolaan oleh masjid/musholla secara mandiri dan oleh lembaga bentukan pemerintah maupun LSM Islam tampaknya perlu kajian tersendiri, terutama menyangkut masih minimnya kepercayaan masyarakat jika dana zakat dikelola oleh orang lain atau lembaga lain. Atas

kondisi ini tampaknya pemerintah harus "legowo" dengan tidak memaksakan lembaganya tetapi lebih fokus kepada pembinaan terhadap masjid atau musholla agar dapat mengelola dana zakat yang terkumpul dan memberdayakannya untuk masyarakat lingkungannya.

Bagaimanapun, masyarakat lebih memahami kondisi dan kebutuhan lingkungannya. Berikut ini merupakan gambaran umum masalah sosial ekonomi yang sangat pokok pada masyarakat kita dan memungkinkan diatasi melalui pember-dayaan masjid dalam mengelola zakat bagi masyarakat sekitarnya.

1. Bank keliling atau rentenir
2. Gizi buruk
3. Pengangguran meningkat
4. Anak putus sekolah

Kondisi sosial masyarakat kurang mampu atau masyarakat lapisan bawah yang berada di pedesaan pada masyarakat kita cenderung memiliki kepercayaan yang rendah terhadap program-program pemerintah. Dalam hal perkreditan, misalnya, masih banyak masyarakat muslim yang percaya dan terjerat oleh bank keliling atau rentenir dibandingkan terhadap bank yang sesungguhnya. Persoalan akan semakin rumit bahwa ternyata tidak jarang masyarakat yang terlibat sebagai penyelenggara bank kelling atau rentenir ternyata juga masyarakat Islam.

Dalam kaitan ini, pemberdayaan masjid dalam mengelola dana zakat, infak dan shodaqoh sangat potensial untuk diarahkan pada pembentukan koperasi dan permodalan yang dikelola secara islami (mengikuti konsep bank syari'ah) sehingga akan membendung sistem

perkreditan yang merugikan masyarakat muslim itu sendiri. Tentang hal ini mungkin akan berkembang polemik mengenai boleh-tidaknya dana tersebut untuk simpan pinjam.

Berkaitan dengan rendahnya mutu kesehatan masyarakat dan gizi buruk, entah sudah yang ke berapa kali kasus gizi buruk merebak di Indonesia. Berkat kemajuan teknologi informasi berita kasus gizi buruk dapat diketahui dan diberitakan pada media seolah tak ingin kalah oleh berita selebriti yang penuh gemerlap. Dengan asumsi bahwa masyarakat muslim di Indonesia merupakan warga mayoritas, maka besar kemungkinan mereka yang mengalami gizi buruk sebagai dampak kemiskinan adalah juga warga muslim.

Keberadaan masjid yang mampu mengelola dana zakat, infak, dan shodaqoh masyarakat sekitar untuk mengatasi kasus gizi buruk, kita mesti mencontoh program "Kalengisasi Daging Kurban" yang dilakukan oleh salah satu LSM Islam di negara ini, yang produknya (berupa kornet dan abon) kemudian dikirim ke daerah-daerah kantong muslim yang kurang mampu. Program lainnya adalah program penggemukan hewan ternak oleh masyarakat.

Pengangguran merupakan problem yang dihadapi oleh hampir semua negara, terutama negara yang dilanda krisis ekonomi. Dengan pemberdayaan dana zakat, infak, dan shodaqoh yang dilakukan oleh masjid pada masing-masing lingkungan masyarakat, jika dikelola dengan profesional dan manajemen yang baik niscaya akan membantu meminimalkan persoalan ini.

Program kewirausahaan secara swadaya oleh masyarakat sekitar masjid seperti pembentukan koperasi, permodalan usaha kecil, budidaya dan penggemukan hewan, dan sejenisnya tentu akan membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian yang akan muncul adalah, suatu desa bisa jadi memiliki ciri atau kekhasan sebagai sentra atas suatu produk-produk tertentu yang dananya merupakan dana zakat, infak, dan shodakoh yang terkumpul dari masyarakat itu sendiri. Program bantuan biaya pendidikan juga dapat selenggarakan menggunakan dana zakat, infak, dan shodaqoh yang dikelola oleh masjid. Hal ini tampaknya sudah sering dilakukan dan dipublikasikan oleh LSM Islam.

Pengelolaan zakat infak dan shodaqoh oleh lembaga-lembaga, tampaknya kita harus belajar dari lembaga yang pernah ada semisal Dompot Dhuafa Republika atau Laziz Paramadina untuk ditularkan pada masyarakat bawah atau pengelola masjid. Lembaga ini cukup efektif dalam memungut zakat, karena punya kaki tangan sampai ketingkat kelurahan. Dengan demikian lembaga ini secara tidak langsung mampu menjangkau ke seluruh warga yang beragama Islam. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini tidak terbatas pada individu saja, tetapi juga merambah pada perusahaan yang dikelola oleh kaum Muslimin dan muslimat.

Dengan demikian obyek zakat semakin melebar, bukan semata-mata diambil dari penghasilan individu, tetapi juga perusahaan-perusahaan. Obyek sasaran zakat pun menjadi berkembang, bukan semata-mata hasil bumi, tetapi juga saham, maupun bahan tambang, seiring dengan perkembangan perekonomian. Lembaga yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat (LSM) ini cukup dikenal oleh kalangan profesional, karena mampu menghimpun dana zakat secara transparan dan meyakinkan.

Lembaga ini dalam berbagai kesempatan selalu meningkatkan diri sebagai lembaga penghimpunan zakat yang profesional; baik dari segi pemungutannya, penyaluran dan akuntabilitas penggunaannya. Dengan berbagai advokasi yang dilakukan lembaga ini merupakan dua lembaga partikelir yang paling bergengsi yang pernah ada di Indonesia.

Barangkali profesionalisme kinerja lembaga ini hendanya perlu selalu dipantau oleh segenap kaum muslimin, agar lembaga ini benar-benar tumbuh sebagai kekuatan ekonomi baru dikalangan umat Islam. Karena zakat tidak lagi dipungut kemudian diberikan langsung kepada mustahiq, tapi dikelola langsung oleh lembaga itu, kemudian disalurkan kepada rakyat agar dimanfaatkan secara lebih produktif. Lembaga ini membantu bukan hanya beasiswa pendidikan, tetapi juga membiayai berbagai kegiatan peningkatan sumber daya manusia melalui penerbitan buku dan pelatihan ketrampilan usaha. Bahkan, melalui koperasi-koperasi, lembaga ini mengucurkan berbagai kredit untuk mengangkat perekonomian mereka.

Demikianlah jika zakat dihimpun dengan baik, direncanakan secara sistematis, baik sasaran subjek maupun obyeknya, maka akan dapat dihimpun dana cukup besar. Demikian pula agar tidak salah sasaran, maka diperlukan penelitian yang sungguh-sungguh bagi mereka yang berhak menerima. Malahan kita membutuhkan semacam baitul mal (di tingkat negara), atau lembaga nirlaba yang kredibel, dikelola secara profesional dan terbuka oleh pemerintah bersama masyarakat, guna mempercepat penumbuhan kesejahteraan hidup, tidak saja buat umat Islam, tetapi juga buat semuanya.

Menumbuhkan kesadaran untuk berzakat

Gerakan membayar zakat mestinya juga merupakan perwujudan dari gerakan kasih sayang dari seseorang kepada orang lain. Memang betul bahwa manifestasi kasih sayang tidak harus bersifat material, akan tetapi dengan memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain akan lebih menyentuh perasaan orang itu.

Rasa kemanusiaan merupakan inti dari pemberian zakat. Sudah menjadi sunnatullah bahwa ada yang kaya, ada pula yang miskin. Bagi yang mampu, Allah membuka amal shaleh melalui zakat infaq dan shadaqah. Bagi yang tidak mampu, Allah pun membuka pintu berikhtiar mengubah nasib melalui kerja keras dan usaha yang halal, Sampai mampu menjadi pemilik tangan di atas. Karena tangan diatas bagaimanapun tetap lebih baik daripada tangan di bawah. Menjadi orang dengan kualifikasi sebagai tangan diatas itu, ibarat orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, sebutir benih mampu menumbuhkan tujuh butir, malah pada tiap-tiap butir bisa tumbuh seratus biji.

Penutup

Berdasarkan uraian ini, gerakan pemberdayaan masjid dalam mengelola zakat merupakan salah satu solusi untuk memecahkan problema sosial ekonomi umat Islam, terutama untuk mengatasi kemiskinan secara langsung di sumbernya (masyarakat). Pemberdayaan ini sangat penting mengingat potensi harta yang sangat besar dari umat melalui zakat, infak dan shodakoh hingga saat ini masih merupakan mata rantai sosial ekonomi yang terputus sehingga belum mampu mengangkat martabat hidup kaum muslim itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Boisard, Marcel. 1979. Humanisme dalam Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Hidayat, Komarudin. 2001, Agama di Tengah Kemelut. Jakarta:
Media Cita.

Madjid, Nurcholis. 2001. Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern. Jakata:
PT. Mediacita.

_____. 2003, Islam Agama Kemanusiaan
(Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia). Jakarta:
Paramadina.

CITRA KAUN IBU INDONESIA MERAJUT BENANG MERAH ANTARA FEMINISME DAN ISLAM

PENGANTAR;

Perbincangan mengenai perempuan selalu menarik minat banyak kalangan , termasuk bagi kaum perempuan itu sendiri,mulai dari kalangan a awam sampai kalangan ilmuwan dan agamawan. Apalagi di era kebebasan dan demokrasi saat ini, hampir semua kalangan bersuara bebas dan lantang, tetapi dari sekian pihak yang bersuara latang bahkan paling vocal menyuarakan masalah perempuan ini, adalah apa yang disebut dengan kaum feminis-baik laki laki maupun perempuan.

Dan umumnya mereka menyuarakan seputar hak – hak perempuan untuk meraih kebebasan hampir pada seluruh aspek kehidupan , maaf-maaf sampai hak untuk melahirkan dan menyusui anak yang mereka lahirkan sendiri.

Kecenderungan ini alih-alih mendukung dan membela perempuan dari berbagai ketertindasan kepada kebebasan dan kemerdekaannya, bahkan justru lebih menambah masalah dengan terjerumusnya mereka kedalam konflik berkepanjangan hingga ke dapur dan tempat –tempat privacy lainnya dalam rumah tangga khususnya kaum laki –laki, yang merasa ketenteramannya terusik oleh berbagai suara penantangan dan tututan terutama yang dilontarkan kaum feminis., mengenai hak perempuan untuk bebas menentukan nasib dan kehidupannya sendiri termasuk hak untuk mengatur rumah tangga

Intinya , asumsi yang berkembang di masyarakat baik yang disarankan melalui media dan ceramah dan media massa lainnya , dikembangkan

asumsi seolah –olah perempuan adalah mahluk kelas dua dibandingkan kaum lelaki, sehingga mereka tidak mendapat hak –hak tertentu sebagaimana diraih oleh kaum lelaki sebagai mahluk first class, dengan kata lain, kaum perempuan menjadi kaum tertindas di tengah tengah kehidupan masyarakat modern dengan segala kevanggiannya. Karenanya mereka berhak dibela dan diperjuangkan hak – hak terutama sebagaimana dicitrakan oleh kaum feminis , untuk mendapatkan kemerdekaannya dan meraih kebebasannya yang hakiki sebagai mahluk yang setara dengan kaum lelaki.

Untuk maksud tersebut, kaum feminis tidak sungkan – sungkan menampilkan data –data yang mengerikan mengenai berbagai peristiwa penindasan dan kekerasan yang menimpa kaum perempuan mulai dari bentuk pelecehan sosial , perlakuan diskriminatif dalam dunia kerja sampai keoda berbaperlakuan buruk dan tinmdak kekerasan lainnya yang ditimpakan kaum laki-laki (suami) , kepada para istri mereka .dan sekarang lebih dikenal kekerasan dan rumah tangga (KDRT) dan sampai sampai melahirkan RUU yang hingga sekarang sudah rampung.

Apakah yang sebenarnya terjadi ? ataukah kemungkinan lain, bahwa telah terjadi distorsi informasi dan pandangan umum masyarakat yang berkaitan dengan perempuan ini ? sehingga kaum feminis dengan serta merta baik sukarela maupun terpaksa harus turun tangan membela dan merebut hak – hak perempuan dari kehidupan masyarakat di abad teknologi ini ?Dan apakah tidak ada atau tidak pernah ada pihak atau komunitas lain yang berani memperjuangkan hak –hak perempuan salin feminis?Dan sejumlah persoalan lain yang bisa berpuluh puluh jumlahnya . Karena perlu menyoroti fenomena perempuan ini .dengan kaca mata yang jernih dan menenteramkan , tetapi juga membangun citra positif kaum

perempuan dimasa depan , sebagai salah satu asset bangsa yang cukup dominan perenannya dalam menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas dalam seluruh seginya.

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF FEMINISME

Apabila dibagian awal dimukakan istilah pandangan kaum feminis yang latang menyuarakan pembelaan terhadap hak – hak perempuan dan terus berjuang dengan gigih dan tidak pernah mengenal lelah ,sebenarnya tiu tidak murni yang mrenggambarkan suara kaum feminis secara bulat dan seirama . Ituhanyalah salah satu suara vocal dan dominan dari kaum feminis lainnya.

Bila kita cermati secara teliti dan mendalam sebenarnya ada beberapa kelompok kaum feminis dengan pemikiran feminismenya , yang mengembangkan kajian tentang pembelaan terhadap hak –hak kaum perempuan trhadap hak – hak kaum perempuan misalnya sebagai mana dijelaskan oleh Prop. Dr.Jalauddin Rahmat , menjelaskan ada tiga mazhab feminisme yatitu : 1. Femnisme liberal , 2. Feminisme cultural , 3. Feminisme Radikal

1. Feminisme liberal yaitu menekankan persamaan laki –laki dan perempuan dengan berpijak padfa liberalism politik . perempuan berhak atas kedudukan yang sama secara hukum dan sosial dengan laki – laki . kerena itu perlu ada perubahan dalam hukum , kebiasaan dan nilai – nilai untuk mencapai persamaan . Mereka mendorong penelitian tentang sosialisasi gender atau diskriminasi perempuan di masyarakat. Tesis mereka dapat disimpulkan bahwa perempuan akan

berprilaku sama sekiranya diberi peluang yang sama seperti laki – laki.

2. Feminisme cultural menetapkan bahwa perilaku yang unik pada perempuan telah direndahkan di masyarakat . sifat –sifat khas pada perempuan justru harus dihargai dan diberi tempat . Mereka mendorong penelitian mengenai sumbangan kaum perempuan terhadap masyarakat . mereka meneliti perbedaan jenis dalam nilai dan perilaku. Perempuan misalnya mempunyai kecenderungan untuk lebih menyayangi yang berorientasi dalam perannya sebagai ibu. Ketika sifat-sifat keperempuanan didampingkan dengan sifat kepribadian . terjadilah kombinasi yang baik untuk kebahagiaan keluarga , jadi alih –alih direndahkan , sifat yang khas perempuan itu ternyata sangat mulia bila ditempatkan pada tempatnya. yang tepat. Menurut mereka perempuan tidak perlu meniru laki- laki, sebagaimana laki –laki perlu meniru perempuan., dan tidak perlu menyamakan perilaku keduanya. tesis dapat disimpulkan biarkan pria berbeda dengan perempuan , karena dengan perbedaan itu ada keindahan.
3. Feminisme Radikal , melihat bahwa struktur dimanapun danb dalam jenis masyarakat apapun , laki – laki selalu diuntungkan , kekuasaan hukum , bahkan agama, telah digunakan untuk memperlakukan perempuan secara diskriminatif . perlakuan masyarakat yang merugikan perempuan itu disebut seksisme , yang menjadi sumber dari segala derita perempuan . mereka menekankan , dominasi laki-laki dan penindasan perempuan sepanjang sejarah . Dalam

penelitiannya , mereka melakukan studi tentang kekerasan terhadap perempuan .

Hasil penelitian terkini yang dipaparkan oleh Ameli dalam judul bukunya Islam dan Feminisme, mengklasifikasi kedalam lima katargori Yaitu :

- 1.Feminisme Amazon berkonstrasi pada kesetaraan gender secara fisik, aliran ini mempertanyakan , mengapa perempuan mengadopsi nilai – nilai tertentu serta berusaha menarik garis di antara determinisme perilaku biologis dengan perilaku budaya
- 2.Feminisme Anarki berupaya mencari sesuatu fragmentasi dari semua norma, nilai, dan kebiasaan yang berkaitan dengan perempuan , yang meliputi nilai – nilai yang dianut , baik oleh generasi hari ini maupun kemarin.Ia berkonsentrasi terhadap dokontruksi semua prinsip tradisional. Tanpa mencoba mengkonstruksi suatu prinsip yang sistematis bagi posisi perempuan dalam masyarakat modern dan postmodern.
- 3.Feminisme Liberal , bekerja dalam struktur arus utama (mainstream) suatu masyarakat untuk mengintegrasikan perempuan ke dalam struktur tersebut . Dia berakar dalam yiori kontrak sosial pemerintah yang dibangun revolusi Amerika .Liberalisme kaum peerempuan , dengan merujuk pada sistem domokrasi liberal, merupakan slogan utama yang mereka gaungkan bagi kaum perempuan di seluruh penjuru dunia.
- 4.Femenisme Marxis atau femenisme sosialis, yang menyadari bahwa perempuan tertindas dan menuding sistem kepemilikan kapitalis/

swasta sebagai pelakunya . Dengan demikian. ia bersikeras menyatakan bahwa satu –satunya cara untuk mengahiri penindasan tersebut adalah dengan meruntuhkan sistem kapitalis.

- 5.Feminisme Material merupakan sebuah gerakan revitalisasi hak – hak perempuan yang berpandangan bahwa situasi dan kondisi sosial , cultural dan politik telah menciptakan perbedaan – perbedaan dalam persepsi perempuan muslim dalam masyarakat Walaupun terdapat perbedaan , ada persamaan diantara mazhab tersebut peminisme memuliakan perempuan , perempuan dianggap sebagai manusia yang penting dan bernilai .Kedua feminism mengakui perlunya perubahan sosial jika perempuan berkehendak untuk menikmati kehidupan yang tenteram dan bahagia , denga kata lain , feminism dapat didefenisikan sebagai orang yang mempercayai perempuan itu mulia dan perubahan sosial yang membela perempuan itu diperlukan

PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Dalam Al –quran banyak menyinggung tentang femanisme , dan malah ada satu surah yang mengabadikan tentang perempuan yaitu QS : An-Nisa yang berarti surah tentang wanita / Perempuan. .Didalam alquran berulang kali ayat yang menyebutkan feminism dengan redaksi yang bermacam bahwa jenis kelamin tidak membedakan derajat. Siapa saja yang beramal saleh –baik laki –laki maupun perempuan akan memperoleh pahala yang sama disisi Allah .Kedua jenis kelamin ini disebut Bani Adam (QS.Al-Isra:70). Selain ayat suci Al –quran tidak sedikit pula ucapan Rasulullah yang menegaskan hal tersebut, misalnya pesan nabi Muhammad SAW

dihadapan para jemaah Haji pertama “Ketahuilah , aku wasiatkan kalian untuk memperlakukan perempuan sebaik- baiknya .kamu tidak memiliki mereka sedikitpun dan mereka pun tidak memiliki kamu sedikitpun. Hubungan yang ada antar kalian laki – laki dan perempuan bukan hubungan kepemilikan , tetapi hubungan cinta kasih sayang . Mawaddah wa rahmah , bahkan menjelaskan dalam menciptakan keluarga yang Mawaddah Wa Rahmah, setidaknya ada beberapa nilai (Value) yang bisa kita gali dari kehidupan rumah tangga Rasulullah antara lain :

1. Nilai peesamaan Derajat / Kesetaraan (Tasawuh), risalah yang dibawa Rasulullah adalah risalah yang paling sempurna ,, lengkap dan universal , rislah yang mengangkat derajat dan memuliakan kaum perempuan , yang berada dalam zona majinal di zaman jahiliyah . di dalam islam , seorang ibu memegang peranan yang sangat penting dalam keluarga sehingga beliau mengatakan Al-jannatu Tahta aqdamil ummahat” sorga berada dibawah telapak kaki ibu”dengan demikian issu kesetaraan gender dan kemitra sejajaran dalam perspektif islam sebenarnya sudah terealisasikan .
2. Nilai saling berdekatan (Taqarrub) dekat dalam hal , bukanlah pengertian kedekatan secara fisik , namun lebih dari itu kedekatan secara hati, dimana saja keberadaan seseorang, komunikasi tetap lancar dengan anggota keluarga , jembatan hati yang kokoh selalu terbina didalam keluarga
3. Nilai saling kesepahaman (Tafahu) suatu kenyataan bagi kita bahwa ada perbedaan karakter di antara semua manusia , apalagi dalam kehidupan keluarga , perbedaan jenis kelamin ,

antara laki dan perempuan , perbedaan latar belakang kedaerahan , antara suami – istri, termasuk juga perbedaan latar belakang pendidikan . begitu juga halnya dengan perbedaan karakter masing- masing anak perbedaan ini harus dikelola dan didayagunakan sebagai kekuatan , bukan dijadikan sebagai kelemahan . Dalam hal ini sangat diperlukan adanya saling kesepahaman antar masing – masing individu dalam keluarga.

4. Nilai sayang menyayangi (tarahum) kasih sayang sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Mendidik, membimbing dan menjaga anak dalam keluarga hendaklah dalam nuansa kasih sayang yang jauh dari kekerasan baik fisik dan psikis. Alangkah indahnya jika dalam kehidupan ini senantiasa dihiasi dan diwarnai dengan kasih sayang.
5. Nilai saling tolong menolong (Taawun) Ada perintah – perintah dan informasi yang kita peroleh dalam Al-quran , tentang tolong – menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. termasuk dalam kehidupan berkeluarga , harus ada sinergitas antar anggota keluarga. Antara sesama orang tua , antara sesama anak dan antara orang tua dengan anak serta pihak keluarga lainnya . saling kunjung dan saling bantu serta saling memberikan apresiasi terhadap prestasi yang diperoleh
6. Nilai saling memuliakan (Takaarum) Banyak diungkapkan dalam riwayat-riwayat, bagaimana Rasulullah memuliakan istri beliau contoh ringannya, memanggil istrinya siti Aisyah dengan sebutan Humairah (yang kemrah-merahan), karena

cantik dan manisnya Aisyah dimata beliau, Alangkah senang dan gembiranya yang kita cintai dan kita sayangi dengan panggilan yang menggembirakan .

7. Nilai ibadah (Ubudiyah) Rasulullah berpesan kepada kita dalam upaya membuat dan mejadikan rumah tangga yang aman damai dan tenteram dengan pesan Nawwiru buyutakum bil – al-shalaah wa qira atil Quran terangilah rumah tanggamu dengan shalat dan membaca Al-Quran pesan melalui hadis ini , shalat berjamaah dalam keluarga dalam waktu tertentu, akan medatangkan ketenangan dan kasih sayang ,karena salah satu fungsi dari shalat adalah mencegah dari yang keji dan mungkar. , dengan shalat yang husuk dan benar akan menciptakan keluarga yang agamis . dan sekaligus marilah kita jadikan rumah tangga sebagai lading dalam beribadah sebagai bekal kita hari kemudian nanti.

MEMBANGUN CITRA KAUM IBU DI INDONESIA

Dari berbagai pandangan yang diuraikan sebelumnya, pada dasarnya semua setuju untuk memuliakan perempuan sebagaimana yang disuarakan kaum peminis, akan perlu dupayakan secara bersama-sama apa yang menindas dan merusak citra perempuan, disamping usaha lain secara bersama – sama untuk dikembangkan sehingga dapat ,mengatasi berbagai upaya penodaan dan poenistaan terhadap citra perempuan , baik melalui media cetak, naupun elektronik maupun saluran media lainnya. Hal dikaitkan dengan harapan danya jalan terbuka bagi kaum perempuan ke depan untuk menjalani hidupm terhormat dan makmur, yang mengarahkan

ke manfaat yang lebih besar bagi keseluruhan masyarakat bangsa .untuk perlu merumuskan kosep diri sebagai landasan untuk membangun citra diri –kaum ibu di Indonesia masa depan, dengan melakukan analisis dan studi mendalam terhadap keteladanan tokoh – tokoh wanita yang sukses dan berhasil (Pelopor kaum wanita).

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA DAERAH KONFLIK

Abstrak

Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah mengenai struktur masyarakat multikultural dan peluang konflik, revitalisasi kearifan lokal dalam pendidikan pada daerah konflik, konstruksi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal, dan Struktur kurikulum dan akar budaya bangsa. Keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia selain sebagai asset kemajuan bangsa, juga harus ditelaah sebagai potensi dengan resistensi tinggi terhadap munculnya konflik. Dengan kondisi demikian, posisi kearifan lokal (*local wisdom*) harus direvitalisasi hingga mampu mewarnai pembelajaran dalam pendidikan multikultural. Konsekuensi atas upaya revitalisasi kearifan lokal semacam itu adalah penyusunan struktur kurikulum yang aspiratif terhadap akar budaya masyarakat belajarnya

Kata kunci: Pendidikan multikultural, kearifan lokal.

A. Pengantar

Indonesia merupakan sebuah negara bangsa (*nation-state*) yang sangat majemuk dilihat dari berbagai dimensi. Salah satu dimensi menonjol dari kemajemukan itu adalah keragaman etnik atau suku bangsa. Menurut Manan (1989), terdapat lebih dari 200 macam suku bangsa di Indonesia. Bahkan akan lebih banyak lagi bila dikaitkan dengan agama yang dianutnya, yang mendiami lebih dari 13.000 kepulauan Nusantara. Bahar (1997) dengan mengacu pada data Direktorat Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan bahwa di Indonesia saat ini terdapat 525

kelompok etnik. Dalam sejarahnya, kelompok etnik biasanya mendiami atau tinggal di sebuah wilayah tertentu seperti pulau atau provinsi tertentu sehingga sebuah wilayah di Indonesia identik dengan etnik tertentu.

Hubungan masyarakat antaretnik di Indonesia telah berlangsung cukup lama seiring dengan terjadinya mobilitas penduduk antarwilayah atau antarpulau baik karena alasan wilayah yang strategis bagi perniagaan, kekayaan sumber daya alam, maupun karena pelaksanaan program transmigrasi oleh pemerintah. Dalam kehidupan sosial, tentu saja terjadi interaksi, saling mempengaruhi, dan tidak jarang akan memunculkan perkampungan-perkampungan etnik tertentu di sebuah wilayah itu untuk kemudian hidup mengelompok dan membaur. Masing-masing etnik biasanya memiliki karakteristik nilai-nilai budaya yang spesifik yang berasal dari daerah asalnya dan masih dipertahankan dengan kuat untuk menjadi pedoman hidup masyarakat pemilik atau pendukung kebudayaannya itu dalam menjalani hidup berdampingan dengan etnik lain secara harmonis di tempat atau daerahnya yang baru.

Keharmonisan yang tumbuh karena adanya kesalingpahaman antar-masyarakat pendukung budaya yang berbeda itu makin lama makin meluntur. Perbedaan atas simbol etnis, agama dan ras yang seharusnya dijadikan sebagai perekat bangsa justru dijadikan sumber konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta bagi pihak yang bertikai. Alih-alih karena kondisi aspek ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhinya, tak jarang peristiwa konflik antaretnik memunculkan perilaku yang keluar dari adab atau keluar dari perilaku orang yang beradab. Hal semacam ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak untuk hidup damai dan sejahtera secara berdampingan dalam bangsa yang

multikultur. Selain itu juga menjadi indikator atas rapuhnya pemaknaan masyarakat dari etnik yang bertikai terhadap keluhuran budi yang terkandung dalam tatanan nilai-nilai budaya yang dibangun, dianut dan dijunjungnya.

B. Struktur Masyarakat Multikultural dan Peluang konflik

Sebagai bangsa dengan beragam kultur, Indonesia memiliki resistensi yang tinggi terhadap munculnya konflik sebagai konsekuensi dinamika kohesivitas sosial masyarakat. Sejarah bangsa Indonesia mencatat terjadi puluhan bahkan ratusan perselisihan antar kelompok etnik. Konflik-konflik horizontal yang terjadi baik dalam skala kecil dan besar terjadi di berbagai penjuru tanah air, seperti konflik Sampit di Kalimantan antara etnik Madura dan Etnik Dayak, konflik Sambas antara etnik Madura dan etnik Melayu, konflik Ambon, konflik Poso, dan yang terbaru adalah konflik Lampung antara etnik Lampung dan Bali.

Preistiwa konflik kekerasan massa di Lampung kerap terjadi secara beruntun. Mulai dari kasus perebutan lahan yang tergolong kawasan hutan lindung di Mesuji antara ratusan petani penggarap lahan dengan pihak perusahaan PT. Silva yang mendapatkan izin hak guna usaha dari pemerintah. Petani mengklaim mereka lebih berhak menggarap tanah tersebut karena mereka sudah berada terlebih dahulu untuk membuka kawasan tersebut selama tiga periode keturunan sehingga di sekitar kawasan tersebut menjadi perkampungan yang ramai. Sementara pihak perusahaan menganggap bahwa usaha mereka sudah mendapat izin dari pemerintah daerah kabupaten. Masyarakat menilai keberpihakan pemerintah kepada pengusaha lebih besar daripada kepada rakyat. Rakyat dilarang menempati

dan menggarap tanah register kawasan hutan lindung, sementara pengusaha atau perusahaan dari luar Lampung justeru dilindungi.

Selain peristiwa tersebut, terjadi juga peristiwa Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Peristiwa kekerasan yang sepiantas bernuansa SARA ini melibatkan dua warga desa, yaitu warga Desa Kota Dalam yang merupakan warga asli Lampung, dengan warga Desa Napal yang mayoritas etnis Bali. Peristiwa ini dipicu oleh perselisihan antar preman soal penguasaan lahan parkir oleh orang Bali di pasar Sidomulyo. Meski kejadian itu sudah dimediasi dan didamaikan oleh petugas dari Polres dan Pemerintah Daerah Lampung Selatan namun keesokan harinya ratusan warga Napal menyerbu desa Kota Dalam. Dalam aksi itu berkembang isu bahwa warga Dusun Napal yang mayoritas etnik Bali melukai dua warga pribumi Lampung yang tengah bekerja di ladang. Isu itu membuat warga desa Kota Dalam membalas menyerang desa Napal. Akibat konflik ini 48 rumah terbakar, dan 27 rumah rusak.

Tragedi kekerasan antarkelompok yang meledak secara sporadik di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara dan bangsa. Begitu kuatnya prasangka antara kelompok dan betapa rendahnya pemahaman nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang lain penting dipahami bersama dalam kehidupan masyarakat yang multikultural seperti Indonesia. Akar kata multikultural adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme di bentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan

martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Dengan demikian setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya.

Dasar multikultural bagi masyarakat Indonesia adalah adanya jumlah populasi penduduk Indonesia yang sekitar 226 juta dengan 300 kelompok etnis dan bahasa di dalamnya yang berbeda. Keanekaragaman tersebut menjadikan Indonesia sebagai masyarakat multikultural dan negara kepulauan terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut, terdapat 14 kelompok etnis utama dan 4 agama dunia. Keragaman itu juga muncul dalam hal masyarakat pedesaan tradisional, masyarakat pantai dan suku berdampingan dengan masyarakat metropolis yang juga terdiri dari orang-orang berorientasi pada kebudayaan modern atau pos-modern. Perpindahan penduduk, perdagangan dan pariwisata internasional, pertukaran kebudayaan dengan kelompok etnis dan agama lain manakala tanpa diiringi dengan saling memahami dan menghargai juga makin menambah nilai multikultural terkadang berujung pada ancaman ekonomi, perpecahan politik dan sosial, persaingan dan bahkan konflik berdarah.

Akar munculnya konflik dalam masyarakat multikultur disebabkan oleh: (1) adanya perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi (*access to economic resources and to means of production*); (2) perluasan batas-batas sosial budaya (*social and cultural borderline expansion*); (3) dan benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama (*conflict of political, ideology, and religious interest*). Sukamdi (2002) menyebutkan bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri atas tiga sebab utama: (1) konflik muncul karena ada benturan budaya, (2) karena masalah ekonomi-politik, (3) karena kesenjangan ekonomi sehingga timbul

kesenjangan sosial. Menurutnya konflik terbuka dengan kelompok etnis lain hanyalah merupakan bentuk perlawanan terhadap struktur ekonomi-politik yang menghimpit mereka.

Benturan budaya antaretnik terjadi karena adanya kategori atau identitas sosial yang berbeda. Perbedaan identitas sosial, dalam hal ini etnik dan budaya khasnya, seringkali menimbulkan etnosentrisme yang kaku sehingga seseorang menjadi tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya dapat memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. Sikap etnosentrik yang kaku ini sangat berperan dalam menciptakan konflik karena ketidakmampuan orang-orang untuk memahami perbedaan. Sebagai tambahan, pengidentifikasian kuat seseorang terhadap kelompok cenderung akan menyebabkan seseorang lebih berprasangka sekaligus menjadi sumber konflik yang potensial.

C. Revitalisasi kearifan lokal dalam pendidikan multikultural pada daerah konflik

Bicara tentang kearifan lokal sebagai sebuah nilai, maka sudah barang tentu tidak dapat lepas dari sebuah kata integritas, yang apabila dibahas lebih lanjut, maka integritas tersebut akan menjadi sebuah identitas dalam suatu bangsa. Dengan nilai tersebut maka suatu bangsa akan menjadi maju dan bermartabat. Begitu juga yang terjadi di dunia pendidikan. Seorang pendidik, tidak akan pernah dapat lepas dari sebuah kata sederhana yang disebut nilai. Karena dengan nilai tersebut maka seorang pendidik akan memiliki sebuah integritas yang pada akhirnya akan menjadi sebuah identitas, dan dengan identitas tersebut maka seorang pendidik akan

memiliki sebuah kekhasan yang akan membedakan dengan para pendidik yang lain. Di sinilah biasanya terdapat suatu kecenderungan yang biasa terjadi di kalangan para pendidik, yakni sering berlomba- lomba dengan metode pendidikan yang dimiliki dan sudah dipelajarinya. Mereka tidak sadar bahwa sebuah integritas tidak dapat disederhanakan hanya dengan sebuah kata metode. Dengan kata lain dapat dikatakan sebegus apapun metode, jika tanpa disertai dengan integritas yang ada di dalam diri pendidik tersebut maka metode tersebut tidak akan menjadi efektif.

Jika disepakati bahwa lembaga pendidikan merupakan pusat pembudayaan atau pusat pewarisan budaya, maka setidaknya seorang pendidik merupakan agen pembudayaan. Cara yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah dengan menggali berbagi potensi nilai yang ada dalam sebuah lokal masyarakat tersebut. Dari situlah maka seorang pelaku pendidikan tersebut akan dapat melakukan perubahan pada dunia pendidikan yang dijalani dan ditekuninya. Metode yang dapat digunakan untuk pengenalan lingkungan dalam pembelajaran yang berbasis pada kearifan lokal sebenarnya sangatlah variatif. Untuk siswa SMP-SMA, bagi guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jawa, dapat menugaskan para siswa untuk membuat karangan tentang potensi wisata kota. Bagi guru seni rupa, dapat mengajarkan bagaimana cara menggambar rumah serotongan, limasan dan joglo khas Jawa. Bagi guru matematika, dapat mengenalkan bentuk-bentuk geometris kepada para siswa melalui bentuk atap rumah adat. Metode lain yang dapat dipraktikkan adalah lewat kegiatan bercerita atau mendongeng, dengan menyertakan gambar, foto, boneka, iringan musik, miniatur rumah adat, atau barang bawaan guru yang menarik.

Cara semacam ini sangat efektif untuk mendidik siswa di tingkat Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.

Kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya. Dalam pandangan John Haba, kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat. (Haba, 2007:11). Berdasarkan inventarisai Haba, setidaknya ada enam signifikansi serta fungsi sebuah kearifan lokal jika hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan sebuah konflik. **Pertama**, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. **Kedua**, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. **Ketiga**, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu daya ikatnya lebih mengena dan bertahan. **Keempat**, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. **Kelima**, kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. **Keenam**, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi (Haba, 2007:334-335).

Keenam fungsi kearifan lokal yang diuraikan di atas menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai atau kearifan lokal (*local wisdom*) dengan sumber-sumber budaya sebagai penanda identitas

bagi kelangsungan hidup sebuah kelompok. Sumber-sumber budaya sebagai dasar keyakinan tradisional dalam masyarakat dapat dipandang sebagai kearifan budaya lokal (*indigenous knowledge*), dan merupakan sumber informasi empiris dan pengetahuan penting yang dapat ditingkatkan untuk melengkapi dan memperkaya keseluruhan pemahaman ilmiah. Kearifan budaya atau masyarakat merupakan kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu etnis, yang merupakan hasil pengamatan dalam kurun waktu yang panjang. Kearifan tersebut banyak berisikan gambaran tentang anggapan masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualitas lingkungan manusia, serta hubungan-hubungan manusia dan lingkungan alamnya.

Pendidikan berbasis kearifan lokal adalah pendidikan yang lebih didasarkan kepada pengayaan nilai-nilai kultural. Pendidikan ini mengajarkan peserta didik untuk selalu dekat dengan situasi konkret yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan kata lain model pendidikan ini mengajak kepada kita semua untuk selalu dekat dan menjaga keadaan sekitar yang bersifat nilai yang berada di dalam lokal masyarakat tersebut. Tujuan dari pendidikan berbasis kearifan lokal ialah sesuai dengan nas yang telah termaktub dalam undang-undang nasional yaitu Undang-undang (UU) No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan manfaat dari pendidikan yang berbasis kepada kearifan lokal antara lain ialah:

- a. Melahirkangenerasi-generasi yang kompeten dan bermartabat
- b. Merefleksikan nilai-nilai budaya
- c. Berperan serta dalam membentuk karakter bangsa
- d. Ikut berkontribusi demi terciptanya identitas bangsa
- e. Ikut andil dalam melestarikan budaya bangsa

Setiap etnik atau suku bangsa tentu memiliki produk kebudayaan yang melekat sebagai simbol identitas, kebanggaan, sekaligus landasan filosofis normatif yang menuntun tata perilaku kehidupan masyarakatnya. Jika hal semacam ini dapat dimaknai sebagai kerarifan lokal, maka pada masyarakat etnik Lampung memiliki Pi'il Pesenggiri sebagaimana masyarakat etnik Jawa dengan unggah-ungguh tutur ujaran budi pekertinya. Kearifan lokal ini hanya sebagai contoh dari begitu banyaknya kearifan lokal yang dimiliki setiap etnik yang mungkin dapat dijadikan basis pendidikan multikultural pada daerah konflik yang di wilayahnya terdapat kedua etnik tersebut.

Kearifan lokal masyarakat etnik Lampung

Menurut Hilman Hadikusuma dkk (1989), Piil Pesenggiri adalah landasan filosofis tatanan moral yang menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas hidupnya. Pi'il (fi'il=arab) artinya perilaku, dan pesenggiri maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Piil pesenggiri merupakan suatu keutuhan dari unsur-unsur yang mencakup Juluk-adek,

Nemui-nyimah, Nengah-nyappur, dan Sakai-Sambaiyan yang berpedoman pada Titie Gemattei adat dari leluhur mereka. Apabila keempat unsur ini dapat dipenuhi, maka masyarakat Lampung dapat dikatakan telah memiliki Pi'il Pesenggiri.

Secara ringkas unsur-unsur Pi'il Pesenggiri itu meliputi:

a. Juluk-Adek

Rizani Puspawijaya (1968) menyebutkan bahwa secara etimologis Juluk-adek (gelar adat) terdiri dari kata juluk dan adek, yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Juluk-adek menurut Abdul Syani (1994) merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu juluk-adek merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Mengingat juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

b. Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda "simah",

kemudian menjadi kata kerja "nyimah" yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah nemui-nyimah diartikan sebagai sikap pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. Nemui-nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajiban.

c. Nengah-Nyappur

Nengah berarti berada di tengah, sedangkan kata Nyappur berasal dari kata benda cappur menjadi kata kerja nyappur yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya.

d. Sakai-Sambaiyan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam praktiknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan. Sakai sambaiyan

berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Selanjutnya Titie Gemattei, yang terdiri dari dua suku kata titie dan gemattei. Titie berasal dari kata titi yang berarti jalan, dan gemantie berarti lazim atau kebiasaan leluhur yang dianggap baik. Wujud titie gemanttei secara konkrit berupa norma yang sering disebut kebiasaan masyarakat adat. Kebiasaan masyarakat adat ini tidak tertulis, yang terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat adat melalui suatu forum khusus (rapat perwatin Adat/Keterem). Titie gemattei tersebut berisi keharusan, kebolehan dan larangan (cepalo) untuk berbuat dalam penerapan semua elemen Piil Pesenggiri.

Kearifan lokal masyarakat etnik Jawa

- a. *Rame ing Gawe Sepi ing Pamrih*: Kalimat ini memiliki arti yang mengandung sebuah perintah atau ajakan agar seseorang senantiasa berbuat baik kepada siapapun, tanpa ada pilih kasih. Setelah berbuat baik seseorang diajak untuk tidak mengharapkan imbalan (pamrih) sedikitpun dari apa yang telah ia perbuat. Dari ungkapan kata tersebut dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi di Jawa khususnya jika sebagian besar masyarakatnya dapat memaknai dan mengaplikasikan ungkapan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan terjadi di negara Indonesia, jika semua pemimpin dan pejabatnya yang berasal dari suku Jawa dapat memaknai dan

mengaplikasikannya dalam aktifitas pemerintahannya? Dari ungkapan tersebut sekarang dapat terlihat bahwa sebenarnya nilai dari sebuah budaya lokal adalah sesuatu yang luar biasa.

- b. *Ing Ngarsa Sung Tulada, ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani*: kalimat ini adalah sebuah ajakan agar seseorang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan posisinya masing- masing. Apabila ia menjadi seorang pimpinan maka ia mampu menjadi suri teladan yang baik, apabila ia berposisi menjadi seorang penggerak (mentri/ pejabat tinggi) maka ia mampu memelihara kualitas kinerjanya, dan apabila ia menjadi seorang pejabat/ pegawai/ aparat perintah dan sebagainya maka ia sanggup menjaga dedikasi (memberi kekuatan/ dukungan).

- c. *Becik Ketitik Ala Ketara*:

Kalimat ini memberi inspirasi kepada siapa saja, bahwa pada akhirnya seseorang akan menuai apa yang telah ditanamnya. Dengan begitu tidak ada alasan bagi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang buruk, karena pada akhirnya sudah pasti orang tersebut tidak akan dapat mendapatkan kebahagiaan.

Dari tiga ungkapan kata bijak di atas sekiranya cukup untuk menjadikan sedikit gambaran bahwa, betapa luhur potensi nilai yang terkandung dalam lokal masyarakat Indonesia. Dari beberapa gambaran di atas hanyalah sedikit contoh yang diambil dari satu lokal masyarakat yang ada di Indonesia yaitu Jawa, padahal masih banyak lagi suku- suku lain yang ada di Indonesia, yang tentunya dalam tiap- tiap satu lokal sudah pasti memiliki ciri khas sendiri- sendiri. Seperti suku Batak yang kental dengan keterbukaannya, Jawa yang nyaris identik dengan kehalusannya, dan suku

Madura yang menjunjung tinggi nilai- nilai harga diri. Maka sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika setiap nilai yang menjadi khas dalam setiap lokal suatu masyarakat tersebut dijaga dan dipelihara, serta dikembangkan dan dan diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan. Setelah itu dipadukan dan sehingga membentuk satu kesatuan yaitu Indonesia.

D. Konstruksi Materi Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal

Dalam masyarakat yang heterogen tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan keunikan budaya suatu kelompok etnik sangat lumrah terjadi. Muaranya adalah terciptannya suatu sistem budaya (*culture system*) dan tatanan sosial yang mapan dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa. Dari sinilah kemudian pembumian wacana multikulturalisme patut digulirkan pada ranah pendidikan, yang selanjutnya mungkin dapat berupa pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural sebagaimana pendapat Andersen dan Cusher (1994) dan selanjutnya dikutip Mahfud (2008), bahwa pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Adapun Hernandez (1989) mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang

menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan dapat melakukan ekspresi.

Setidaknya ada dua hal bila kita akan mewujudkan pendidikan multikultural yang mampu memberikan ruang kebebasan bagi semua kebudayaan untuk berekspresi. Pertama, adalah dialog. Pendidikan multikultural tidak mungkin berlangsung tanpa dialog. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi atau di anggap lebih tinggi (superior) dari kebudayaan yang lain. Anggapan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain akan melahirkan fasisme, nativisme, dan chauvisme. Kedua adalah toleransi. Toleransi adalah sikap menerima bahwa orang lain berbeda dengan kita. Dialog dan toleransi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini penting untuk mengarahkan anak didik dalam menyikapi realitas masyarakat yang beragam, sehingga mereka akan memiliki sikap apresiatif, adaptif, terhadap keragaman perbedaan tersebut. (Choirul Mahfud: 2005)

Dengan pendidikan multikultural diharapkan adanya kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial. Bukti nyata tentang maraknya kerusuhan dan konflik yang berlatar belakang suku, adat, ras, dan agama menunjukkan bahwa pendidikan kita telah gagal dalam menciptakan kesadaran akan pentingnya pendidikan multikultural. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam memang merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah bagaimana ragam perbedaan tersebut justru dapat dijadikan asset, bukan sumber perpecahan. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina peserta didik agar tidak tercerabut dari akar budayanya.

Oleh karena itu, apresiasi terhadap kearifan lokal sebagai perekat atas kubu yang berseteru sangat dibutuhkan. Kearifan lokal tidak saja berfungsi sebagai materi budaya yang setiap saat dapat dimainkan oleh penggunaannya, tetapi juga sebagai pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, bahkan penggunaan bahasa lokal juga berfungsi sebagai salah satu sistem operasional bagi tata kerangka kearifan lokal secara umum. Dengan demikian kita harus kritis terhadap suatu nilai, termasuk nilai lokal yang telah diperebutkan oleh kepentingan berbagai aktor. Sebab pendekatan ini sangat rentan dengan adanya tarik-menarik kepentingan politik pihak-pihak tertentu, sehingga fungsi kearifan lokal tidak lagi sebagai perekat damai antar kelompok yang berkonflik tapi justru menjadi pemicu baru dengan topeng kearifan lokal.

E. Struktur kurikulum dan akar budaya bangsa

Model pendidikan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada, terbatas pada keragaman budaya yang ada, jadi terbatas pada dimensi kognitif. Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi atau materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks.

Terlepas dari kritik atas penerapannya di beberapa tempat, revisi pembelajaran seperti di Amerika Serikat merupakan strategi yang dianggap paling penting dalam reformasi pendidikan dan kurikulum. Penulisan

kembali sejarah Amerika dari perspektif yang lebih beragam merupakan suatu agenda pendidikan yang diperjuangkan intelektual, aktivis dan praktisi pendidikan. Di Jepang aktivis kemanusiaan melakukan advokasi serius untuk merevisi buku sejarah, terutama yang menyangkut peran Jepang pada perang dunia II di Asia. Walaupun belum diterima, usaha ini sudah mulai membuka mata sebagian masyarakat akan pentingnya perspektif baru tentang perang, agar tragedi kemanusiaan tidak terulang kembali.

Sedangkan di Indonesia masih diperlukan usaha yang panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latarbelakang dalam pembentukan Indonesia. Indonesia juga memerlukan pula materi pembelajaran yang bisa mengatasi "dendam sejarah" di berbagai wilayah. Perubahan apa yang akan terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia tampaknya sedang dalam pematangan oleh pemerintah. Menjelang tahun baru 2013 dan memasuki tahun pelajaran 2013-2014 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional menyosialisasikan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013. Mengingat kurikulum ini merupakan penyempurnaan atas kurikulum sebelumnya, yakni KTSP, maka kurikulum yang baru ini banyak yang menyebutnya sebagai KTSP 2013. Berdasarkan catatan penulis banyak pihak yang berharap adanya perubahan positif dari kurikulum baru ini, namun di sisi lain tidak sedikit yang merasa pesimis atau tidak berharap banyak dari perubahan kurikulum 2013. Idealnya kurikulum tersebut menampung aspirasi kebutuhan bangsa yang multikultur yang untuk itu dibutuhkan model kurikulum yang inklusif.

Dalam kurikulum yang inklusif, topik dan pemikiran yang berkaitan dengan multikultural tidak dibatasi pada rancangan materi pelajaran

tertentu, namun dimasukkan ke seluruh kurikulum. Idealnya, pendidikan multikultural yang inklusif tidak hanya terbatas pada kurikulum formal akan tetapi harus ditanamkan dalam keseluruhan kebudayaan sekolah. Possidento (1980) menyebutnya sebagai “kurikulum tersembunyi” tidaklah akademis akan tetapi mempunyai konsekuensi penting untuk pendidikan di sekolah yang terjadi secara sistematis namun tidak dibuat eksplisit pada tingkat rasional publik bagi pendidikan.”

Pada hakikatnya, model pendidikan di tanah air kita itu di awal terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia telah mengarah pada terciptanya model kebudayaan bangsa secara universal, hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 32, yang isinya adalah ”kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”. Oleh karena itu, kebudayaan yang ditampilkan oleh negara Indonesia merupakan representasi dari wajah kebudayaan yang Indonesia secara keseluruhan, dan bukan justru cerminan dari sebuah kelompok kebudayaan tertentu saja. Pendidikan berbasis kearifan lokal sebenarnya adalah bentuk refleksi dan realisasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu pasal 17 ayat 1 yang menjelaskan bahwa ”kurikulum tingkat satuan pendidikan SD-SMA, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, sosial budaya, dan peserta didik”.

Kurikulum yang diperlukan dalam pendidikan multikultural mempunyai tiga komponen utama; yaitu isi, metode, dan manusia.

- a. Isi mencakup ilmu pengetahuan, teori, konsep, fakta, kontribusi, dan perspektif dari kelompok yang berbeda suku, etnisitas, gender, bahasa, kelas sosial, agama, orientasi seksual, cacat dan tidak cacat,

kepercayaan politik dan sebagainya yang secara historis tidak terpresentasikan dalam ranah pendidikan.

- b. Metode, mencakup strategi pembelajaran yang mengakomodasi gaya pengajaran dan pembelajaran yang berbeda, kebijakan-kebijakan akademik yang mendukung rekrutmen, mentoring, memori siswa multikultural, pengajar, populasi staff, dan proses kurikulum yang mendorong eksplorasi, pengembangan, dan implementasi kurikulum multikultural.
- c. Manusia, menyangkut siswa multikultural, pengajar, dan populasi staff yang mendukung dan mengembangkan implementasi kurikulum multikultural melalui metode yang telah digunakan.

F. PENUTUP

Pendidikan multikultural menjadi bagian penting dalam masyarakat yang majemuk. Pemahaman akan keberagaman melalui pendidikan multikultural dapat meningkatkan kesadaran bahwa perbedaan adalah suatu keniscayaan, dan perbedaan itu harus diterima secara wajar dan bukan untuk membedakan. Perbedaan perlu diterima sebagai suatu kewajaran dan perlu mengembangkan sikap toleransi agar dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran pendidikan multikultural, maka sudah seharusnya memiliki struktur kurikulum yang tegas mencerminkan aspek kearifan lokal di dalamnya. Selain itu tentu dibutuhkan kemampuan pendidik yang dapat merancang sebuah strategi secara tepat dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai bagian penting dalam pengembangan pendidikan multikultural.

Melalui pemanfaatan budaya lokal sebagai dasar pengembangan pendidikan multikultural, akan semakin meningkatkan pemahaman akan pentingnya upaya untuk terus menjaga atau melestarikan budaya lokal. Selain itu, dalam suasana pembelajaran di kelas yang sangat mungkin memiliki heterogenitas dari berbagai bidang, menjadi hal penting untuk saling mengenal budaya lokal yang dimiliki oleh peserta didik. Namun demikian, keberhasilan pengembangan pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal ini sangat ditentukan oleh kemampuan seorang pendidik dalam mengelola pembelajaran. Di tangan seorang guru yang memiliki kreativitas dan daya inovatif tinggi, pembelajaran pendidikan multikultural berbasis budaya lokal akan sangat mungkin dan mudah terwujud. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman tentang multicultural-isme dan peningkatan kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran agar tujuan pembelajaran pendidikan multikultural dapat tercapai.

KEPUSTAKAAN

Abdullah Irwan, 2008, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Bruner, E. M. 1974. *The Expression of Ethnicity in Indonesia - dalam Abner Cohen (peny.) Urban Ethnicity*. London: Tavistoc.

Budi Santoso Budiman dan Oyo Saroso HN (pen), 2012. *Merajut Jurnalisme Damai Di Lampung*, Bandar Lampung,:Aliansi Jurnalis Independen.

Haba, John. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Rsolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP dan Eropean Commision

_____. 1995. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta: Djambatan.

Mahfud, Choirul. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

PERAN GANDA WANITA YANG BEKERJA

ABSTRAK

Peran ganda yang dilakukan oleh wanita telah menyebabkan mereka mempunyai tugas ganda. Keadaan yang demikian menyebabkan wanita sulit membagi waktu dan adanya konflik psikis antara tugas rumah tangga dan mencari nafkah. Sebagai seorang ibu jika ia tidak dapat sepenuhnya mengasuh atau merawat anaknya menjadi suatu hal yang dikhawatirkan kalau-kalau ia gagal dalam rumah tangganya.

Dalam melaksanakan peran ganda tersebut mereka berusaha untuk dapat menyelesaikan kedua peran itu sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa wanita yang tidak sepenuhnya menjalankan peran ganda tersebut, karena waktu dan tenaganya sudah tercurah di tempat kerja sehingga untuk pekerjaan di rumah tidak mampu lagi diselesaikan. Untuk melakukan pekerjaan tersebut perlu bantuan Ibu (orang tua) atau saudara wanita (adik) yang tinggal bersama mereka.

Kata Kunci: Peran Ganda.

A. Pengantar

Dalam proses perubahan sosial, perubahan peranan wanita penting diamati, karena berkaitan langsung dengan norma sosial budaya yang paling banyak menimbulkan friksi. Kecendrungan wanita untuk bekerja disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor desakan ekonomi, wanita-wanita yang tinggal dipertanian juga banyak terkena guncangan ekonomi yang berlangsung sejak beberapa dekade terakhir, yakni setelah kemerdekaan Indonesia. Menurut Hanna Papanek, bagi wanita kota yang hanya hidup dari penghasilan anggota keluarganya yang bekerja di sektor pemerintahan, yang upah atau gaji sering tertinggal jauh dari perubahan

biaya hidup, guncangan ekonomi itu mendorong mereka untuk terlibat pula menyelamatkan kondisi ekonomi rumah tangga agar tetap bisa bertahan dan jika mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dari segi ekonomi.⁴⁸

Aktivitas wanita di sektor ekonomi dapat berupa bekerja untuk seorang majikan di luar rumah tangga atau bekerja untuk diri sendiri di rumah atau di luar rumah dengan tujuan untuk menambah penghasilan keluarga. Mereka tersebar dalam berbagai lembaga pekerjaan yakni sebagai pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta dan usaha-usaha wiraswasta lainnya.

Perkembangan masyarakat dan kebutuhan ekonomi yang makin lama makin mendesak seperti ini mendorong wanita untuk mengembangkan usaha secara mandiri tetapi di sisi lain mereka tetap dituntut untuk menangani masalah-masalah rumah tangga seperti sebelumnya. Salah satu yang paling vital adalah masalah pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan anak. Di duga aktivitas wanita di sektor ekonomi telah menimbulkan perubahan pola pengasuhan anak.

B. Pengertian Wanita

Secara etimologis, kata wanita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Svanittha, kata sva artinya sendiri dan nittha artinya suci, jadi svanittha artinya mensucikan sendiri. Kemudian dalam perkembangannya kata svanittha memiliki pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam dharma (hukum universal, kebijakan, kebijakan) atau pengamal dharma.

⁴⁸ Hanna Papanek, *Wanita di Jakarta: Kehidupan Keluarga dan Keluarga Berencana*, dalam Koentjaraningrat *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai*, Antropologi Terapan 1984, Hal 47

Dari sini juga berkembang perkataan sukla svanittha yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia, dalam hal ini peranan perempuan sebagai penerus keturunan yang baik (suputra). Sedangkan kata perempuan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata empu yang mendapat kata awalan-akhiran per-an. Seorang yang mendapat julukan atau berhak menyandang gelar empu adalah seseorang yang waskita, orang yang bijaksana, orang yang memiliki kedalaman spritual dan mampu dibidangnya.

Bila kita hayati secara mendalam dari akar katanya, sejatinya tidak ada perbedaan arah makna, apalagi dikotomi antara kata wanita dan perempuan. Kedua kata-kata tersebut sama-sama menempatkan wanita/perempuan pada tempat yang mulia, sebagai pribadi bijaksana yang memiliki kedalaman spritual yang bertugas memelihara peradaban umat manusia.

C. Peranan Wanita

Terdapat banyak teori tentang peranan wanita, antara lain bisa diketengahkan teori nature dan teori nurture. Kedua teori ini bicara mengenai perbedaan psikologis antara pria dan wanita yang berkaitan erat dengan peranan mereka dalam masyarakat. Pengikut teori nature yang ekstrim beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara pria dan wanita disebabkan oleh faktor-faktor biologis keduanya. Sebaliknya menurut teori nurture perbedaan itu terjadi melalui proses belajar dari lingkungannya. Kedua teori ini mendasari perbedaan berkepanjangan tentang penyebab terjadinya pembagian kerja secara seksual antara pria dan wanita.

Dalam masyarakat Indonesia umumnya kehidupan wanita berkisar di sekitar rumah tangga. Tujuan hidup wanita seakan-akan hanyalah untuk

menikah dan membentuk keluarga. Dalam keadaan seperti ini wanita secara ekonomi menjadi tergantung kepada pria dan tidak dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Menurut Arif Budiman kondisi yang tercipta seakan-akan memenjarakan wanita dalam dunia yang tidak merangsang perkembangan kepribadiannya.⁴⁹ Mereka mengerjakan pekerjaan yang itu-itu juga setiap hari, diulang jutaan kali. Pergaulan mereka terbatas pada kerabat dan tetangga.

Dalam setiap masyarakat terdapat apa yang disebut kebudayaan, yakni rangkaian simbol pengetahuan, nilai, aturan dan norma yang dipunyai manusia dalam memahami dan menginterpretasikan lingkungannya dan yang dipakai dalam mewujudkan atau mendorong terwujudnya kekuatan sebagai makhluk sosial. Anggota masyarakat suatu pendukung kebudayaan mau tidak mau harus menggunakan model adaptasi yang sesuai dengan kebudayaan tempat dirinya menjadi bagian atau anggota dalam melakukan aktivitasnya. Bentuk kebudayaan itu cenderung menempatkan istri memiliki kewajiban utama mengurus kepentingan suami dan anak-anaknya. Untuk itu dia dibebaskan dari keharusan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Biaya hidupnya ditanggung dengan harta pusaka milik kaum, begitupun biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya sampai mereka menikah nanti.

Perkembangan sosial- ekonomi masyarakat, termasuk pendidikan yang begitu pesat di abad ke 20 ini semakin membuka kesempatan kerja bagi wanita. Desakan ekonomi yang begitu kuat karena bertambahnya kebutuhan menumbuhkan kesadaran bahwa bila wanita disuruh tinggal di rumah saja padahal sebenarnya dia potensial untuk bekerja, itu sama artinya dengan melepaskan peluang untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

⁴⁹ Arif Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, Gramedia 1982, hal 2

Perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi dalam segala bentuk, Penggunaan alat-alat teknologi yang berdampak besar pada efisiensi dan agresifnya penyebaran wanita dan terbukanya wawasan gara-gara terbuka luasnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal sampai ke perguruan tinggi dan faktor-faktor perkembangan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga, menyebabkan sosok ideal wanita juga mengalami pergeseran.

Pergeseran ini penyangkut peranan konvensional yang selama ini dijalannya yakni sebagai ibu rumah tangga dan pengasuh anak. Pergeseran status dan peranan ini pada gilirannya nanti akan membuahkan perubahan sosial dan mendorong perubahan kebudayaan, karena aspek dinamis yang dikandung oleh kebudayaan itu sendiri.

D. Motivasi Bekerja.

Ibu rumah tangga berarti status yang disandang oleh wanita yang telah menikah dan mempunyai anak. Banyak faktor yang menjadi mendorong ibu rumah tangga untuk melakukan peran ganda dengan bekerja mencari nafkah. Motivasi bekerja dan mencari nafkah pada ibu rumah tangga tidak hanya muncul setelah mereka menikah, melainkan juga saat sebelum mereka menikah. Sebagian besar dari wanita mengatakan bahwa mereka itu bekerja karena ingin mandiri, dalam arti mempunyai penghasilan sendiri dan tidak tergantung secara ekonomis dari orang tua. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka bekerja untuk mencari pengalaman dan mencari kesibukan. Sebagian besar dari wanita mengatakan bahwa desakan ekonomilah yang mengharuskan mereka untuk bekerja di luar rumah agar rumah tangga mereka selamat dari kekurangan-kekurangan, terutama kebutuhan sehari-hari. Kecendrungan mereka untuk bekerja di luar rumah

dipengaruhi juga oleh kondisi rumah tangga mereka, yakni apabila anak-anak telah mulai masuk sekolah sedangkan suami tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk menutupi segala kebutuhan rumah tangga mereka, maka desakan untuk bekerja bagi wanita ini semakin terasa.

Motivasi wanita untuk bekerja, terutama bagi wanita yang telah mereka menikah, adalah karena faktor ekonomi, yakni ingin membantu suami dalam menaggulangi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang harus dibiayai, seperti biaya pendidikan anak, membeli alat-alat dan perabotan rumah tangga. Sebaliknya bagi wanita yang bekerja sebelum menikah asal mula mereka bekerja adalah atas keinginan sendiri untuk mandiri yakni ingin memiliki penghasilan sendiri dan secara ekonomi tidak tergantung pada orang tua.

Secara umum baik wanita yang bekerja setelah menikah (alasan ekonomi) maupun wanita yang bekerja sebelum menikah (alasan mandiri), pekerjaan yang menjadi pilihan adalah menjadi pegawai negeri. Hanya sedikit sekali yang berminat untuk bekerja di sektor swasta. Prioritas utama bagi mereka untuk menjadi pegawai negeri adalah pandangan pegawai negeri agak santai dibanding dengan bekerja swasta, masa depan terjamin oleh dana pensiun. Sedangkan kalau bekerja di swasta selain waktu tersita, jaminan dan keamanan bekerja agak kurang, kerena menurut mereka di swasta keputusan atasan sangat menentukan sekali. Jadi kedudukan kita sebagai pekerja sangat goyah, sewaktu-waktu kita bisa berhenti bekerja apabila atasan tidak senang kepada kita.

E. Dukungan Suami Terhadap Beban kerja Istri

Sebagian besar suami memberikan dukungan apabila istri melakukan kegiatan di luar rumah (mencari nafkah). Dukungan yang dimaksud adalah berupa dorongan kepada istri untuk bekerja. Baik bagi mereka yang mulai bekerja setelah menikah maupun dorongan untuk terus bekerja bagi wanita yang memang telah bekerja sebelum menikah. Kebanyakan alasan yang dikemukakan suami karena alasan ekonomi yaitu ingin membah penghasilan rumah tangga, walaupun tidak semuanya.

Bagi wanita yang ingin mulai bekerja setelah menikah, pekerjaan apa yang mau dilakukan atau yang menjadi alternatifnya terlebih dahulu mereka musyawarahkan dengan suami. Biasanya yang menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan bekerja atau tidak adalah masalah pengurusan rumah tangga dan merawat anak-anak. Kalau masalah ini bisa diatasi maka suami akan menyetujui usul istrinya untuk bekerja. Untuk mengatasi masalah tersebut umumnya istri akan mencari tenaga pengganti untuk membantu urusan-urusan rumah tangga. Pertama kali kebanyakan mereka membawa saudara adik wanitanya (kalau ada) atau famili untuk tinggal bersama mereka. Kalau famili yang bisa membantu tidak didapat baru mencari pembantu, yang kebanyakan juga dicari yang berasal dari desa atau kampung asal mereka, yang sebelumnya telah mereka kenal, paling tidak dengan orang tua atau keluarga dari anak yang akan dibawa tersebut. Selain itu banyak juga diantara rumah tangga-rumah tangga tersebut yang tinggal dengan orang tua.

Biasanya orang tua akan ikut memberi dukungan terhadap anak untuk bekerja di luar rumah, yang mana untuk urusan rumah tangga, terutama mengasuh bayi bisa dibantu oleh ibu (orang tua). Dukungan suami

mempunyai peranan yang cukup besar sehubungan dengan istri untuk bekerja mencari nafkah bahkan disektor domestik maupun disektor pablik. Yang berhubungann dengnan rumah tangga seperti mengasuh anak dan membersihkan rumah. Dikatakan bahwa seorang wanita atau istri mempunyai dua peranan, yaitu peranannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Untuk dapat dijalankan kedua peran tersebut dibutuhkan sekali dukungan suami dan kerja sama dengan anggota keluarga.

F. Peranan Istri dan Partisipasi Suami Dalam Tugas Rumah Tangga.

Pada posisi sebagai seorang istri, idealnya mereka mempunyai peranan sebagai ibu rumah tangga. Seorang istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tiap harinya ia harus melakukan berbagai kegiatan rumah tangga seperti memcuci, memasak dan menyiapkan makanan untuk anggota keluarga, mengurus anak membersihkan rumah dan pekarangan serta berbelanja kepasar untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu tanggungmng jawab utamanya terletak ditangan ibu, walaupun ada tenaga pengganti bila ibu berhalangan seperti sakit, namun sebagai ibu rumah tangga campur tangan ia butuhkan juga paling tidak sebagai pengatur atau apa yang mau dikerjakan harus diberi tahu dahulu padanya. Dengan demikian dapat dikatakan dengan ikut kerjanya wanita (istri) disektor baplik (mencari nafkah), seorang wanita dalam rumah tangga mempunyai peran ganda yaitu peranya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pencari nafkah. Sayangnya peran ganda wanita tidak diiringi oleh peran ganda laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan peran ganda wanita berarti juga beban ganda bagi wanita.

Keikutsertaan seorang wanita dalam mencari nafkah secara tidak langsung mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga. Karena waktu dan tenaganya telah berkurang untuk mengurus rumah tangganya, pekerjaan rumah tangga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pekerjaan rumah tangga yang dibantu suami lazimnya jika istri sangat sibuk atau jatuh sakit dan anak-anak masih kecil, dan anggota keluarga yang lain tidak ada yang tinggal bersama mereka. Dalam keadaan seperti ini barulah suami turun tangan untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Namun itupun hanya terbatas pada pekerjaan seperti membersihkan rumah dan pekarangan, mengasuh anak dan menyetrika pakaian. Jarang dijumpai suami yang mau turun tangan untuk mencuci pakaian dan piring, berbelanja ke pasar dan memasak. Pekerjaan tersebut dianggap sebagai bagian dari pekerjaan khas wanita karena wanita yang ahlinya mengenai pekerjaan tersebut.

G. Dampak Terhadap keluarga

Memperhatikan pola pengasuhan dan perawatan anak yang dilakukan oleh wanita yang ikut mencari nafkah, anak tidak lagi sepenuhnya berada ditangan mereka, karena selama mereka pergi bekerja dan meninggalkan rumah anak diasuh oleh orang lain. Hal ini menyebabkan ikatan emosional anak dengan ibunya sedikit agak renggang karena terbatasnya waktu untuk bertemu.

Untuk mengimbangi hal yang demikian tugas dan perawatan mengasuh anak dipercayakan kepada ibu (orang tua). Jika dalam rumah tangga tersebut tidak ada ibu (orang tua), maka selama ibu pergi bekerja , anak dititip kepada saudara atau famili, kadang-kadang dititip kepada

tetangga yang tidak pergi keluar rumah. Tapi kalau sudah ada anak mereka yang sudah agak besar (umur 7 tahun keatas) maka kepada anak tertua diberi tugas untuk menunggu rumah dan mengasuh adik-adik menjelang ibu pulang bekerja. Namun banyak juga diantara rumah tangga ini, terutama rumah tangga yang terbentuk keluarga inti, untuk mengatasi masalah pengasuhan anak, sementara ibu pergi bekerja anak-anak diserahkan kepada guru mengaji, dan dimasukan untuk mengikuti les-les, ini tentunya bagi anak-anak yang sudah masuk usia sekolah. Pengasuhan anak termasuk memandikan, memberi makan, mengantikan pakaiannya sering dilakukan oleh anggota keluarga lain seperti ibu (orang tua), saudara atau adik istri dan anak yang tertua. Anak wanita yang tertua kelihatannya dalam rumah tangga. Ia lebih dituntut untuk memperhatikan tugas-tugas rumah tangga ketimbang dari anak laki-laki.

Bagi wanita yang bekerja ganda kesulitan dalam memberi waktu sering terjadi, mana yang harus didahulukan antara rumah tangga dan tugas dikantor. Apalagi kalau anak-anak masih kecil-kecil. Disatu pihak ia harus memenuhi kewajiban-kewajiban di tempat ia bertugas dan dipihak lain sebagai ibu rumah tangga ia harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugas rumah tangganya, terhadap anak-anak dan waktu untuk melayani suami. Kesulitan itu terasa sekali apabila anak masih berumur 1 sampai 3 tahun. Seringkali seorang ibu harus menyambil dalam pekerjaannya. Sewaktu jam kantor ia sempatkan juga untuk pulang kerumah untuk melihat anak-anak, kemudian kembali lagi kekantor.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa wanita lebih mengutamakan rumah angganya dari pada pekerjaannya (mencari nafkah). Hal ini dapat diamati dari alternatifnya. Kebanyakan ibu-ibu tersebut sering

mintak izin untuk tidak masuk kantor dengan berbagai alasan; sakit, urusan keluarga, sakit dan lain-lain. Padahal ia hanya dirumah saja. Tambahan lagi kebanyakan dari ibu rumah tangga ini tidak mengiginkan ia gagal dalam mendidik anak-anak dan dalam mengurus rumah tangga. Kalau ia gagal berbagai kesalahan akan ditujukan pada drinya. Seperti kalau anak yang kecil sering sakit-sakitan apalagi kalau sampai meninggal dunia, orang orang akan yang menudingnya bahwa penyebabnya berasal dari ibunya yang terlalu sibuk mencari uang sehingga rumah tangga terabaikan.

Kebanyakan ibu-bu rumah tangga ini menyadari bahwa dengan kitnya mencari nafkah mempunyai pengaruh terhadap anak-anaknya. Apalagi ibu terlalu banyak gerak air susunya menjadi berkurang, sehingganya anak menjadi kurang nafsu makannya. Bagi ibu sendiri sering terlambat satu sampai dua jam untuk masuk kantor, karena pagi-pagi ia harus menyiapkan makanan dan menyusui anak.

Sebagian besar ibu yang bekerja mencari nafkah bekerja mulai pada pagi hari hingga siangnya. Bagi mereka yang masuk kerja pagi hari, pekerjaan rumah tangga seperti memasak air dan nasi dilakukan sebalum berangkat kerja. Untuk berbelanja keperluan dapur, memasak dan mencuci dilakukan pada sore hari setelah pulang kantor. Biasanya untuk keperluan konsumsi rumah tangga ibu-ibu ni berbelanja kepasar satu kali seminggu. Masalah pengasuhan anak dilakukan pada sore hingga malam sampai anak-anak tertidur baru ibu tidur pula.

Dari pola curahan waktu bagi ibu bekerja terasa sedikit sekali waktu dalam sehari yang tersisa buat keluarga dan buat dirinya sendiri. Karena pagi hari jam 7.00 sampai jam 14.00 adalah waktu pergi bekerja. Sepulang kerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci telah

menunggu pula yang menghabiskan waktu 1 sampai 3 jam. Kemudian memandikan anak-anak dan membersihkan rumah kira-kira 1 sampa 2 jam pula.

Peran ganda yang dilakukan oleh wanita telah menyebabkan mereka mempunyai tugas ganda. Keadaan yang demikian menyebabkan wanita sulit membagi waktu dan adanya konflik psikis antara tugas rumah tangga dan mencari nafkah. Sebagai seorang ibu ia tidak dapat sepenuhnya mengasuh atau merawat anaknya suatu hal yang dikawatirkan kalau-kalau ia gagal dalam rumah tangganya.

Dalam melaksanakan peran ganda tersebut mereka berusaha untuk dapat menyelesaikan kedua peran itu sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa wanita yang tidak sepenuhnya menjalankan peran ganda tersebut, karena waktu dan tenaganya sudah tercurah ditempat kerja sehingga untuk pekerjaan dirumah tidak mampu lagi diselesaikan. Untul mengurusnya pekerjaan tersebut dibantu oleh Ibu (orang tua) atau saudara wanita (adik) yang tinggal bersama mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Gramedia, 1982

Femina nomor XVII, 4-17 Kei 1989, hal. 70 Menenbus peluang kerja di masa depan

Hanna Papanek Wanit di Jakarta: Kehidupan keluarga dan keluarga berencana, dalam Koentjaraningrat (ed) Maslah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Antropologi Terapan. LP3ES 1984, Hal 47

Scholnick dan Scolnick, 1974: 131, dalam Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Gramedia 1981, Hal 2

Siswanto Sudomo DhD, dalam Wanita Karier Penyandang Beban Gand Yang Sering diPergunjingkan, Kompas minggu 19 November 1989, hal 1

T.O Ihromi, 1980. Pokok-Pokok Antropologi Budaya, hal 32

SEMANGAT RELIGIUS DAN RELIGIOSENTRISME

Dalam Perspektif Komunikasi Antaragama

Abstrak

Terdapat kesenjangan komunikasi yang menutup simpul-simpul komunikasi antarumat beragama. Kesenjangan komunikasi muncul sebagai imbas atas tumbuhnya semangat Religius yang diiringi gejala religioentrisme berupa keyakinan “serba paling benar” (*truth claim*) pada masing-masing umat agama. Pemanfaatan simbol-simbol agama dalam panggung politik, seni, ekonomi, dan perilaku sosial budaya yang bersentuhan dengan agama (*sinkretism*) belum signifikan dengan pencerahan spiritual masing-masing individu dalam menjalankan agamanya, sehingga berpeluang menimbulkan konflik-kinflik sektarian internal dan konflik eksternal antar umat beragama.

Kata kunci: Religioentrisme, Komunikasi Antaragama

Pendahuluan

Merupakan suatu anugerah yang patut disyukuri bahwa Indonesia memiliki kebhinekaan baik dalam aspek sosial, budaya maupun agama. Segala persamaan dan perbedaan di balik keragaman yang ada adalah khazanah sosial budaya yang turut memperkaya menuju kebesaran bangsa. Untuk mencapai kondisi dan pemikiran semacam ini dibutuhkan kesadaran yang mendalam bahwa manusia-manusia dari tradisi kehidupan sosial, budaya dan keagamaan yang berbeda harus bertemu dalam kerukunan dan persaudaraan, bukan permusuhan. Situasi ini amat dibutuhkan semua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan penciptaan nilai-nilai spiritual dan material yang sama-sama dibutuhkan dalam rangka mencapai tingkat

kehidupan yang lebih tinggi. Cita-cita ini merupakan ajaran fundamental setiap agama.

Tentang semangat religius masyarakat kita dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir, tampaknya kita mesti merunut ke belakang bahwa Alvin Tofler dalam Megatrends 2000 pernah memprediksi terhadap tatanan kehidupan memasuki era 2000-an. Ditengarai bahwa dalam era millenium akan muncul gelombang besar yang melanda umat manusia terutama di negara-negara maju untuk memiliki kecenderungan mencari atau kembali kepada kebenaran dalam konsep religius dan agama (pen: keinsyafan) terutama terhadap agama-agama besar.

Dalam kurun waktu tersebut kondisi religius umat Islam, terjadi perkembangan yang luar biasa dalam hal kemampuan dan kemauan diri umat Islam untuk mengaktualisasikan keislamannya. Wujud aktualisasi religius itu dapat berupa penggunaan simbol-simbol agama dalam berbagai dinamika kehidupan, penerapan pemikiran ataupun konsep-konsep agama hingga tataran praktis berupa rangkaian kegiatan (ritual) baik yang memang dianjurkan dalam agama, maupun yang berupa kebudayaan bernafas agama dan perpaduan budaya lokal dan agama (*sinkretisme*).

Kondisi yang mengemuka semacam itu setidaknya merupakan pencerahan yang patut dicermati. Kendati agak janggal juga, bahwa di tengah umat manusia di pelosok dunia mulai mencari atau kembali ke konsep kebenaran dalam agama, justru masih banyak umat beragama di Indonesia yang masih “menjauh” dari nilai-nilai agamanya. Dalam masyarakat tidak jarang kita mendengar dan melihat fenomena bahwa kendati seseorang tidak menjalankan ibadah dengan baik sebagaimana yang dianjurkan dalam agamanya, namun jika religius dirinya terusik ia akan rela

bertindak bahkan berbuat anarkis membela kehormatannya untuk menunjukkan bahwa ia sebagai orang yang beragama (fi'il bagi orang Lampung) dan hanya agamanyalah yang paling benar.

Suatu hal yang mengambirakan di balik fenomena pencerahan agama pada umat Islam ini adalah, kendati Islam di Indonesia sebagai agama yang paling besar penganutnya di tengah pluralitas agama, umat Islam di Indonesia mampu berdampingan dengan umat dari agama-agama lain yang juga berkembang di Indonesia.

Semangat Religius; dari Seni Hingga Panggung Politik

Berkat pencerahan keislaman yang bersifat massal pada hampir semua ini kehidupan melalui wahana komunikasi interpersonal maupun intrapersonal, maka tampak dunia ekonomi, social politik, budaya, dan tatanan masyarakat Islam kini mulai semarak dengan semangat dan konsep-konsep pemikiran yang islami. Dalam dunia perekonomian dikenalkanlah konsep bang syariah, bank muamalat, sistem ekonomi Islam dan sebagainya, yang diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan bangsa yang warga dominannya adalah muslim. Pada tataran sosial politik telah terkupas bagaimana menjalankan sistem pemerintahan dalam konsep tatanan masyarakat madani.

Dalam hal budaya tata busana terjadi gelombang yang dahsyat. Hampir dipastikan masyarakat muslim baik anak-anak maupun orang tua sudah mulai terbiasa tidak merasa kaku (eksklusif) dalam mengenakan busana muslim dan muslimah. Suatu hal yang di tahun 90-an hanya terlihat khusus yang penggunaannya hanya oleh orang atau golongan tertentu. Dalam dunia seni musik dan seni suara pun telah terjadi perubahan yang

mencolok. Seni Islami seperti nasyid, qasidah, dan sholawat yang dahulu cenderung “ndeso alias kampungan” dan hanya diminati masyarakat tradisional “kolot”, kini tampil dengan nuansa dan gaya yang lebih dapat diterima oleh kaum muda dan pada semua kalangan.

Gelombang perubahan semangat religius pun berimbas pada panggung politik di negeri ini. Simbol-simbol dan konsep Islam, kendati sayangnya hanya beberapa partai yang berupaya konsisten dengan semangat visi-misi sebagaimana tercermin dalam atribut keislamannya dan lainnya baru sebatas lipstik agar partainya laku, ternyata banyak dijadikan pilihan oleh beberapa partai politik sebagai media yang diharapkan mampu mengantarkan kepada kekuasaan.

Fenomena perubahan umat Islam dari kondisi yang biasa-biasa saja menjadi tampak lebih hidup dan bermakna itu lebih tepat dianggap sebagai suatu bentuk semangat religius, yakni semangat diri untuk mengaktualisasikan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan agama yang dianut oleh seseorang maupun secara massal atau kelompok karena berbagai dorongan baik dalam maupun dari luar dirinya.

Sebagaimana lazimnya semangat kehidupan, yang bersinonim dengan keimanan pada setiap individu selalu saja berubah, maka semangat itu pun suatu saat akan menggebu-gebu dan suatu saat yang lain lagi redup, dan seterusnya menyala kembali.

RELIGIOSENTRISME; Upaya Pembetulan Kekerasan

Berbagai rangkaian peristiwa kekerasan dan perusakan oleh perorangan maupun kelompok-kelompok tertentu suatu umat beragama pada dasawarsa terakhir menunjukkan bahwa umat beragama di Indonesia

terjerumus melakukan pembenaran atas tindakan kekerasan dan perusakan tersebut. Umat Islam tanah air ini bahkan diberi label khusus oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai teroris. Sayangnya hingga saat ini belum terdengar sebutan serupa atas perilaku serupa oleh kelompok agama selain Islam, seperti di Poso, Kalimantan, Ambon dan sebagainya yang mayoritas nonmuslim.

Penggunaan simbol-simbol agama dalam peristiwa yang membawa kerugian bagi sejumlah orang atau bagi sekelompok umat beragama tentu mengandung makna bahwa agama memiliki sisi doktrinal atau simbol yang dapat dijadikan sebagai media pembenaran atas tindakan tindakan pemeluknya dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Sensitifitas yang tumbuh seiring dengan keyakinan “serba paling benar” (*truth claim*) melatarbelakangi munculnya problem “religiosentrisme” di kalangan umat beragama.

Pada sisi lain juga terkandung makna bahwa peristiwa tindak kerusuhan dan perusakan yang mendapat legitimasi simbolik dari suatu agama, sewajarnya di pandang sebagai bentuk komunikasi antar budaya dan agama yang sedang terganggu dan tidak berjalan lancar tidak harmonis di antara para pemeluk agama yang berlainan. Problem religiosentrisme yang dimaksud adalah problem yang ditimbulkan oleh keyakinan bahwa hanya agama yang dianutnya sendirilah yang benar dan unggul, dan bahwa penganut agama yang bersangkutan memikul kewajiban untuk menyatakan kebenaran dan keunggulan tersebut terhadap para penganut agama lain, sehingga potensial bagi timbulnya gejala sosial yang destruktif seperti konflik terbuka atau tindakan kerusuhan.

Dalam Islam, upaya pembenaran seperti itu oleh penganut garis keras dan “oknum” yang mengatasnamakan umat Islam cenderung menggunakan “jihad” sebagai tameng perlindungan pembenar tindakan anarkis yang dilakukan. Semangat jihad yang tidak pada tempatnya ini telah menjadi isu yang paling ampuh untuk mengkomunikasikan ajakan secara bersama untuk menyingkirkan umat agama lain yang dianggap sebagai penggaggu. Selain itu juga sebagai jalan menuju keadilan yang sebenarnya atas perlakuan diskriminatif oleh pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus-kasus semacam itu.

Penggunaan istilah “*religiosentrisme*” diilhami oleh konsep “*etnosentrisme*” yang banyak digunakan oleh para ahli sosiologi abad 19 untuk memaham kebudayaan Barat. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan sikap-sikap bersakwasangka antara kelompok dalam (*in-group*) dengan kelompok luar (*out-group*), yang sikap dan perilaku, adat-istiadat serta aturan-aturan sosial kita secara mutlak dan tampak daya kritis dinyatakan mengungguli sikap dan perilaku, adat-istiadat, serta aturan-aturan sosial yang dimiliki oleh orang lain.

Generalisasi dengan makna konsep etnosentrisme ini, gagasan religiosentrisme dapat diartkan sebagai sakwasangka antar penganut agama-agama, yang masing-masing penganut agama memperlakukan agama mereka sendiri sebagai agama yang benar dan sudah semestinya harus mengungguli agama lain, sekaligus mengungguli penganutnya. Kendati religiosentrime secara lazim memiliki kaitan dengan ajaran agama wahyu, keimanan dan dogmatis, baik semangat maupun perwujudan religiosentrisme sepenuhnya menjadi bagian dari kebudayaan.

Kualitas Agama dan Religius

Hal tentang kualitas lazimnya berhubungan dengan tolak ukur atau kriteria dan standar penilaian tertentu. Dalam kaitan ini kualitas beragama seseorang tentunya akan dengan mudah terlihat melalui perilaku kesehariannya. Dalam hal kualitas agama, dapat dipastikan semua agama pasti mengandung ajaran bahwa agama tersebutlah yang paling benar, mulia, dan sempurna, karena dengan modal kesempurnaan itulah masing-masing agama akan membawa penganutnya kepada tujuannya dalam menjalani kehidupan secara sempurna. Ini berarti masalah kualitas agama merupakan sesuatu yang mutlak bahwa semua agama berkualitas.

Berangkat dari Pemahaman tersebut maka tesis sementara yang mengemuka adalah:

1. Setiap agama memiliki tolak ukur sendiri atas kualitas umatnya dalam menjalankan agamanya. Sejalan dengan itu, untuk kompensasi atas segala perilaku yang diperbuat umatnya sekaligus sebagai tolak ukur kualitas religius (keimanan), maka setiap agama memberikan jaminan kewenangan, aturan, dan juga larangann bagi penganutnya atas suatu tindakan-tindakan atau perilaku tertentu.
2. Sebagai konsekuensi dari adanya jaminan tersebut, maka berpengaruh bagi umat pemeluk suatu agama, yakni berupa pengakuan sepihak bahwa agamanya saja yang paling benar, paling tinggi derajatnya, dan paling sempurna.

Mencermati kondisi sebagaimana landasan pada kedua tesis tersebut, dapat dilihat bahwa bagi agama tertentu cenderung mendorong umatnya untuk selalu mengupayakan penyebaran “kebenaran” dengan jalan

mempengaruhi dan mengajak masyarakat baik yang belum beragama maupun yang sudah beragama untuk memeluk agama dan meyakini “kebenaran” agama mereka. Sedangkan pada umat Muslim cenderung lebih bersifat pasif dan bertahan. Langkah ini mungkin karena Islam sendiri tidak mengajarkan penyebaran yang bersifat tidak demokratis. Selain itu juga karena dalam Islam sendiri sudah ada jaminan dari Allah SWT, bahwa agama yang paling sempurna dan mendapat ridho adalah agama Islam.

Dalam konteks berupaya menjadi insan yang berkualitas dalam religiusnya setiap individu maupun kelompok senantiasa memupuk semangat religiusnya itu (keimanan) dengan berperilaku sesuai dengan kewenangan yang digariskan dalam agama yang dianutnya. Namun sayang semangat cita-cita keselamatan dan kedamaian itu tidak selalu menjadi kenyataan yang merata. Sebagai gantinya terjadilah sebaliknya, yaitu perilaku religius tanpa agama sebagaimana yang diungkapkan oleh Will Herberg (1973).

Perubahan sosial sebagai akibat proses menjadi modern pada masyarakat Barat telah menetapkan agama pada posisi “terpencil” berada pada enclave-enclave tertentu dari masyarakat dan kebudayaan mereka. Namun demikian, dengan merujuk pada kasus Amerika Serikat, Will Herberg (1973:223-231) menunjukkan bahwa trend modernisasi yang cenderung memperluas wilayah sekularisasi dapat juga menampilkan gejala sebaliknya, yaitu gejala kebangkitan kembali (revival) agama: semakin meningkatnya jumlah orang yang aktif dan berafiliasi dengan lembaga agama, melemahnya orang-orang yang antiagama, serta meluasnya lingkup pengaruh agama ditengah masyarakat. Hanya saja seperti di jelaskannya, kebangkitan agama seperti ini pada umumnya telah menjadi “terpusat pada

manusia” (*man centered*): sekedar suatu cara untuk bias bergabung (*belonging*) secara sosial dan cara untuk merasakan kenyamanan perasaan dan “kedamaian hati” daripada cara untuk mengorientasikan hidup untuk Tuhan. Inilah sebenarnya yang dimaksud sebagai religius tanpa agama (*religionsness without religion*), religius tanpa isi dan komitmen yang sungguh-sungguh.

Merujuk pada tesis tulisan ini maka upaya membangun kerukunan umat beragama yang harmonis memang bukan merupakan agenda yang ringan. Hal ini mengingat agama lebih melibatkan aspek emosi (ikatan emosional umatnya) daripada rasio, lebih menegaskan “klaim kebenaran” (*truth claim*) daripada upaya “mencari kebenaran”. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan di lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan Rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, dan sebagainya. Hal ini mungkin disebabkan belum adanya aturan yang kuat sebagai penjabaran atas pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama sebagai pedoman bersama. Akibatnya pada tingkat tertentu persoalan ini dapat mengganggu harmoni dan kerukunan hidup umat beragama.

Penutup

Kebesaran bangsa Indonesia dengan plurakitas agama yang dimiliki selain pluralitas kesukuan yang lebih kompleks, tentunya berpeluang positif bagi pembangunan, yakni manakal pemerintah dan seluruh umat beragama memiliki kesepakatan bahwa bangsa ini pada hakekatnya bukanlah milik suatu agama tertentu, sebagaimana juga Tuhan tidak menghendaki seluruh umat manusia secara eksotrik menganut satu agama (QS. Yunus: 99).

Kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal ini antara lain, disamping mengeluarkan berbagai pedoman berkaitan dengan masalah keagamaan, juga memberi fasilitas bagi kalangan umat beragama untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama, mengadakan dakwah atau seruan keagamaan, berdialog dan bekerja sama.

KEPUSTAKAAN

Al Munawar, Said Agil Husin. (2004). Fikh Hubungan Antar Agama. Ciputat Press: Jakarta.

Berger, Peter L. (1969). A rumor of Angels, Modern Society and the Rediscovery of the Supranatural. Penguin. Mddlesex: England.

D. Henrdopuspito (1983). Sosiologi Agama. Yayasan Kanisius: Jakarta.

Herberg, Will. (1973). “Religious Revival in the United States” dalam Amitai Etzioni and Eva Etzioni – Halevi (Eds.) Social Change: Sources, Paterns and Consequences. Second edition. Basic Books. New York.

Ismail, Faisal, (2003). Paradigma Kebudayaan Islam. Titian Illahi Press: Yogyakarta.

Madjid, Nurcholish,dkk. (2000). Kehampaan Spiritual Masyarakt Modern; Respon dan transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani. Mediacita: Jakarta.

Purwasito, Andrik. (2003). Komunkasi Multikultural. Muhammadiyah University Press: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pola Adaptasi Dalam Hubungan Antaretnik Studi Deskriptif Pada Kelompok Etnik Mandailing Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai etnik atau suku bangsa dengan bermacam karakteristik yang khas dalam sistem sosial budayanya. Mendiskusikan tentang etnik, banyak hal yang dapat dibahas. Pembahasan itu dapat berupa asal-usul atau sejarah etnik, domisili etnik, adat-istiadat, agama, bahasa dan lain-lain yang berhubungan dengan sosial budayanya. Menurut Manan (1989), terdapat lebih dari 200 macam suku bangsa di Indonesia. Bahkan akan lebih banyak lagi bila dikaitkan dengan agama yang dianutnya, yang mendiami lebih dari 13.000 kepulauan Nusantara.

sebagaimana lazimnya suatu sistem sosial budaya yang tidak pernah lepas dari dukungan dan keterlibatan masyarakatnya, maka suatu komunitas kelompok etnik dalam suatu wilayah tertentu akan membentuk kebudayaannya yang sekaligus akan mewakili dan menjadi identitas keseluruhan masyarakat itu sendiri. Geertz (dalam Abdullah, 1996)

menyebutkan bahwa jika dipahami kebudayaan merupakan jaring-jaring makna yang dirajut oleh manusia, harus dipahami pula bahwa tidak semua orang dalam suatu komunitas ikut merajut jaring-jaring makna tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak semua orang dalam masyarakat itu ikut membentuk atau mendukung kebudayaan dalam komunitasnya itu. Ada tidaknya keterlibatan Individu maupun suatu kelompok dalam pembentukan atau dukungan terhadap suatu kebudayaan pada suatu masyarakat, secara nyata dapat dilihat pada masyarakat migran suatu kelompok etnik tertentu di tempatnya yang baru. Dalam posisi sebagai pendatang, patut dicermati bagaimana keterlibatan mereka dalam proses pembentukan makna kebudayaan yang ada di tempat yang baru itu. Selain itu apakah mereka secara individual maupun kelompok ikut terwakili dalam konteks pemaknaan kebudayaan yang telah ada.

Di Indonesia proses migrasi suatu kelompok etnik terjadi tidak saja didorong oleh latar belakang sosiokultural sebagaimana lazimnya budaya merantau pada kelompok etnik Minangkabau, Mandailing, Bugis, dan sebagainya. Pada kelompok etnik seperti Jawa, Bali, dan Lombok, dapat dilihat proses migrasi tersebut lebih disebabkan oleh kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Proses migrasi tersebut apapun yang melatarbelakanginya akan berpengaruh terhadap tatanan sosial budaya, baik pada kelompok etnik pendatang tersebut, maupun kelompok etnik lokal tuan rumah (*host population*). Dengan demikian tidak saja pada kelompok etnik Jawa sebagai kelompok migran terbesar di negeri ini hal tersebut patut dicermati, melainkan semua kelompok etnik yang melakukan atau mengalami proses migrasi ke suatu wilayah baru, seperti kelompok etnik Madura di Kalimantan, kelompok etnik Bugis, Buton, dan Makasar di

Maluku, etnik non pribumi (Cina), termasuk kelompok etnik Mandailing di Padang, dan sebagainya.

Kecermatan dalam memahami pola adaptasi kelompok etnik pendatang pada suatu wilayah yang baru di tengah-tengah masyarakat kelompok etnik lokal setempat sebagai tuan rumah sangat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah pembinaan yang tepat dalam upaya pelibatan mereka di dalam gerak pembangunan. Selain itu juga dapat menghindarkan konflik-konflik antar etnik. Berdasarkan konflik antar kelompok etnik yang pernah terjadi di Indonesia sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai surat kabar selama tahun 1999 hingga 2000, seperti kasus Sambas, Singkawang dan Sampit yang melibatkan etnik Madura dengan Dayak, Melayu dan Cina, kasus Ambon, antara etnik Bugis, Buton, dan Makassar yang Islam dengan Ambon (Kristen) yang kemudian berubah menjadi antara Ambon Sarane (Kristen) dan Ambon Sa'lam (Islam), kasus Medan dan Jakarta antara pribumi dan non pribumi (Cina), dan sebagainya. Berbagai konflik tersebut cenderung menghancurkan segala kemapanan tatanan kehidupan sosial budaya yang telah ada, yang dibentuk dalam jalinan kebersamaan mereka.

Kerjasama, konflik dan akomodasi merupakan tiga bentuk kemungkinan atau konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam setiap hubungan antar kelompok. Konsekuensi Itu mungkin terjadi antar, kelompok etnik yang memiliki tidak hanya ciri-ciri kelompok, identitas dan nilai-nilai budaya sendiri yang diterima oleh dan dapat dibedakan dari kelompok lain, tetapi juga jaringan interaksi sendiri yang menghasilkan kesetiakawanan kelompok. Kelompok-kelompok etnik juga memiliki kepentingan yang sama dengan atau berbeda dari kelompok lainnya, dan

memiliki jaringan kerja, baik dengan sesama kelompok maupun dengan kelompok etnik lain yang memiliki kepentingan sama.

Sebagaimana umumnya, setiap masyarakat atau komunitas itu terwujud karena keteraturan hubungan sosial antar anggotanya sebagai komponen dengan kedudukan-kedudukan serta peranan-peranan tertentu sehingga dapat terjadi kegiatan atau interaksi sosial yang berpola antar-anggota secara efektif. Dalam mewujudkan interaksi sosial yang efektif itu menurut Budhisantoso (Depdikbud, 1983) mensyaratkan setidaknya empat unsur yang diperlukan, yakni adanya pengelompokan sosial (*social alignment*), pengendalian sosial (*social controls*), media sosial (*social media*), dan norma sosial (*social standard*). Keempat unsur ini diperlukan bagi kelestarian kemapanan kehidupan sosial budaya dalam suatu masyarakat atau komunitas. Implikasinya adalah dalam interaksi sosial tersebut khususnya kelompok etnik Mandailing sebagai pendatang dan kelompok etnik lokal Minangkabau sebagai *Host Populations*, harus dan akan terjadi proses adaptasi. Adaptasi mengacu kepada proses interaksi timbal balik antara perubahan dan penyesuaian diri dengan lingkungan untuk mempertahankan kehidupan. Sehubungan dengan itu Havilland (1985) menjelaskan bahwa manusia beradaptasi melalui medium kebudayaan pada waktu mereka mengembangkan cara-cara untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan sumber daya yang mereka temukan dan juga dalam batas-batas lingkungan tempat mereka hidup. Orang yang hidup dalam lingkungan serupa cenderung saling meniru kebiasaan yang tampaknya berjalan dengan baik di lingkungan tersebut.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan pada kelompok etnik Mandailing di Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang

Selatan, Kota Padang, terdapat fenomena hasil temuan sementara yang akan penulis kembangkan secara mendalam melalui penelitian. Fenomena tersebut adalah:

1. Kawasan Pasar Gadang kendati bukan satu-satunya tempat bermukim kelompok etnik Mandailing yang ada di kota Padang, namun Pasar Gadang merupakan kawasan tempat terkonsentrasinya masyarakat kelompok etnik Mandailing dalam jumlah yang cukup banyak dan telah berlangsung cukup lama.
2. Selain itu kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang ini juga terlihat khas. Kekhasan tersebut terutama dalam hal pemakaian bahasa Mandailing dalam kehidupan sehari-hari di dalam komunitas mereka, serta lantunan musik atau lagu-lagu daerah Mandailing dari kaset ataupun CD di rumah-rumah mereka. Hal Ini menimbulkan kesan bahwa berada di lokasi ini seolah-olah tengah berada di Mandailing.
3. Kelompok etnik Mandailing memiliki perkumpulan organisasi yang didasarkan pada daerah asalnya bukan atas kesamaan marga. Perkumpulan tersebut berfungsi sebagai wahana kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan. Kegiatan tersebut bervariasi yakni berupa arisan, pengajian mingguan maupun bulanan, bahkan ada yang dilaksanakan setahun sekali pada hari raya Idul Fitri dalam bentuk halal bil halal, koperasi, dan persatuan sosial kematian. Kegiatan tersebut terakumulasi dalam bentuk paguyuban atau perkumpulan "SATAHI SAUDURAN" yang dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan "seiya sekata", dan "SEMAYANG" yang berarti satu mayang (tongkol bunga enau, kelapa, atau pinang). Harapan yang

terkandung dari pemakaian nama tersebut adalah tumbuhnya ikatan batin senasib sepenanggungan dan ikatan persaudaraan yang kuat antar sesama perantau etnik Mandailing.

4. Dari sudut pandang interaksi sosial antar kelompok etnik, kedua kelompok etnik dapat hidup berdampingan dengan baik, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat kecenderungan etnik yang mayoritas mendominasi atas etnik yang minoritas.
5. Kendati secara umum kelompok etnik Mandailing terlihat rukun berdampingan dengan kelompok etnik Minangkabau, namun pada sebagian masyarakat dalam kedua kelompok etnik tersebut masih melekat penilaian dengan stereotip negatif. Stereo negatif kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau tersebut seperti ungkapan "Padang Bengkok" yang licik, pandai berkelit dan bermanis-manis kata, serta pelit atau kikir suka berhitung. Selain itu kendati orang Minang identik dengan Islam dan falsafah "Adat Bersendi Syarak-Syarak Bersendi Kitabullah", tetapi masih senang memelihara anjing. Pagi dan sore mereka sering terlihat berjalan-jalan menuntun anjing satu sampai dua ekor dari pada berjalan-jalan menuntun anaknya. Padahal mereka tinggal di kota besar yang tidak lagi memiliki tradisi berburu. Sebaliknya kelompok etnik Minangkabau memiliki pula stereotip negatif terhadap kelompok etnik Mandailing, yakni menyebutnya sebagai sama dengan orang Batak, suka makan anjing, sebagai pemburu tanah, beragama kristen dan pantas disebut kafir, suka mabuk dan berbuat onar, tidak beradat karena emosional, bertemperamen keras dan kasar, baik dalam sikap maupun berbicara. Stereotip ini hampir sama dengan pandangan

yang berkembang pada masyarakat Sunda di Bandung terhadap orang Batak sebagaimana penelitian Bruner, E.M. (1974) terhadap para migran di kota Bandung dan Medan.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan temuan di atas, serta manfaat yang dapat diambil dari penelitian semacam ini, maka penulis menganggap betapa pentingnya melakukan penelitian yang mendalam atas fenomena adaptasi yang terjadi pada etnik Mandailing terhadap etnik Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Atas temuan dan fenomena-fenomena yang penulis paparkan tersebut, terlihat bahwa: Pertama, telah terjadi proses interaksi sosial yang relatif baik antara kelompok etnik Mandailing sebagai pendatang dan kelompok etnik lokal Minangkabau sebagai tuan rumah (*host population*), namun belum terakumulasi secara jelas dalam bentuk yang bagaimana keduanya terlibat saling mempengaruhi kebudayaannya. Kedua, karena belum jelas bagaimana keduanya terlibat saling mempengaruhi kebudayaannya, maka belum terlihat dengan jelas bagaimana strategi pola adaptasi yang terjadi pada kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik lokal Minangkabau.

Sejalan dengan hasil temuan penulis dalam penelitian pendahuluan di Kelurahan Pasa Gadang, permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini penulis fokuskan pada pertanyaan; Bagaimanakah pola adaptasi kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pola adaptasi kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan masalah kehidupan kelompok etnik dalam masyarakat yang majemuk. Dari sisi keilmuan, penelitian ini diharapkan menambah khasanah dan perbendaharaan literatur keilmuan sosial, khususnya masalah kehidupan masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok etnik dan budaya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Konseptual

1. Adaptasi

Istilah adaptasi semula digunakan dalam bidang biologi, kemudian ilmu sosial dan budaya menggunakannya untuk memahami pola penyesuaian manusia terhadap lingkungan dalam usaha melangsungkan kehidupannya. Havilland (1985) mendefinisikan adaptasi sebagai proses yang menyebabkan organisme memperoleh kecocokan yang menguntungkan dengan lingkungan yang ada, dan hasil dari proses tersebut yaitu karakteristik-karakteristik organisme yang menyebabkannya cocok dengan perangkat kondisi tertentu di mana organisme-organisme itu biasanya berada. Istilah adaptasi mengacu pada suatu proses yang menyebabkan suatu organisme berhasil menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungan yang ada. Selanjutnya Havilland (1993) juga menjelaskan bahwa proses adaptasi menghasilkan keseimbangan yang dinamis di dalam masyarakat. Perubahan dan penggantian di dalam kebudayaan terjadi sesuai dengan kebutuhan, karena individu yang membentuk masyarakat dan membangun kebudayaan selalu mengubah rencana dan cara hidupnya. Dalam proses perubahan kebudayaan, baik yang terjadi secara cepat (revolusi) maupun lambat (evolusi) akan berimplikasi kepada tuntutan bagi masyarakatnya untuk berusaha menyesuaikan diri dengan segala efek yang muncul dari proses perubahan tersebut dan menyelaraskan dengan arah perubahan yang

terjadi. Hal ini dapat dimaknai juga bahwa kendati berada dalam suatu komunitas yang sangat majemuk masing-masing individu ataupun kelompok berada pada posisi saling mengisi dan saling membutuhkan (*take and give*) di dalam kerangka adaptasi untuk dapat survive dalam lingkungannya itu. Dengan demikian adaptasi menghasilkan keseimbangan yang dinamis dalam kehidupan masyarakat.

Adimihardja (1993) mengemukakan adaptasi sebagai usaha manusia atau makhluk hidup lainnya untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan tertentu dalam mendayagunakan sumber daya untuk menanggulangi atau menghadapi masalah yang mendesak. Dalam kaitan itu Alexander Alland Jr.(dalam Havilland, 1993) mengemukakan ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan digunakannya istilah adaptasi dalam bidang studi ilmu sosial dan budaya. Pertama, istilah tersebut biasanya digunakan dalam bidang biologi kini digunakan pula untuk menjelaskan gejala psikologi dan kebudayaan dalam proses perubahan yang bersifat evolusi. Kedua, adanya ketidakjelasan pada saat kata adaptasi digunakan sebagai satu fenomena dalam menjelaskan ciri yang khusus dalam hubungannya dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Adaptasi mengacu kepada proses Interaksi timbal balik antara perubahan dan penyesuaian diri dengan lingkungan untuk mempertahankan kehidupan. Sehubungan dengan itu Havilland (1985:353) menjelaskan bahwa manusia beradaptasi melalui medium kebudayaan pada waktu mereka mengembangkan cara-cara untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan sumber daya yang mereka

temukan dan juga dalam batas-batas lingkungan tempat mereka hidup. Orang yang hidup dalam Lingkungan serupa cenderung saling meniru kebiasaan yang tampaknya berjalan dengan baik di Lingkungan tersebut. Orlove (dalam Adimihardja, 1993) mengemukakan bahwa gagasan strategi adaptasi bagi setiap Individu akan menentukan pilihan dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian setiap individu dalam menentukan alternatif pilihannya atau yang ditirunya berlaku pula dalam suatu gerak yang didorong dari kekuatan dalam sebagaimana terjadi dalam suatu proses evolusi biologis. Tujuan strategi untuk memahami di mana pilihan terbesar yang dibuat manusia dapat mempengaruhi bentuk kehidupan yang lebih luas. Dalam proses adaptasi yang terjadi dalam suatu masyarakat tersebut dapat berupa asimilasi maupun akulturasi. Tentang asimilasi, Koentjaraningrat (1980) menyebutkan bahwa asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada (i) golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, (ii) sating bergaul secara intensif untuk waktu yang lama sehingga (iii) kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah wujud dan sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang campuran. Dalam hal itu golongan-golongan minoritas itulah yang merubah sifat khas dari unsur-unsur kebudayaannya dan menyesuaikan dengan kebudayaan dari golongan mayoritas sedemikian rupa sehingga lambat laun kehilangan kepribadian kebudayaannya, dan masuk ke dalam kebudayaan mayoritas. Adapun mengenai akulturasi, Koentjaraningrat (1980) menyebutnya sebagai proses sosial yang timbul bila

suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Milton Gordon (1996) dan Melly G. Tan (1977) merinci konsep tersebut dalam tujuh macam asimilasi yang berkaitan satu sama lain, yaitu: (1) asimilasi kebudayaan/perilaku (akulturasi) yang bertalian dengan perubahan dalam pola kebudayaan guna penyesuaian diri dengan kelompok mayoritas; (2) asimilasi struktural yang bertalian dengan masuknya golongan minoritas secara besar-besaran ke dalam kelompok, perkumpulan dan pranata pada tingkat kelompok primer dari golongan mayoritas; (3) asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang bertalian dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran; (4) asimilasi Identifikasi yang bertalian dengan perasaan nasional berdasarkan mayoritas; (5) asimilasi sikap yang bertalian dengan tak adanya prasangka; (6) asimilasi perilaku dengan tak adanya diskriminasi; (7) asimilasi civic yang bertalian dengan tak adanya bentrokan sistem nilai dan kekuasaan. Perubahan kebudayaan menuntut masyarakat untuk beradaptasi agar stabil. Proses adaptasi bergantung pada perubahan yang terjadi dan akibat dari perubahan tersebut, sehingga paling tidak akan meninggalkan kebiasaan lama dan menerima kebiasaan baru. Havilland (1985) menjelaskan proses adaptasi menghasilkan keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan masyarakat dan Lingkungan. Adaptasi budaya mencakup ruang lingkup proses-

proses yang lebih luas dari pada tata kelakuan termasuk kebiasaan dan lembaga-lembaga sosial. Oleh Ogburn (dalam Soekanto, 1986) hal demikian disebut sebagai kebudayaan adaptif. Ia juga menjelaskan bahwa perubahan bagian-bagian kebudayaan tidak sama. Bagian-bagian tertentu dapat berubah lebih cepat dari bagian lainnya, sehingga perubahan pada salah satu bagian memerlukan penyesuaian kembali.

Dalam pemahaman lain kemampuan beradaptasi dapat berbeda di antara dua kelompok sosial yang memiliki tradisi kebudayaan yang sama. Hal ini terjadi karena adanya inti kebudayaan tertentu yang tidak sama di antara kedua kelompok sosial itu. Di dalam suatu kelompok sosial, inti kebudayaan tersebut mengikat elemen kebudayaan yang lebih luas. Inti kebudayaan yang mengikat tersebut erat kaitannya dengan aspek ekonomi, sistem sosial, politik, teknologi dan pola kependudukan, yang secara empiris kesemuanya itu berkaitan satu sama lainnya dalam suatu ikatan yang erat dan dengan variasi yang tidak begitu besar.

Menurut Pelly (1984), hubungan antar budaya para migran dan adaptasi terhadap budaya tuan rumah yang dominan itu dipengaruhi oleh misi budaya para perantau selain oleh budaya yang dominan itu sendiri. Dengan demikian misi budaya dapat mempengaruhi pemilihan pekerjaan dan tempat-tempat permukiman, karakter dari setiap asosiasi (organisasi paguyuban) yang didirikan oleh para perantau, dan hubungan-hubungan sosial masyarakat perantau dalam konteks kota, termasuk hubungan-hubungan dengan masyarakat tuan rumah. Dalam hipotesis kebudayaan dominan yang

dikembangkan oleh Brunner (1974), tercakup tiga unsur yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi satu sama lainnya saling berhubungan, dan menentukan corak kesukubangsaan atau produk dad hubungan antar suku bangsa yang terjadi. Unsur-unsur tersebut adalah 1) demografi sosial yang mencakup rasio populasi dan corak heterogenitas serta tingkat percampuran hubungan dl antara suku-suku bangsa yang ada dalam sebuah konteks latar tertentu, 2) kemantapan atau dominasi kebudayaan suku bangsa setempat, bila ada, dan cara-cara yang biasanya dilakukan oleh anggota-anggota kelompok-kelompok suku bangsa pendatang dalam berhubungan dengan suku bangsa setempat dan penggunaan kebudayaan masing-masing serta pengartikulasiannya, 3) keberadaan dari kekuatan sosial dan pendistribusiannya di antara berbagai kelompok suku bangsa yang hidup dalam konteks latar tersebut. Salah satu ciri utama dari ada atau tidak adanya kebudayaan dominan dalam sebuah masyarakat ialah adanya aturan-aturan main atau konvensi sosial dalam sating berhubungan. Dalam berhubungan itu keberadaannya diakui dan digunakan oleh para pelaku dari berbagai kelompok suku bangsa yang hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Dalam masyarakat dengan kebudayaan dominan, para pelaku dari kelompok-kelompok suku bangsa yang tidak dominan menyesuaikan diri dengan -dan tunduk pada aturan-aturan main yang ditetapkan oleh masyarakat setempat yang dominan. Dalam masyarakat yang tidak mengenal kebudayaan dominan, aturan-aturan main terwujud melalui tawar-menawar kekuatan sosial yang dihasilkan dari proses-proses interaksi sosial yang berlangsung dari waktu ke waktu dan

dari generasi ke generasi. Aturan main yang telah mantap akan menjadi acuan bagi perilaku yang layak dan harus ditunjukkan di tempat umum -dikontrol- oleh masyarakat setempat sebagai benar atau salah dari waktu ke waktu.

Mengacu pada pemahaman atas hipotesis kebudayaan dominan tersebut, berarti kelompok etnik Mandailing cenderung harus mengikuti aturan main yang ada atau berlaku pada kelompok etnik Minangkabau. Dalam hal ini kelompok etnik Minangkabau merupakan kelompok etnik yang memiliki kebudayaan dominan, yang memiliki konvensi-konvensi yang harus diikuti oleh para pendatang Mandailing. Sejalan dengan itu kelompok etnik Mandailing akan dan harus memiliki strategi untuk menemukan pola adaptasi agar dapat diterima oleh kelompok etnik Minangkabau.

Dalam analisis fungsionalisme struktural yang dikembangkan Talcott Parsons (dalam Ritzer,1992), masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan sating menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Konsep tersebut mengandung pengertian bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Masyarakat dalam pandangan teori fungsional struktural senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan (equilibrium). Masyarakat dilihat dalam kondisi dinamika dalam keseimbangan. Setiap peristiwa atau fakta sosial dan

setiap struktur yang ada bersifat fungsional bagi sistem sosial itu, Demikian pula semua institusi yang ada, diperlukan oleh sistem sosial itu. Herbert Gans (dalam Ritzer,1992) bahkan menilai kemiskinan pun bersifat fungsional dalam suatu sistem kemasyarakatan.

Johnson (1990), Veeger (1990), dan Ritzer (1992) menjelaskan bahwa dalam analisis fungsional struktural, struktur sosial dan tindakan manusia mencerminkan orientasi nilai dasar yang mungkin berbeda untuk setiap masyarakat dan keharusan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Keharusan Ini menimbulkan persyaratan-persyaratan fungsional yang universal, yakni Latent Pattern Maintenance (L), integration (I), Goal Attainment (G) dan Adaptation (A).

Latent Pattern Maintenance mengarahkan kepada mempertahankan keseimbangan dalam sistem yang dicirikan oleh sistem nilai yang telah dilembagakan. Pelembagaan sistem nilai merupakan keharusan fungsional utama. Integration merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interaksi antar kelompok sesuai dengan peran dan posisi masing-masing, sehingga menghasilkan komitmen ikatan emosional solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama dalam mengembangkan maupun mempertahankan sistem yang berlaku. Goal Attainment merupakan pemenuhan tujuan dan penetapan prioritas tujuan yang akan dicapai oleh sistem. Sedangkan Adaptation merupakan kemampuan sistem dalam mendistribusikan sarana yang dibutuhkan supaya dapat

bergerak. Melalui sarana dan fasilitas suatu sistem dapat menguasai lingkungannya.

Sejalan dengan konsep Parson, yang menyiratkan bahwa suatu proses atau fakta sosial merupakan rangkaian struktur sistem yang fungsional bagi fakta sosial lainnya, maka di dalam proses interaksi sosial budaya yang melibatkan dua kelompok etnik seperti dalam penelitian ini, akan memunculkan pola adaptasi dengan strategi-strategi yang berbeda. Adaptasi yang terjadi merupakan sarana yang berfungsi mendistribusikan peran anggota kelompok etnik Mandailing dalam struktur sosial budaya kelompok etnik Minangkabau. Pola dan strategi adaptasi tersebut sangat bergantung pada fungsi-fungsi sosial. Fungsi adalah akibat-akibat yang dapat diamati yang menuju adaptasi atau penyesuaian dalam suatu sistem. Selanjutnya melalui interaksi yang dalam menghasilkan-kon pola dan strategi adaptasi tersebut dilandasi oleh tujuan atau motif sosial budayanya itu akan memunculkan sistem sosial budaya yang terjaga keseimbangannya

2. Kelompok Etnik

Kelompok etnik menurut Narrol (dalam Barth,1988) pada umumnya dipahami sebagai sejumlah orang atau penduduk yang mengandung ciri-ciri ; 1) Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, 2) Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, 3) Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, 4) Menentukan ciri kelompoknya yang diterima oleh dan dapat dibedakan dan kelompok

lain. Selanjutnya Barth (1988) merumuskan kelompok etnik yang umumnya dikenal sebagai suku bangsa sebagai kelompok budaya dan bahasa, sedangkan masyarakat adalah suatu unit yang hidup terpisah dari unit lain. Suatu kelompok etnik memiliki ciri dan kebersamaan secara intern dan perbedaan secara ekstern dengan kelompok lain, tidak saja karena ia memiliki nilai-nilai budaya, tetapi juga bahasa yang khas yang menjadi identitas kelompoknya. Pengertian tersebut mengarahkan pemahaman bahwa penggunaan istilah kelompok etnik berlaku dan mengacu pada penyebutan atas suatu kelompok suku bangsa atau kelompok budaya dan bahasa tertentu pada suatu wilayah atau masyarakat tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, kelompok etnik Mandailing dan kelompok etnik Minangkabau dalam penelitian ini dapat dimaknai sebagai kelompok suku bangsa dengan kebudayaan dan bahasa yang khas sebagai identitasnya. Dengan Identitasnya itu masing-masing kelompok etnik ini akan saling mengapresiasi dan memahami kekhasan identitas kelompok etnik lainnya serta akan menjadi pendorong bagi terciptanya proses adaptasi antar kelompok etnik tersebut.

3. Kelompok Etnik Mandailing

Kelompok etnik Mandailing atau yang selama ini orang masih mengidentikkan dengan etnik Batak merantau ke Padang pada umumnya dilandasi oleh suatu kebutuhan untuk mencari pekerjaan, menambah pengalaman, dan untuk mengubah nasib atau keinginan untuk memperbaiki kehidupan. Menurut Or. Woro Ariyandini, M.A

(dalam Marpaung, 2000), falsafah hidup orang Batak itu tinggi. Beliau juga mengatakan bahwa falsafah Batak adalah Boraspati (cicak). Falsafah kehidupan yang dapat dipetik dari kehidupan Boraspati itu adalah hidup lengket di sembarang tempat. Hat ini dapat diartikan bahwa hidup menetap dengan mantap dan pasti adalah suatu kehidupan yang disenangi oleh semua orang pada semua kalangan. Orang Batak tersebar di seantero tanah air Indonesia dan dapat dikatakan pada hampir semua lapisan masyarakat. Kenyataan membuktikan bahwa orang Batak itu ada di seluruh strata, baik sosial, ekonomi, politik, birokrasi dan tiap pelosok tanah air. Mereka itu lengket menduduki posisi-posisi tersebut bagaikan Boraspati yang lengket di sembarang tempat.

Untuk menerapkan falsafah Batak yang terakumulasi dalam simbol Boraspati itu dalam kehidupan sehari-hari harus berpedoman kepada konsep Dalihan Natolu. Dalihan Natolu secara fisik terdiri atas tiga buah batu tungku yang sama besar, tinggi, dan bentuknya, serta tersusun dengan rapi dan sistematis. Penerapan ketiga tungku itu di dalam sistem kekerabatan Batak adalah tungku yang satu disebut dengan tubu (teman semarga), tungku yang satunya disebut hula-hula (pihak/jalur dari istri), tungku yang ketiga disebut boru (pihak/jalur dari suami). Ketiga-tiganya disebut raja. Ketiga raja itu harus sating bahu-membahu, dukung-mendukung, di dalam pelaksanaan sehari-hari mempunyai sikap dan cara yang berbeda dalam menggalang persatuan dan keutuhan.

Dalam pelaksanaan falsafah Batak sebagai kunci pokoknya adalah Solup. Solup artinya sejenis liter yang terbuat dari bambu,

Solup berfungsi sebagai alat takaran untuk padi atau beras. Kalau seseorang membeli beras atau padi maka yang dipakai bukan Solup pembeli tetapi Solupnya penjual. Jadi Solup pembeli tidak berlaku. Kemudian fungsi Solup itu berkembang menjadi dua, yaitu berfungsi sebagai alat takaran sebagaimana disebutkan di atas. Fungsi yang kedua adalah sebagai norma adat. Jadi kebiasaan atau adat-istiadat dan norma-norma maupun nilai di satu tempat belum tentu sama dengan di tempat yang lain. Leluhur orang Batak tahu betul karakter keras keturunannya, maka di dalam kehidupan sehari-hari apabila akan pergi merantau ke tempat orang tidak boleh membawa Solup miliknya, ia haruslah bersikap Sidapot Setup (menyesuaikan adat istiadat atau kebiasaan di tempat itu).

Dr. Keuning (dalam Abdullah,1996) menyebutkan bahwa suku Batak itu termasuk komponen-komponen berikut:

1. Batak Kara, yang menempati bagian Utara daerah kediaman orang Batak; mereka berjumlah 100.000 jiwa; di daerah mereka ini Kaban Jane dan Brastagi adalah kota-kota yang paling terkenal;
2. Batak Simelungun, dinamakan demikian menurut daerah tempat tinggalnya, yakni daerah Simelungun di sebelah Timur Laut Danau Toba; jumlah jiwanya dapat diperkirakan sekitar 275.000 orang;
3. Batak Dairi atau Batak Pakpak, suatu kelompok yang berjumlah 60.000 jiwa, yang bertempat tinggal di sebelah Barat Laut Danau Toba; mereka adalah yang paling terbelakang dalam kemajuan;

4. Batak Toba, kelompok yang terbesar, yang meliputi jumlah lebih dari 500.000 orang. Mereka bertempat tinggal di daerah yang sering disebut sebagai Pusat Tanah Batak.
5. Batak Angkola dan Sipirok, penduduk daerah-daerah senama, lebih ke Selatan, sedangkan sebagian penduduk Padang Lawas harus pula dihitung termasuk mereka. Jumlahnya antara 100.000 dan 150.000 jiwa;
6. Mandailing, penduduk Mandailing Godang dan Mandailing Julu, bagian tanah Batak yang paling ke Selatan. Jumlah mereka seluruhnya kira-kira 100.000 orang.

Selanjutnya Payung Bangun (dalam Koentjaraningrat, 1995) menyebutkan ada lima subsuku yang secara turun-temurun hidup berdampingan di punggung Pegunungan Bukit Barisan, yaitu Toba, Simalungun, Karo, Mandailing (Angkola atau Sipirok), dan Fakfak (Dairi). Antara subsuku Batak Utara, yakni Toba, Simalungun, Karo, dan Dairi, dengan subsuku Batak Selatan, yakni Mandailing, Sipirok, dan Angkola memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini terutama dalam hal religiusitas; Mandailing mendiami wilayah Tapanuli Selatan beragama Islam, dan Batak mendiami Tapanuli Utara beragama Kristen. Kelompok etnik Mandailing yang mayoritas Islam walaupun secara definitif dapat dikatakan pada awalnya adalah satu suku bangsa, namun pada perkembangannya selanjutnya sangat enggan untuk disebut sebagai suku Batak. Perbedaan antar keduanya oleh Abdullah (1996) disebutkan karena pengalaman historis serta jenis dan intensitas pengaruh luar yang

berlainan. Kelompok etnik Mandailing lebih terpusat di wilayah Selatan yang berdekatan dengan Minangkabau, dan mendapat pengaruh kebudayaan Minangkabau.

Berdasarkan perkembangan tersebut maka sangat dimungkinkan jika antara kelompok etnik Mandailing dan Minangkabau memiliki beberapa persamaan. Salah satunya adalah dalam bahasa. Pada beberapa kosa kata bahasa Mandailing agaknya memiliki padanan kata dengan bahasa Minangkabau, seperti kata Indonesia /ikat/, dalam bahasa Mandailing /mangobet/ memiliki padanan kata dalam bahasa Minangkabau /mengebek/ dari asal kata /kebek/. Demikian pula kata /sobar/ yang sepadan dengan /saba/ yang berarti sabar, /karotes/ sepadan dengan /karateh/ yang berarti kertas, kata /saraor/ sepadan dengan /sarawa/ yang berarti celana, kata sapaan /etek/ yang berarti bibi, dan sebagainya.

Walaupun dekat dengan daerah Minangkabau, di Mandailing sistem kekerabatan yang menentukan arah dalam kehidupan masyarakatnya bersifat patrilineal. Struktur sistem kekerabatan masyarakat Batak maupun Minangkabau menurut Abdullah (1996) berasal dari sistem unilateral, yang pada orang Batak aspek patrilinealnya sangat kuat, hampir semata-mata menonjolkan kebalikan dari yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, yang segala sesuatunya ditentukan dari sistem kekerabatan matrilineal. Dengan demikian kelompok etnik Mandailing mengenal marga itu sebagai kesatuan eksogam yang patrilineal.

4. Etnik Minangkabau

Etnik Minangkabau merupakan suku bangsa asli yang hidup dan berkembang di Sumatera Barat. Etnik Minangkabau yang identik dengan sebulan lain sebagai; suku Minang atau orang Padang, menganut sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini garis keturunan diwariskan melalui garis Ibu. Selain kuat memegang ajaran adat istiadatnya, masyarakat Minangkabau juga teguh dalam melaksanakan ajaran agama Islam. Pepatah adatnya mengatakan "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah". Hakimy (1978) menyebutkan bahwa wilayah Minangkabau terdiri atas dua pola, yakni darek (darat) dan pesisir (rantau), yang secara historis terbentuk dari perpaduan beberapa suku bangsa, terutama di daerah rantau yang menjadi pusat perekonomian. Kedudukan daerah rantau yang menjadi pusat perekonomian-an tentunya menjadikan daerah tersebut banyak dimasuki oleh berbagai kelompok etnik pendatang.

Dalam perspektif kelompok etnik Minangkabau, menurut Navis (1984) setiap orang dari manapun asalnya dapat menetap di wilayah Minangkabau terutama di wilayah rantau, karena "rantau" merupakan wilayah kolonisasi raja yang menjadi daerah kegiatan perekonomian, khususnya perdagangan, sehingga banyak berhubungan dengan orang asing dan dengan sendirinya banyak orang asing yang menetap di wilayah itu. Sejalan dengan itu, Chandra (2000) menyebutkan bahwa orang-orang yang datang dapat di-terima secara utuh sebagaimana layaknya penduduk asli, baik secara individual maupun kelompok, tanpa melalui proses asimilasi.

Hal ini menunjukkan bahwa kelompok etnik Minangkabau bersifat terbuka, baik dalam interaksi sosial, integrasi, asimilasi, maupun proses sosial lainnya. Itulah sebabnya, di Sumatera Barat banyak dijumpai berbagai kelompok etnik, seperti Mandailing, Jawa, Aceh, Arab, Cina, Keling (India), Nias, Bugis, dan sebagainya.

Orang Minangkabau menyebut masyarakat dengan istilah Alam Minangkabau, dan menyebut kebudayaannya sebagai Adat Minangkabau. Penyebaran yang demikian merupakan perwujudan dari falsafah hidup yang dianut masyarakat Minangkabau, yakni "Alam Takambang Jadi Guru" atau alam berkembang jadi guru. Kandungan falsafah ini menunjukkan bahwa orang Minangkabau melihat diri (atau masyarakat) mereka sebagai sebagian dari alam, sehingga hukum-hukum alam yang ada juga berlaku bagi masyarakat (alam) Minangkabau.

5. Migrasi Kelompok Etnik Mandailing

Migrasi kelompok etnik Mandailing ke Sumatera Barat tidak terlepas dari perjalanan sejarah kelompok etnik Mandailing pasca ekspansi Pasukan Paderi di bawah komando Hulubalang Tuanku Rao dan Tuanku Tambusai pada tahun 1820-1836. Pelly (1984) menyebutkan bahwa perjalanan panjang Tuanku Tambusai yang berperang melawan Belanda melintasi Bukit Barisan (Mandailing-Angkola - Padang tawas atau Padang Bolak - Kota Pinang, kemudian telah dipandang sebagai bagian penting dari sejarah migrasi orang Mandailing. Jalur itu kemudian dipakai oleh orang Mandailing sebagai jalur pertama perantauan ke Sumatera Timur.

Implikasi dari adanya jalur pelarian Tuanku Tambusai ke daerah di Sumatera Timur yang selanjutnya menjadi jalur migrasi pertama orang Mandailing ke Sumatera Timur ini adalah munculnya jalur perjalanan migrasi kelompok etnik Mandailing ke Sumatera Barat berdasarkan jalur kedatangan pasukan Paderi tersebut.

Setelah terusirnya Paderi oleh Belanda pada tahun 1838, di Mandailing banyak berdiri sekolah umum yang guru-gurunya didatangkan dari Minangkabau. Selain itu juga berkembang sekolah-sekolah Islam yang dipimpin dan dikelola oleh ulama-ulama dari Minangkabau. Hal ini mengingat Sumatera Barat saat itu sudah menjadi pusat pendidikan modern di Sumatera (Noer, dalam Pelly 1984). Sementara perdagangan dan komunikasi berkembang antara Mandailing dan Minangkabau, banyak pelajar Mandailing yang sudah tulus di kampung halaman melanjutkan pelajaran mereka ke Minangkabau (Pelly, 1984). Pendidikan semacam ini sangat dibutuhkan oleh orang Mandailing untuk mengisi jabatan-jabatan formal di Kuria-kuria (pemerintahan desa) yang diperbaharui dan diberi gaji oleh Belanda.

Mengacu pada peristiwa tersebut, tampak bahwa migrasi kelompok etnik Mandailing ke Sumatera Barat saat itu baru sebatas pada kebutuhan akan pendidikan. Dalam perkembangannya lebih lanjut mungkin mereka menyadari bahwa persaingan dan peluang untuk menjadi pejabat pemerintah yang digaji Belanda semakin tinggi dan sempit, sehingga membuat mereka memutuskan keluar dari kampung halamannya dan merantau ke Minangkabau, yang saat

itu dikenal telah lebih maju dan ramai dari pada Mandailing maupun Sumatera Timur.

Sebagai subetnik Batak, tradisi merantau kelompok etnik Mandailing tidak dapat dipisahkan dari tradisi migrasi kelompok etnik Batak. Dalam tradisi masyarakat kelompok etnik Batak, merantau merupakan salah satu konsep yang telah mendarah daging dalam perilaku pemuda Batak. Menurut Cunningham (dalam Nairn, 1934) semenjak dulunya di kalangan pemuda Batak telah dikenal tradisi marjajo, yang dapat diartikan; pergi dari kampung sambit mencari kerja. Selain itu menurut Vergouwen (dalam Pelly, 1984) pola merantau orang Batak sekaligus berfungsi sebagai perluasan teritorial. Mereka menempati tanah baru dan menguasanya untuk mendirikan kerajaan pribadi (sahala hara-joan) sebagai bagian dari "kerajaan Batak". Anak-artak keturunan mereka dan tanah dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan yang mereka anggap sebagai simbol dari harga diri (sahala hasongopon) yang diperoleh dari kerajaan pribadi (sahala harajoan). Oleh karena itu orang Mandailing bermigrasi dengan motto; "carilah anak, carilah tanah" (halului 1984). Menurut Kramer (dalam Pelly, 1984), kompleks "harga diri" ini menggerakkan suku Batak merantau untuk mendirikan kerajaan-kerajaan (harajoan-harajoan) baru. Kemudian kompleks "harga diri" ini juga ditafsirkan sebagai keinginan untuk menjadi yang menang (monang) atau "nomor satu".

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Sejauh yang penulis ketahui dan berhasil penulis telusuri, kajian pustaka yang relevan dengan penelitian ini antara lain dilakukan oleh Parsudi Suparlan (1972), Sya'roni (2000), Usman Pelly (1984), Efriyenti (1989), dan Samsir (2000).

Dalam tesisnya yang meneliti etnik Jawa di tengah-tengah masyarakat Kota Bandung, Suparlan (1972) menemukan bahwa orang-orang suku Jawa di Bandung untuk dapat diterima dan beradaptasi dengan kelompok etnik Sunda sebagai pemilik kebudayaan dominan, dengan berusaha menjadi orang Sunda. Hal tersebut tampak dari usaha orang-orang Jawa dalam menguasai dan menjadi mahir berbahasa Sunda. Selain itu juga ikut terlibat dalam berbagai peran di dalam struktur sosial masyarakat Sunda. Inti dari penelitian ini adalah adanya upaya adaptasi dari masyarakat kelompok kebudayaan bukan dominan untuk tunduk dan mengikuti sistem sosial budaya masyarakat dengan kebudayaan dominant Adapun dalam analisisnya tentang Interaksi Sosial Antar-Kelompok Etnik di Keturunan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan, Sya'roni (2000) menemukan bahwa dalam proses interaksi sosial antar kelompok etnik dapat bergaul dengan baik atau dapat merupakan sifat negatif yang dimiliki oleh kelompok etnik lain dan berinteraksi menjadi masyarakat Indonesia. Juga dinyatakan bahwa kelompok etnik merantau disebabkan oleh motivasi ekonomi yang setiap kelompok etnik itu mempunyai ikatan-ikatan kelompok yang didasarkan atas kabupaten, kecamatan, dan suku.

Sementara Pelly (1994) yang meneliti kelompok etnik Minangkabau dan Mandailing di Kota Medan, menunjukkan bahwa

adaptasi perantau dengan budaya dan masyarakat tuan rumah (*host population*) dihadapkan pada keputusan-keputusan dari para perantau untuk melakukan penyesuaian budaya atau tidak, yang sangat dipengaruhi oleh misi budaya mereka. Keputusan untuk merantau permanen atau kembali dari perantauan mungkin merupakan pilihan-pilihan penting yang ditawarkan oleh suatu misi budaya, dan keberhasilan atau kegagalan para perantau bisa dinilai dengan mengacu pada misi budaya tersebut. Lebih jauh studi tersebut juga memperlihatkan bagaimana misi-misi budaya dari berbagai kelompok etnik bisa mempengaruhi pilihan-pilihan perantau atas pekerjaan, pemukiman, jenis-jenis asosiasi sukarela, dan hubungan-hubungan politis dengan tuan rumah.

Dalam Makalahnya yang berjudul "Keserasian Manusia Pendatang dengan Lingkungan Tujuan" pada Seminar Nasional Membangkitkan Budaya Kepeloporan dalam Mobilitas Penduduk, Pelly (dalam Ahmad, 1997) menyatakan bahwa ada tiga faktor utama yang menjadi keunggulan para migran. Pertama, karena pada dirinya melekat motivasi dan panggilan cultural yang kuat. Kedua, dia merasa terpilih (*selected*) dari penduduk lainnya untuk bermigrasi. Ketiga, saluran (*channel*) migrasi biasanya memakai saluran kekeluargaan (famili, orang sekampung, atau kenalan dekat). Para migran akan segera mendapat penampungan sementara di kota-kota atau daerah yang dituju. Perbedaan krido (panggilan batin) dan misi budaya tersebut akan membedakan pola adaptasi dan usaha untuk mendapatkan keserasian para pendatang dengan lingkungan tujuannya. Strategi adaptasi adalah cara-cara yang dipergunakan pendatang untuk mengatasi rintangan-

rintangan yang mereka hadapi dan untuk memperoleh suatu keseimbangan yang positif dari kondisi-kondisi latar belakang lingkungan tujuan.

Sikap kelompok etnik Minangkabau sendiri sebagai kelompok etnik tuan rumah bagi kelompok etnik pendatang Nias, seperti terungkap dalam penelitian Eriyenti (1989) dan Syamsir (2000), bahwa masyarakat Minangkabau senantiasa menunjukkan superioritasnya dengan menganggap kebudayaan, agama, dan adat-istiadat mereka lebih tinggi dibanding dengan kelompok etnik Nias. Kemunculan sikap semacam itu tidak hanya sebagai pertimbangan (balasan) atas kecenderungan sikap *in group feelings* yang kuat Pada kelompok etnik Nias, tetapi juga didukung oleh perbedaan agama, bahasa, dan adat-istiadat kedua kelompok tersebut. Syamsir (2000) bahkan menyatakan bahwa hubungan kelompok etnik Minangkabau dengan kelompok etnik Nias tidak berlangsung harmonis dan cenderung mengandung konflik potensial. Konflik potensial yang terjadi selama ini lebih banyak disebabkan oleh sikap *prejudice* dari masing-masing pihak terhadap kelompok lainnya serta perilaku diskriminatif, terutama dari kelompok etnik Minangkabau.

Kajian-kajian tersebut menyiratkan bahwa motivasi atau misi budaya yang melatarbelakangi kelompok etnik pendatang ke daerah tujuan akan turut mempengaruhi pola adaptasi kelompok etnik tersebut terhadap kebudayaan kelompok etnik pribumi. Selain itu terdapat kecenderungan kelompok etnik pribumi yang mayoritas untuk menunjukkan sikap superioritasnya terhadap kelompok etnik minoritas.

Pada sisi lain perbedaan agama cenderung menjadi faktor pemicu ketidakharmonisan antar kelompok etnik dalam berinteraksi sosial.

Dengan memperhatikan kajian-kajian tersebut, maka penelitian ini akan melihat perilaku dalam hubungan antar etnik yang memiliki karakteristik budaya sangat berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam religiusitasnya. Perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku interaksi sosial kelompok etnik Mandailing dalam rangka membentuk pola adaptasi terhadap kelompok etnik pribumi Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang, Kota Padang.

C. Kerangka Pemikiran

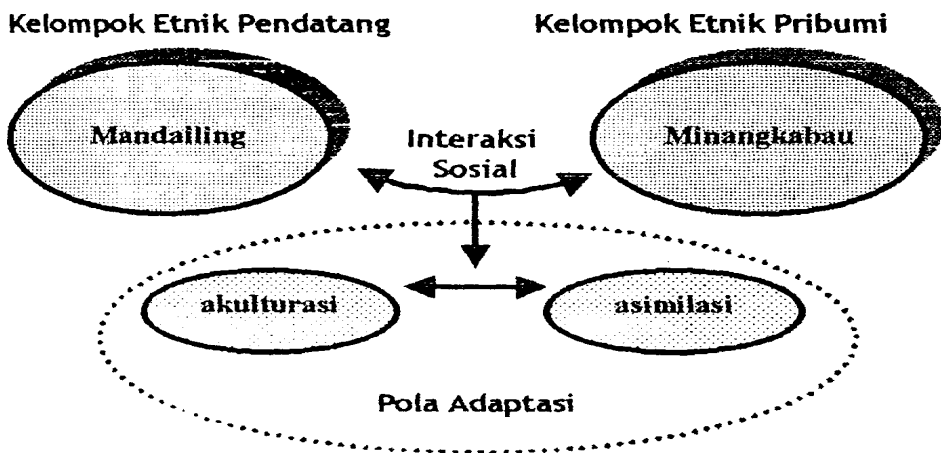
Penelitian tentang interaksi sosial pada suatu masyarakat tertentu, khususnya pada suatu kelompok etnik yang terdapat di dalamnya akan turut membantu pemahaman kita tentang kelompok etnik tersebut, baik kehidupan sosial maupun budayanya. Salah satu aspek interaksi sosial yang muncul dalam pertemuan dua kelompok etnik yang berbeda adalah adanya proses adaptasi. Istilah adaptasi mengacu pada suatu proses yang menyebabkan suatu organisme berhasil menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungan yang ada.

Implikasinya adalah migrasi kelompok etnik Mandailing ke wilayah Sumatera Barat akan berhadapan dengan kelompok etnik pribumi Minangkabau, dengan konsekuensi terjadi benturan segala tatanan aspek sosial budaya pada masing-masing kelompok tersebut, termasuk dalam perbedaan yang sangat menonjol antara patrilineal dan matrilineal. Dalam kondisi sosial seperti itulah proses adaptasi akan muncul sekaligus mengarahkan kelompok etnik minoritas pada

kemungkinan mengalami proses asimilasi ataupun akulturasi terhadap kelompok etnik mayoritas. Berkaitan dengan proses tersebut akan tercipta pula strategi yang digunakan dalam membentuk pola adaptasi. Strategi-strategi adaptasi tentunya tidak hanya ditentukan oleh kesediaan atau keengganan masyarakat Minangkabau untuk menerima para perantau kelompok etnik Mandailing dan mengizinkan mereka ikut menikmati sumber daya-sumber daya daerah dan berperan dalam pemerintahannya, melainkan mencakup juga bagaimana upaya-upaya dalam perspektif sosial budaya kelompok etnik Mandailing terhadap lingkungan sosial budaya Minangkabau.

Uraian kerangka pemikiran tersebut secara sederhana dapat penulis ungkapkan dalam gambar 1.

Gb.1. Proses Adaptasi Antar kelompok Etnik



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Latar, Entri, dan Kehadiran Peneliti

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada karakteristik yang terdapat di Pasar Gadang, yakni sebagai salah satu daerah di Kota Padang yang banyak didiami oleh masyarakat kelompok etnik Mandailing.

Dengan luas 0,23 Km², Kelurahan Pasar Gadang dihuni oleh 7435 jiwa dari 1503 KK. Wilayah yang termasuk kota lama ini dahulunya merupakan salah satu pusat perdagangan (pasar) yang ramai sebelum adanya kawasan Pasar Raya yang sekarang kita kenal. Dalam catatan sejarah kota Padang disebutkan bahwa Pasar Gadang didirikan pada tahun 1905 sebagai perluasan dari Pasar Baru di kawasan Pasar Mudik. (Sofwan, 1987). Sebagai kawasan perekonomian yang cukup ramai pada masa itu menjadi-kan Pasar Gadang sebagai daerah tujuan bagi kaum pendatang sehingga masyarakatnya bersifat heterogen. Keberagaman kelompok etnik yang mendiami Pasar Gadang selain kelompok etnik tuan rumah Minangkabau, adalah kelompok etnik Mandailing, Nias, Batak, Jawa, dan Cina.

Kelompok etnik Mandailing di Kelurahan Pasar Gadang berasal dari Kabupaten Madina (Mandailing Natal). Mereka menempati kawasan sebelah kanan Sungai Batang Arau atau di sepanjang

jalan Pasar Hilir dan Pasar Mudik (lazim disebut Pasar Hilir saja). Pada perkembangan selanjutnya mereka menyebar ke daerah-daerah lain di dalam kawasan kota Padang dan sekitarnya termasuk daerah pinggiran kota; seperti di Desa Buayan Lubuk Alung, Parak Gadang, Lubuk Lintah, Nanggalo dan sebagainya. Usaha yang mereka lakukan dewasa ini umumnya berdagang rempah-rempah seperti kulit kayu manis, pinang, pala, cengkeh, jahe, bawang, dan sebagainya, serta menjadi distributor semen. Sedangkan yang lainnya adalah sebagai kuli angkut dan bongkar muat, supir mobil angkutan kota, truk, dan bus, serta sedikit sekali pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil. Mengenai profesi supir bus, hal ini berkaitan dengan adanya Stasiun bus ALS di lokasi tersebut. Sedangkan profesi kuli angkut dan bongkar muat berkaitan dengan kondisi Pasar Gadang yang setiap hari selalu ramai dengan kehadiran mobil-mobil truk besar yang mengangkut rempah-rempah dan semen.

2. Entri Penelitian

Untuk memperoleh data penelitian tentang pola adaptasi kelompok etnik Mandailing seperti yang diharapkan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menghilangkan aspek-aspek formal selama peneliti berinteraksi di tengah-tengah mereka. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan posisi rangkap; sebagai peneliti sekaligus sebagai anggota kelompok etnik Mandailing. Dengan demikian peneliti dapat dengan mudah untuk masuk dan mengetahui situasi sosial yang ada, serta memahami komunikasi yang

menggunakan bahasa daerah kelompok etnik tersebut. Selanjutnya untuk keperluan izin, penelitian ini telah melalui proses perizinan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (dahulu bernama Kantor Sosial Politik) Pemerintah Kota Padang, Kantor Kecamatan Padang Selatan, dan Kantor Kelurahan Pasar Gadang.

3. Kehadiran Peneliti

Penelitian yang studi pendahulunya dilakukan pada bulan Maret hingga Mei 2001 ini dilakukan selama September hingga Desember 2001. Mengingat selama bulan Ramadhan (17 Nopember - 17 Desember 2001) tidak banyak yang dapat penulis lakukan di lapangan dan menyebabkan data penelitian kurang memadai, maka peneliti menambah waktu penelitian hingga Januari 2002.

B. Alasan Penggunaan Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan yang bersandar pada paradigma yang berurusan dengan pemerian dan pemahaman terhadap penemuan gejala-gejala dalam suatu realitas konteks sosial budayanya (empirik). Dengan mengacu kepada paradigma tersebut, maka pengertian tentang pola adaptasi dalam hubungan antar etnik yang terjadi pada kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang ini sangat relevan dengan bentuk kajian penelitian kualitatif.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumentasi.

1. Observasi

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan secara *moderate participant observation*. Artinya keterlibatan peneliti dalam aktivitas subjek penelitian bersifat terbatas. Kegiatan observasi yang peneliti lakukan adalah dengan melihat dan mengamati aktivitas sosial sehari-hari masyarakat kelompok etnik Mandailing dan Minangkabau di Pasar Gadang. Selain itu juga mengikuti dan mencari informasi melalui pertemuan-pertemuan bulanan pada tiap minggu pertama yang diselenggarakan oleh perkumpulan kelompok etnik Mandailing "Parsadaan Satahi Sauduran", baik yang diselenggarakan di Pasar Gadang maupun di daerah lainnya di dalam kota Padang. Hal ini dilakukan mengingat masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang pada umumnya juga anggota perkumpulan tersebut.

Kegiatan yang menjadi salah satu media pengamatan sekaligus tempat mendapatkan informasi secara langsung dan bersifat nonformal tersebut adalah arisan bulanan yang diadakan pada hari Minggu, 2 September 2001 di Parak Gadang, dan pada hari Minggu 4 Nopember 2001 di Pasar Hilir - Pasar Gadang. Adapun acara buka bersama "Parsadaan Satahi Sauduran" yang dilanjutkan dengan pengajian dan shalat tarawih berjama'ah yang peneliti ikuti adalah pada malam Minggu; 2 Desember 2001 di Jalan Pisang - Purus Kebun. Selanjutnya peneliti juga memanfaatkan acara Halal bil Halal yang diadakan di

Pantai Caroline Padang pada hari Minggu, 6 Januari 2002 untuk memperoleh informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Untuk memperoleh data yang memadai tentang pola adaptasi kelompok etnik Mandailing ini peneliti juga menggunakan metode wawancara. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat, terutama tentang konsep ide, pemikiran yang berkaitan dengan pemahaman budaya maupun stereotip kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau ataupun sebaliknya. Wawancara yang penulis lakukan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, artinya penulis tidak menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun, tetapi berdasarkan pertanyaan yang dapat dikembangkan menurut situasi dan kondisi pada saat wawancara berlangsung dengan tetap mengacu kepada topik permasalahan yang dikaji. Untuk itu wawancara yang penulis lakukan adalah secara nonformal di tempat-tempat yang tidak resmi, seperti di rumah informan, di pinggir jalan dan di dalam warung makan di kawasan Pasar Hilir, di toko pembuat sepatu di jalan Pasar Malintang Pasar Gadang, dan dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh perkumpulan "Parsadaan Satahi Sauduran".

Mengingat wawancara tersebut berlangsung secara non-formal sehingga sangat memungkinkan seorang informan dalam memberikan jawaban atau bercerita menjadi tidak berkaitan dengan topik pembicaraan dan mempengaruhi konsentrasi peneliti dalam

melakukan wawancara, peneliti membuat draft yang memuat inti permasalahan yang ditanyakan kepada informan (terlampir).

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan data yang bersifat administratif, geografis, monografi daerah, dan historis Kelurahan Pasar Gadang, serta kondisi sosial budaya yang berkaitan dengan proses adaptasi antar kelompok etnik Mandailing di Kelurahan Pasar Gadang. Berkaitan dengan upaya ini, beberapa buku yang berkaitan dengan sejarah Kota Padang di Perpustakaan Nasional Propinsi Sumatera Barat dan Museum Sumatera Barat menjadi sumber bagi pengadaan bahan referensi penelitian. Buku-buku tersebut adalah; buku Sejarah Kota Padang, karya Mardanas Sofwan dkk.; Padang Riwayatmu Dulu, karya Rusli Amran, ; Menyingkap Riwayat dan Pesona Kota Padang Lama yang Tersisa, karya W. Anwar Falah dkk.; dan buku Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, karya H. Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu.

D. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat kelompok etnik Mandailing dan masyarakat kelompok etnik Minangkabau yang menetap di Kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Untuk menghindari pemberian informasi data yang tidak akurat, penulis mensyaratkan informan pada kriteria:

1. Sehat fisik maupun mental.

2. Memahami dengan baik kondisi sosial dan kebudayaan masyarakatnya.
3. Merupakan penduduk Pasar Gadang yang menetap, bukan pendatang yang berpindah-pindah.

Penentuan informan pertama langsung ditujukan kepada anggota masyarakat Pasar Gadang secara bebas. Inisiatif ini dilakukan mengingat selain ketaatan lurah beserta stafnya merupakan pegawai mutasi yang baru sebulan menjabat dan bekerja di wilayah tersebut, mereka pun bukan penduduk Pasar Gadang. Kemudian dari informan pertama tersebut terus berlanjut ke berbagai informan lainnya sebagaimana teknik *sampd bola salju*. Informan kunci atau informan utama dalam penelitian ini adalah masyarakat kelompok etnik Mandailing dan Minangkabau yang mengetahui betul seluk-beluk kondisi Pasar Gadang, dan seluk-beluk keberadaan mereka beserta teluhurnya di Pasar Gadang. Informan dari kelompok etnik Mandailing dalam penelitian ini terdiri dari golongan keluarga yang berbeda, yakni keluarga yang kaya, miskin atau sederhana, lama, baru, asli, dan campuran. Hal ini dengan asumsi bahwa pada masing-masing bentuk keluarga tersebut akan berbeda perilaku adaptifnya, sehingga akan berbeda strategi dan pola adaptasi yang ditempuhnya.

E. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk proses pemilihan, pengeditan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Selanjutnya data yang merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk matrik. Format matrik merupakan abstraksi atau penyederhanaan dari data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Penyusunan matrik beserta penentuan data kasar yang harus masuk di dalamnya serta pengkodean ditakukan berdasarkan situs (kasus) atau topik bahasan. Selanjutnya dari data yang terdapat di dalam matrik tersebut dilakukan penarikan kesimpulan yang dideskripsikan secara naratif. Matrik dalam penelitian ini penulis modifikasi sesuai dengan kebutuhan, Model matrik tersebut adalah:

1. Matrik Konteks Peristiwa

Dalam hal ini isi matrik berupa konteks yang menggambarkan peristiwa adaptasi kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau. Acuan dalam menyusun matrik ini adalah peran dan keterlibatan kelompok etnik Mandailing dalam interaksi sosial budaya dengan kelompok etnik Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang.

2. Matrik Daftar Cek (checklist matrix)

Merupakan matrik yang dipakai untuk memantau komponen atau dimensi penelitian. Isi matrik hanyalah tanda-tanda singkat untuk mengetahui apakah data tentang pola adaptasi kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang dari masing-masing informan ada atau tidak beserta keterangannya.

3. Matrik Tata Waktu

Merupakan matrik yang berisi deskripsi perkembangan antar waktu termasuk deskripsi verbal tentang kondisi yang terjadi pada waktu itu. Dalam hal ini isi matrik berupa informasi tentang kecenderungan atas perkembangan kondisi pola adaptasi kelompok etnik Mandailing di Kelurahan Pasar Gadang beserta interpretasi peneliti.

4. Matrik Tata Peran

Merupakan matrik yang berisi deskripsi gugusan pemeran (informan) tertentu yang merefleksikan pandangan-pandangan mereka tentang adaptasi. Dalam hal ini matrik menyajikan ilustrasi konsep informan tentang proses adaptasi di Pasar Gadang.

5. Matrik Kelompok Konseptual

Merupakan matrik yang mendeskripsikan motif yang melatar-belakangi pandangan dan sikap para informan atas komponen penelitian dan kaitannya dengan pola adaptasi yang terjadi di Kelurahan Pasar Gadang.

6. Matrik Pengaruh

Merupakan matrik yang mendeskripsikan pengaruh tangsung maupun tak tangsung atas komponen atau dimensi penelitian berdasarkan kecenderungan-kecenderungan yang terjadi.

7. Matrik Dinamika Lokasi

Merupakan matrik yang mendeskripsikan tentang efek sosial budaya yang ditimbulkan oleh proses adaptasi antar kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang. Dalam hal ini matrik berisi ilustrasi tentang dilema dan

permasalahannya atas komponen pola adaptasi di Pasar Gadang, serta perilaku atau sikap yang muncul beserta pemecahannya.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini penulis upayakan dengan melakukan:

1. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam memahami perilaku dan fenomena yang terjadi pada masyarakat kelompok etnik Mandailing di Kelurahan Pasar Gadang. Untuk hal ini peneliti menambah waktu penelitian, sehingga penelitian yang sedianya berlangsung sejak September hingga Desember 2001, menjadi September 2001 hingga Januari 2002.
2. Melakukan pengamatan yang tekun. Hal ini dilakukan karena informasi dari aktor-aktor itu perlu ditinjau kembali secara silang untuk memperoleh informasi yang sah. Untuk itu peneliti mengunjungi lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan selama 2 kali dalam seminggu, dan dua hari lainnya dipergunakan secara khusus melakukan dialog atau wawancara dengan informan. Selain itu juga dengan memanfaatkan pertemuan-pertemuan nonformal perkumpulan "Parsadaan Satahi Sauduran".
3. Melakukan triangulasi, yaitu mengecek keterpercayaan data dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi, metode dan teori-teori. Dalam hal ini peneliti melakukan cek silang antar informan dengan mengkonfirmasi hasil temuan untuk mendapatkan kepastian. Selain itu juga dengan memanfaatkan sumber-sumber referensi yang ada.

4. Bertanya dengan rekan-rekan yang topik penelitiannya hampir serupa untuk mendapat masukan yang membantu kesempurnaan penelitian.
5. Melakukan pengecekan data secara teliti.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Pasar Gadang

1. Asal-Usul Pasar Gadang dan Kehadiran Kelompok Etnik Mandailing

Kelurahan Pasar Gadang merupakan salah satu kampung tua di kota Padang lama. Amran (1986), Sofwan (1987) dan Falah (2000), menyebutkan bahwa hingga akhir abad ke 18 wilayah kota Padang hanya di sekitar muara Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Gadang atau Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Air, Ranah Binuang, Alang Lawas, Patinggam, dan Seberang Padang. Dalam perkembangan selanjutnya, kawasan Pasar Mudik, Palinggam dan Pemancungan ini termasuk ke dalam wilayah Pasar Gadang.

Pasar Gadang juga dikenal sebagai salah satu pasar tua yang menjadi pusat perekonomian di kota Padang lama. Dalam sejarahnya Pasar Gadang oleh Falah (2000) bahkan disebutkan sebagai pasar yang pertama di kota Padang lama. Pasar Gadang atau sering disebut Pasar Hilir yang terletak di sisi kanan Batang Arau ini didirikan pada tahun 1905 dan merupakan pasar milik pribumi yang diketola oleh Kantor Perniagaan Badu Ataf Co.

Pasar ini merupakan perpindahan dari Pasar Baru yang hanya berjarak 750 m di sebelahnya dan menjadi pusat grosir kain batik

dan kain lainnya serta barang kelontong. Pasar Ini dinamai Pasar Gadang karena berada di bawah pohon gadang atau pohon besar.

Sarana transportasi yang sangat mendukung perniagaan di Pasar Gadang saat itu adalah Muara Batang Arau atau lebih dikenal Muaro Padang. Karena ombakdt sekeliting Gunung Padang sangat besar dan dermaga di Muaro Padang tidak cukup untuk kapal-kapal besar, maka kapal-kapal besar dari Pulau Jawa yang membawa barang-barang niaga, seperti kain batik, barang kelontong, dan sebagainya itu kemudian merapat di dermaga Pulau Pisang Gadang. Dari pulau ini barang-barang tersebut selanjutnya dibawa dengan perahu dan kapal kecil ke dermaga Muaro Padang. Sarana transportasi lain yang turut mendukung ramainya kawasan Pasar Gadang tempo dulu adalah transportasi kereta api. Kereta api tersebut menurut catatan sejarah perkeretaapian Sumatera Barat (Falah, 2000) merupakan lintas cabang Padang - Pulau Air, sepanjang 4,7 Km yang dibangun untuk menghubungkan pusat kota dengan pelabuhan kapal kecil di kawasan Muaro (Batang Arau) pantai kota Padang. Lintasan yang dibangun antara tahun 1887 - 1888 itu kini sudah tidak dioperasikan lagi, namun sisa-sisa jalurnya (rel) masih terlihat melintang membelah jalan Pasar HHir dan sekaligus menjadi pembatas antara jalan Pasar Hilir dan jalan Pasar Mudik.

Kawasan Pasar Gadang sebagai bagian dari wilayah Kota Padang sebagaimana perspektif masyarakat Minangkabau merupakan daerah rantau atau pesisir, lawan dari daerah darek atau daratan di pedalaman. Adanya istilah daerah rantau tentunya

berimplikasi pada pemahaman bahwa semua penduduk Pasar Gadang merupakan para pendatang dari daerah lain, baik itu kelompok etnik Minangkabau sendiri maupun kelompok etnik lain dari daerah-daerah di luar Sumatera Barat. Kapan Pasar Gadang mulai dihuni oleh para pendatang baik yang berasal dari daerah pedalaman Minangkabau sendiri maupun daerah-daerah lain di luar Minangkabau tidak dapat diketahui secara pasti. Namun bila mengacu kepada catatan sejarah Kota Padang (Sofwan, 1987 dan Amran, 1986), maka migrasi tersebut dapat diperkirakan berlangsung sekitar akhir abad 18, dan yang mula-mula datang berasal dari Kubung XIII daerah Sotok-Selayo, dan Luhak Agam. Sedangkan kedatangan kelompok etnik Mandailing diperkirakan terjadi tidak jauh dari masa itu juga. Hat ini dengan perhitungan bahwa pada tanggal 22 September 1829 De Stuers, seorang penguasa Belanda saat itu membuat keputusan bahwa siapa membuka tanah, dia menjadi pemilik yang sah, sehingga masyarakat termasuk masyarakat pendatang yang enggan dan takut untuk membuka tanah di sekeliling kota Padang mendapat insentif membuka dan memiliki tanah di Pasar Gadang. Sebelumnya tanah-tanah yang masih berupa hutan dan rawa tersebut diktaim sebagai hak milik para pendatang Minangkabau, yakni; sebelah Utara Batang Arau milik pendatang Minangkabau dari laras Bodi-Chaniago, dan sebelah Selatan merupakan milik pendatang Minangkabau dari laras Koto -Piliang.

Selanjutnya delapan tahun setelah Pasar Gadang didirikan pada tahun 1905, orang-orang dari kelompok etnik Mandailing yang cukup kaya membangun pertokoan dan dua buah hotel (hotel Negara

dan hotel Sumatera) berasitektur Belanda (Eropa) di sepanjang jalan Pasar Hilir dan Pasar Mudik, kelurahan Pasar Gadang pada sekitar tahun 1913. Menurut informasi dari berbagai informan dalam penelitian ini, beberapa orang kaya kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang yang membangun pertokoan tersebut adalah H. Kiman Lubis; membangun sekitar 20 pintu, H. Idris Nasution; membangun 15 pintu, H. Ahmaddin Lubis; mendirikan Hotel Negara I dan II, serta pertokoan 12 pintu, H. Laidin Lubis; membangun Hotel Sumatera. Saat ini komplek pertokoan dan hotel tersebut ditempati oleh keturunan keluarga tersebut. Masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang tersebut pada umumnya berasal dari Penyabungan, Kota Nopan, Natal, Muara Sipongi, Sihepeng, Hutasoma, Padang Bolak, dan kawasan lainnya di sekitar wilayah Mandailing Natal (Madina).

2. Letak, Luas, dan Jumlah Penduduk

Kelurahan Pasar Gadang berada dalam kawasan pesisir pantai Padang, tepatnya di sisi kanan Muara Sungai Batang Arau. Wilayah ini termasuk dalam kawasan Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Kelurahan Pasar Gadang berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut, dengan jarak tempuh 1 Km dari pusat kota, dan 2 Km dari pusat pemerintahan kecamatan. Batas wilayahnya adalah: pada bagian sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ranah, sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batang Arau, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Padang timur. Dengan luas wilayah 0,23 Km²,

Kelurahan Pasar Gadang saat ini dihuni oleh 7435 jiwa dari 1503 KK dengan perincian 3702 laki-laki dan 3733 perempuan. Dari Jumlah penduduk tersebut, keberadaan masyarakat kelompok etnik Mandailing diperkirakan sekitar 150 jiwa. Jumlah kelompok etnik Mandailing ini tidak lagi sebanyak pada lima atau sepuluh tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyak keluarga yang pindah ke tempat lain baik di dalam kawasan kota Padang lainnya maupun ke luar Propinsi Sumatera Barat.

3. Mata Pencarian, Agama, dan Pendidikan

a. Mata Pencarian

Kondisi kehidupan sosial masyarakat Pasar Gadang hingga kini masih berciri khas sebagai masyarakat kawasan pasar, yakni bersifat mobile dengan segala aktivitas pasar, seperti perdagangan, jasa ekspedisi angkutan barang, transportasi truk-truk pengangkut barang, dan kegiatan bongkar muat barang. Keberadaan stasiun bus ALS jurusan Padang -Medan di kawasan ini turut melengkapi fenomena sosial masyarakat Pasar Gadang.

Pada umumnya masyarakat Pasar Gadang bermata pencarian sebagai pedagang dan buruh, namun dalam profesi dagang dapat dibedakan bahwa masyarakat kelompok etnik Minangkabau berdagang untuk jenis komoditi barang-barang kelontong dan perlengkapan untuk mengisi toko bangunan serta barang-barang lainnya, sedangkan masyarakat kelompok etnik Mandailing mengkhususkan pada komoditi rempah-rempah hasil bumi, dan distributor semen. Pertokoan mereka sebagian besar terletak di

sepanjang jalan Pasar Hilir dan Pasar Mudik dengan menempati bangunan tua berarsitektur Belanda (Eropa) yang dibangun sekitar tahun 1913. Bangunan lama bertingkat dua yang cukup besar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai toko, melainkan sekaligus sebagai tempat tinggal dan gudang. Setiap satu los rumah toko tersebut dapat menampung dua sampai hingga kepala keluarga dengan jumlah penghuni tujuh hingga dua belas orang. Selain itu pekerjaan lainnya yang dilakukan masyarakat Pasar Gadang adalah sebagai pegawai negeri, pensiunan, ABRI, buruh swasta, pertukangan dan nelayan. Hal tersebut seperti tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Mata Pencarian Masyarakat Pasar Gadang Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
PNS	55
ABRI	4
Buruh	765
Wiraswasta/Dagang	995
Pertukangan	10
Pensiunan	20
Nelayan	

Sumber: Monografi
Kelurahan Pasar Gadang Tahun 2001

b. Agama

Sebagian besar masyarakat Pasar Gadang yakni 90% merupakan pemeluk agama Islam. Sedangkan yang lainnya menganut agama lain seperti Kristen dan Budha - Kong hu Cu. Penganut agama ini adalah masyarakat dari kelompok etnik

Cina, Nias, Batak, dan Jawa. Agama Islam bagi masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang, bukan merupakan agama yang baru mereka kenal. Pada umumnya mereka telah memeluk Islam sebelum mereka datang ke Pasar Gadang.

Suasana keberagamaan antar umat beragama maupun antar umat seagama di Pasar Gadang di tengah masyarakatnya yang multi etnik tersebut hingga saat ini tetap terpelihara tanpa sating mengusik satu sama lainnya. Bahkan antar kelompok etnik Minangkabau dengan Mandailing, yang pada sementara orang Minangkabau sempat memiliki stereotip negatif terhadap orang Mandailing; sama dengan orang Batak, Kristen kafir, dan makan anjing, justru terhapus oleh pemahaman kelompok etnik Minangkabau bahwa kelompok etnik Mandailing adalah mustim, bukan Batak dan bukan pula Kristen. Pemahaman bahwa kelompok etnik Mandailing adalah muslim inilah yang turut menjadikan suasana keberagamaan antar-umat seagama terjalin dengan baik di tengah perbedaan kelompok etnik.

c. Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, masyarakat Pasa Gadang termasuk kurang memiliki kepedulian, sehingga sangat sedikit sekali keluarga

yang anaknya Berpendidikan tinggi. Ketidakpedulian mereka terhadap pendidikan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan Lingkungan sekitarnya, sehingga oriental yang berkembang tidak ke depan, melainkan apa yang terjadi pada atau apa yang ada di depan mereka saat ini.

Kondisi Lingkungan Pasar Gadang sebagai lokasi perniagaan atau tempat berputarnya roda perekonomian telah mempengaruhi masyarakatnya untuk lebih mementingkan bagaimana caranya mereka dapat ikut terjun dalam dunia perekonomian tersebut secepatnya, dan itu tidak perlu diperoleh melalui pendidikan yang tinggi, lama dan mahal. Pendidikan tinggi identik dengan pekerjaan menjadi pegawai atau PNS, sedangkan pasar tidak membutuhkan pendidikan tinggi, melainkan kemampuan berusaha dan berdagang. Keengganan dan ketidakmampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan juga disebabkan oleh faktor ekonomi.

Kondisi tersebut bukan merupakan bentuk kepasrahan dalam hidup dan tergantung pada nasib, tetapi lebih tepat sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi kehidupan (adaptasi) sesuai dengan kemampuan. Bagaimanapun keadaannya mereka telah berusaha dan harus dihargai semua pengorbanan atas tanggung jawabnya terhadap pendidikan anak-anak mereka. Hal ini lebih berharga dari pada sekedar kepasrahan terhadap hidup dengan menyerahkan semuanya kepada nasib. Tentang jumlah penduduk Pasar Gadang berdasarkan jenjang pendidikannya tersaji dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Pasar Gadang

Pendidikan	Jumlah
TK	559
SD	80
SMP	65
SMU	105
Diploma 3	73
Sarjana S1	20

Sumber: Monografi

Kelurahan Pasar Gadang Tahun 2001

4. Bahasa dan Budaya

Bahasa yang dipergunakan oleh masyarakat Pasar Gadang pada umumnya adalah bahasa Minangkabau. Bahasa ini tidak hanya dikuasai oleh masyarakat yang berasal dari kelompok etnik Minangkabau, tetapi juga oleh masyarakat dari kelompok etnik yang ada di Pasar Gadang, yakni Cina, Jawa, Batak, Nias, dan Mandailing. Dalam hal ini mereka memang berusaha untuk dapat menguasai dan mampu berbahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-harinya. Pemakaian bahasa Minangkabau oleh kelompok etnik Mandailing tidak hanya di kalangan orang tua yang telah lama hidup di Pasar Gadang, tetapi juga oleh anak cucu mereka.

Kedudukan bahasa Minangkabau di Pasar Gadang sebagaimana umumnya di Sumatera Barat sangat kokoh dan terjaga oleh masyarakat pemakainya (etnik Minangkabau). Hal ini terlihat

dad kecenderungan masyarakat menggunakannya dalam hampir segala situasi sehari-hari baik dengan sesama etnik Minangkabau maupun dengan etnik pendatang. Kondisi ini mengharuskan para pen-datang termasuk masyarakat kelompok etnik Mandailing untuk mampu menguasai bahasa Minangkabau sebelum berinteraksi lebih jauh dengan masyarakat kelompok etnik Minangkabau.

Untuk menjaga kelestarian bahasa Mandailing, mereka pun sewaktu-waktu seperti pembicaraan antara suami istri atau orang tua bersama anak-anaknya yang sedang berkumpul semuanya di kala senggang tetap menggunakan bahasa Mandailing. Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran dan pewarisan bahasa kepada anak-anaknya dengan harapan anak cucu mereka tetap dapat memahami dan mampu menggunakan bahasa Mandailing. Pada umumnya upaya ini tidak mendapat tanggapan dari anak-anak. Mereka (anak-anak) lebih banyak menjawab atau menyahuti pembicaraan orang tuanya dengan memakai bahasa Minangkabau. Dengan demikian pemakaian bahasa Mandailing secara utuh terbatas pada komunikasi antar orang tua sesama anggota kelompok etnik Mandailing baik di rumah maupun dalam pertemuan keluarga atau pertemuan perkumpulan.

Kebiasaan menggunakan bahasa Mandailing di kalangan para orang tua ataupun para pedagang rempah Mandailing di Pasar Gadang merupakan salah satu keunikan tersendiri pada kelompok etnik tersebut. Kondisi tersebut menimbulkan kesan seolah-olah sedang berada di Mandailing, Hal unik yang menarik lainnya berkaitan dengan bahasa adalah bahwa dalam pertemuan perkumpulan kelompok etnik (Semayang dan Parsadaan Satahi

Sauduran) beberapa orang tua senantiasa menggunakan bahasa yang bercampuran. Maksud penggunaan bahasa yang bercampuran adalah masyarakat kelompok etnik Mandailing tersebut suatu saat menggunakan bahasa Mandailing kemudian berganti menggunakan bahasa Minangkabau dan selanjutnya kembali lagi menggunakan bahasa Mandailing. Demikian seterusnya berlangsung secara berulang dalam setiap pembicaraan.

Kebudayaan yang berkembang di Pasar Gadang adalah sebagaimana kebudayaan yang ada di Kota Padang pada umumnya, yakni sebagai hasil kolaborasi kebudayaan dari berbagai unsur etnik yang ada di Kota Padang. Pengaruh Aceh dan Melayu yang dominan memunculkan sistem pewarisan gelar turunan bangsawan, yakni Sutan dan Marah untuk laki-laki, dan Pun untuk perempuan. Selain itu sistem kekerabatan yang dipakai adalah matrilineal sehingga bila anak lahir ia dengan sendirinya masuk pada suku ibunya. Pengaruh Portugis juga terlihat pada pakaian pengantin. Marapulai dan Anak Daro berpakaian menurut mode Senor dan Seniorita. Marapulai memakai baju berenda pada tepi baju dan ujung lengannya. Ujung celana sampai di bawah lutut dan kaki mengenakan kaus putih yang menutup sampai ke atas lutut. Sedangkan Anak Daro memakai Sunting tinggi di atas kepalanya seperti hiasan Seniorita dengan menjajarkan tusuk konde yang ramai. Oi dadanya bersilang kain sebagaimana mode pengantin wanita Aceh. Selanjutnya pelaminan Marapulai dan Anak Daro didominasi warna merah memperlihatkan pengaruh Cina (Falah, 2000).

Dalam perkembangannya saat ini, sebutan Marapulai dan Anak Daro tidak terbatas pada pengantin dari kelompok etnik lokal Minangkabau. Kecuali kepada etnik Cina, sebulan Marapulai dan Anak Daro juga sering ditujukan kepada pengantin yang berasal dari kelompok etnik lainnya. Padahal dalam kelompok etnik Mandailing sendiri memiliki sebulan untuk pengantin wanita dan pengantin pria, yakni Boru dan Bayo Pangoll.

Berkaitan dengan seni budaya, masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang juga memiliki keunikan. Mereka pada umumnya selain senang dan sering mendengarkan lagu-lagu di Mandailing di rumahnya, juga menyukai lagu-lagu pop daerah Minangkabau. Kondisi ini mengesankan bahwa mereka tidak lagi bersifat etnosentris yang mengagungkan kebudayaannya sendiri, atau lebih tepatnya telah mampu beradaptasi dengan kebudayaan lokal (Minangkabau).

5. Sarana Pendukung

Sebagai pendukung bagi berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya, Kelurahan Pasar Gadang memiliki sarana seperti terangkum dalam tabel 3.

Tabel 3. Sarana Umum AAasyarakat Pasar Gadang

Sarana	Jumlah
SD	4
Masjid	2
PoliKlinik	1
Rumah Bersalin Pribadi	1
Lapangan Bulutangkis	2
Rumah Bilyard	1
Toko	22
Warung	12
Warung makan	2

Sumber: Monografi Keturahan Pasar Gadang Tahun 2001

B. Peranan Kelompok Etnik di Pasar Gadang

1. Peranan Kelompok Etnik Minangkabau

Kondisi Pasar Gadang yang selain dihuni oleh kefompok etnik tokal Minangkabau juga dihuni den berbagai kelompok etnik, dalam perspektif masyarakat Minangkabau meiupakan daerah yang

sangat strategis bagi dunia perdagangan. Sebagai tuan rumah, kelompok etnik lokal Minangkabau yang mayoritas Ini memiliki peran pada seluruh aspek kehidupan di Pasar Gadang. Pada bidang ekonoml, kelompok etnik lokal Minangkabau yang dikenal ulung dalam berdagang ini mendominasi perdagangan di Pasar Gadang, tetapi tidak termasuk komoditi rempah-rempah dan semen. Komoditi perdagangan kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang pada umumnya adalah barang-barang keiontong, dan kebutuhan toko bahan bangunan.

Selain berusaha di Pasar Gadantj, mereka melakukan usahanya di tempat lain dengan membuka toko yang dimHiki sendiri maupun disewa di komplek pertokoan pasar lainnya. Mereka juga bergerak di bidang jasa angkutan ekspedisi darat untuk mengangkut barang-barang tersebut maupun rempah-rempah dan semen dari dan ke luar Sumatera Barat. Dalam bidang pemerintahan, kepala kelurahan dan seluruh staf kelurahan Pasar Gadang berasal dari kelompok etnik Minangkabau. Komposisi ini tentunya tidak berkaitan dengan kapasitas etnik yang terdapat dalam kemasyarakatan di Pasar Gadang, karena mereka merupakan pegawai yang diangkat, ditugaskan dan bertanggung jawab atas kewenangan pemerintah. Namun demikian untuk membantu jalannya pemerintahan di Kelurahan Pasar Gadang, masyarakat ikut dilibatkan tanpa memandang asal kelompok etniknya, melainkan kemampuannya.

Dalam bidang keagamaan, masyarakat kelompok etnik lokal Minangkabau juga sangat berperan, khususnya pengaruh

pemahaman mereka sebagai pengikut Muhammadiyah. Pengaruh ini begitu kuat, sehingga kelompok etnik pendatang yang ber-agama Islam namun pahamnya berbeda dengan Muhammadiyah (Ahlussunnah), walaupun tidak semuanya diterima, cenderung mengikuti tata cara yang umumnya dianut oleh masyarakat kelompok etnik Minangkabau. Percampuran atau akulturasi ini nantinya memunculkan perilaku adaptasi dalam kegiatan sosial keagamaan yang unik, seperti dalam acara-acara syukuran kelahiran, takziah, pergi haji, dan sebagainya. Bagaimanapun bentuk keunikannya kondisi ini tetap menunjukkan bahwa kelompok etnik lokal Minangkabau yang merupakan kelompok etnik mayoritas lebih dominan terhadap kelompok etnik lainnya yang minoritas dan pendatang.

2. Peranan Kelompok Etnik Mandailing

Berbeda dengan kelompok etnik Minangkabau sebagai kelompok etnik lokal sekaligus kelompok mayoritas yang dengan sendirinya memiliki peran sangat besar dalam segala aspek tatanan kehidupan masyarakat Pasar Gadang, kelompok etnik Mandailing memiliki peran yang sangat terbatas. Peranan kelompok etnik Mandailing yang cukup menonjol di Pasar Gadang adalah dalam bidang perdagangan. Mereka cukup berhasil menjadi pelaku utama pemasaran rempah-rempah dan semen. Dengan menempati sebagian besar bangunan dan rumah-rumah kuno peninggalan Belanda di sepanjang jalan Pasar Hilir, yang salah satunya adalah bekas Hotel Negara dan Hotel Sumatera, mereka menjadikan bangunan tersebut

sebagai rumah sekaligus gudang, dan kantor perusahaan niaga untuk komoditi rempah-rempah ataupun semen. Peranan lain yang Lebih sangat terbatas namun lebih baik dibandingkan dengan kelompok etnik lainnya adalah Ikut berperannya mereka di dalam struktur pemerintahan kelurahan, yakni sebagai ketua Lingkungan dan sekretaris LKMD.

C. Profil Adaptasi Keluarga Etnik Mandailing

Profil adaptasi keluarga kelompok etnik Mandailing ini terbagi dalam bentuk atau profil keluarga yang tergotong kaya, sederhana (miskin), lama, baru, asli dan campuran.

1. Profil adaptasi keluarga kaya

Dalam menyebutkan keluarga kaya dan sederhana (miskin), penulis mengacu pada penilaian atau pandangan umum yang lazim di masyarakat, Pandangan yang lazim di tengah masyarakat kita tentang orang kaya adalah orang yang sukses dalam usaha dan kehidupannya secara material, memiliki kelebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan penunjangnya. Sedangkan orang yang tergolong sederhana atau miskin adalah orang yang secara material kurang mampu untuk hidup secara berlebihan dalam memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang tambahannya.

Berkaitan dengan status tersebut, bentuk adaptasi pada keluarga yang tergolong kaya di Pasar Gadang sebagaimana yang terjadi pada keluarga informan penelitian ini adalah: (1) Sebagaimana masyarakat keluarga etnik Mandailing lainnya mereka

menggunakan bahasa Minangkabau baik di rumah maupun dalam pergaulan masyarakat umum di Pasar Gadang. Penggunaan bahasa Mandailing (istilah mereka bahasa kampung) sebatas antar sesama orang tua atau suami istri. Bahkan ketika penelitian ini berlangsung kendati mereka tahu peneliti adalah orang Mandailing dan peneliti berusaha agar pembicaraan berlangsung dengan bahasa Mandailing, mereka cenderung menggunakan bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia. Mungkin keengganan tersebut berkaitan dengan status mereka (kaya) yang identik dengan orang yang berpendidikan dan maju. Oleh karena itu saat berhadapan dengan orang yang berpendidikan juga {peneliti} maka mereka menunjukkan identitas tersebut dengan cara tidak melayani pembicaraan dengan menggunakan bahasa Mandailing. Selain itu beberapa anak mereka juga lebih sering menggunakan bahasa Minangkabau dari pada bahasa Mandailing manakala berbicara dengan teman sesama etnik Mandailing maupun dengan sanak saudaranya. (2) Kesamaan agama. Agama Islam yang dianut oleh keluarga yang tergotong kaya ini merupakan identitas diri dan keluarga, bahwa mereka bukan orang Batak yang identik dengan agama Nasrani atau Kristen. Dengan demikian faktor agama ini akan menghantarkan pemahaman masyarakat, khususnya masyarakat kelompok etnik Minangkabau, bahwa mereka adalah saudara seiman atau segolongan yang dapat dan pantas diterima atau dijadikan sahabat. (3) Mencari peran. Dalam hal ini gotongan keluarga Mandailing yang kaya mengambil peran di bidang perekonomian dengan menjadi pedagang rempah-rempah dan distributor semen. Usaha ini dilakukan secara turun-

temurun setelah usaha perdagangan kain dan hotel di Pasar Gadang mengalami kebangkrutan. Dengan cara Ini mereka mampu beradaptasi dengan segala lapisan masyarakat Minangkabau di Pasar Gadang sekaligus memperoleh keuntungan atau keberhasilan hidup di Pasar Gadang. Selain Itu mereka juga mengambil peran dalam pemerintahan di Sumatera Barat dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil di berbagai departemen. Keberhasilan keluarga informan yang dahulunya memiliki dua buah hotel di kawasan Pasar Gadang dan sekarang berkecimpung dalam perniagaan rempah-rempah di Pasar Gadang juga turut menuntun keberhasilan pendidikan dan kehidupan anak anaknya. Mereka tidak hanya berhasil menjadikan anak cucunya sebagai sarjana, tetapi juga berhasil menghantarkan mereka dalam berbagai profesi, seperti menjadi PNS, dokter, maupun meneruskan usaha orang tuanya di Pasar Gadang. (4) Amalgamasi, atau kawin campuran. Dalam profil keluarga Mandailing manapun, umumnya amalgamasi dengan etnik Minangkabau tidak dianjurkan, Banyak anggapan negatif tentang pribadi orang Minangkabau dalam berumah tangga yang menghalangi proses amalgamasi, seperti tanggung jawab terhadap kemenakan dan mertua yang berlebih, dan peran yang begitu besar pada pihak istri maupun keluarganya dibandingkan suami. Namun demikian amalgamasi tetap terjadi. Pada keluarga kaya sebagaimana informan yang keturunannya melakukan perkawinan campuran, amalgamasi mengarah kepada perluasan peran, seperti agar dapat menjadi PNS atau jabatan tertentu. Hal ini diharapkan karena pihak keluarga wanitanya

(Minangkabau) merupakan orang yang berpengaruh atau memiliki jabatan strategis di pemerintahan.

2. Profil adaptasi keluarga sederhana (miskin)

Bentuk adaptasi pada keluarga yang termasuk golongan miskin atau sederhana pada kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang sebagaimana terlihat pada keluarga informan adalah: (1) Menggunakan bahasa Minangkabau baik di rumah maupun dalam pergaulan sehari-hari, kecuali dengan sesama etnik Mandailing yang dianggap orang tua atau dihormati. (2) Kesamaan beragama. Kesamaan dalam memeluk agama Islam oleh kedua etnik lebih mendekatkan hubungan antara Informan yang kelompok etnik Mandailing dengan masyarakat Pasar Gadang yang Minangkabau. Mereka (Mandailing) tahu bahwa umumnya orang Minangkabau sangat taat dan fanatik dalam menjalankan syariat Islam, sehingga lebih senang bergaul dengan sesama muslim daripada dengan orang non muslim. (3) Mencari peran. Dalam hal ini keluarga informan yang sederhana bermata pencarian sebagai supir taksi. Hal ini selain bersifat sebagai upaya mencari pekerjaan, juga sekaligus sebagai upaya menaklukkan dan beradaptasi dengan kondisi dan situasi sosial di tempat rantau (Pasar Gadang) sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya

3. Profil adaptasi keluarga lama

Pada umumnya masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang merupakan keluarga yang telah lama tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Hingga saat ini keberadaan mereka diperkirakan merupakan generasi yang keempat atau kelima dari

pendahulunya. Keluarga INILAH yang dalam penelitian ini disebut sebagai keluarga lama. Berdasarkan pengamatan pada keluarga Informan yang tergolong sebagai salah satu keluarga kelompok etnik Mandailing yang telah lama menetap di Pasar Gadang, profil adaptasi pada bentuk keluarga ini adalah; 1) Menggunakan media bahasa. Umumnya mereka sangat lancar berbahasa Minangkabau, bahkan karena begitu lancar dan seringnya menggunakan bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, mereka terkesan seperti layaknya orang Minangkabau; 2) Menjadikan aqidah agama Islam sebagai sandaran bersilaturahmi menuju solidaritas Islam, 3) Berperan dalam usaha perdagangan rempah-rempah dan distributor semen. Usaha ini umumnya dikuasai oleh keluarga yang telah lama menetap di Pasar Gadang dan keturunannya; 4) Amalgamasi. Profil adaptasi melalui amalgamasi pada keluarga Mandailing terutama terlihat pada keluarga yang telah lama menetap di Pasar Gadang. Keturunan mereka beberapa ada yang menikah dengan wanita atau pria dari etnik Minangkabau. Keberhasilan melakukan perkawinan campuran ini berkaitan dengan hubungan yang telah lama terjalin dengan kelompok etnik Minangkabau, sehingga dengan sendirinya mampu menilai kepribadian dan perilaku masing-masing individu. Hal ini akan memunculkan kesadaran bahwa tidak semua orang Minangkabau ataupun Mandailing memiliki kepribadian dan perilaku negatif yang mewakili kelompok etniknya.

4. Profil adaptasi keluarga baru menetap

Keluarga Mandailing yang baru tinggal dan menetap di Pasar Gadang ini umumnya disebut pendatang baru atau orang baru. Penyebutan ini mengacu pada kelaziman masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang dalam menyebut para pendatang yang baru tinggal dan menetap sekitar sepuluh tahun di Pasar Gadang. Profil adaptasi pada keluarga yang tergolong baru sebagaimana yang tampak pada keluarga informan adalah;!) memanfaatkan medium bahasa Minangkabau. Kondisi umum masyarakat Minangkabau di Pasar Gadang yang menggunakan bahasa Minangkabau pada hampir segala situasi dalam kehidupan sehari-harinya suka ataupun tidak suka mengharuskan keluarga etnik Mandailing yang baru tinggal dan menetap di Pasar Gadang untuk dapat menguasai bahasa Minangkabau.

5. Profil adaptasi keluarga asli

Sebagaimana yang terungkap dalam pengamatan dan wawancara terhadap keluarga informan, profil adaptasi pada keluarga yang masih asli atau tidak melakukan perkawinan campuran ini terlihat sama dengan profil keluarga lainnya, yakni; 1) menggunakan media bahasa Minangkabau ; 2) menggunakan motif agama sebagai landasan dalam berhubungan dengan tetangga dan lingkungannya di Pasar Gadang. (3) mencari peran di masyarakat dengan menjadi PNS serta pengurus LKMD di Pasar Gadang.

6. Profil adaptasi keluarga campuran

Profil adaptasi dalam keluarga campuran, adaptasi yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap keluarga suami atau istri yang berasal dari etnik Minangkabau sebagaimana pada keluarga Informan adalah; (1) Untuk kelancaran komunikasi dengan keluarga istri yang berasal dari etnik Minangkabau, suami menggunakan bahasa Minangkabau. Bahasa ini juga dipergunakan terhadap istri maupun anak-anaknya. (2) Bersandar pada landasan agama Islam. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan permasalahan yang berpangkal dari perbedaan etnik. Pada keluarga informan yang menikah dengan wanita Minangkabau, ketika terjadi perbedaan pendapat atau kebiasaan yang berangkat dari perbedaan etnik, seperti kemana mereka harus tinggal setelah menikah (menurut adat Mandailing; laki-laki atau suami membawa istri, sedangkan menurut adat Minangkabau; wanita atau istri membawa suami). Permasalahan tersebut selanjutnya ditengahi dengan mengembalikannya pada ketentuan agama Islam, bahwa laki-laki atau suami memiliki tanggung jawab penuh terhadap Istrinya. Sehingga kendati suami yang Mandailing tinggal bersama mertua atau keluarga Istrinya yang Minangkabau Dialah yang bertanggung jawab, bukan keluarga istrinya. Hal ini menjadikannya tidak merasa 'dibeli' dan asing. (3) Mencari peran dan kedudukan. Sebagaimana pada informan yang berpendidikan sarjana dan bekerja dengan memiliki kedudukan yang strategis di lembaga pemerintah (PNS), upaya mencari peran dan kedudukan ini dilakukan tidak hanya semata-mata memenuhi tuntutan memperoleh pekerjaan, melainkan

juga sebagai langkah menyesuaikan diri dengan kedudukan status sosial pihak keluarga istri yang dipandang cukup berhasil.

D. Perspektif Kelompok Etnik tentang Perilaku Adaptif

1. Minangkabau

Dalam pandangan masyarakat kelompok etnik lokal Minangkabau di Pasar Gadang keberadaan kelompok etnik Mandailing dianggap sama saja dengan kelompok etnik pendatang lainnya. Mereka datang karena ingin berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kelompok etnik lain yang datang ke Pasar Gadang. Bagi masyarakat Minangkabau, daerah Pasar Gadang merupakan daerah rantau yang terbuka bagi siapa saja. Dalam hal ini mereka menyadari bahwa mereka pun bukanlah penduduk asli di Pasar Gadang, jadi sama-sama sebagai pendatang. Perbedaannya adalah mereka berasal dari kelompok etnik Minangkabau, yakni suku asli yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan lainnya berasal dari etnik lain yang berada di luar wilayah Sumatera Barat, seperti Jawa, Batak, Mandailing, Nias, dan Cina. Beberapa informan dari kelompok etnik Minangkabau menyebutkan bahwa asal-usul mereka berasal dari Sdok.

Interaksi sosial antar kelompok etnik Minangkabau dan Mandailing selama ini terjalin baik, karena masyarakat kelompok etnik Mandailing ini dipandang mampu menempatkan diri di tengah-tengah kelompok etnik Minangkabau yang mayoritas. Mereka ikut bergabung dan terlibat dalam setiap kegiatan masyarakat baik formal maupun nonformal, tidak menutup diri sebagai-mana kelompok

etnik Cina dan Nias. Dalam urusan kematian, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya itu mereka dapat saling bertemu sehingga saling kenal. Kedekatan ini dapat dikatakan sebagai solidaritas keagamaan sekaligus wujud Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan muslim). Dalam (slam bahkan dianjurkan untuk saling tolong-menolong dengan sesama muslim karena sesungguhnya sesama muslim adalah bersaudara, Kelompok etnik Minangkabau dan Mandailing di Pasar Gadang merupakan Penganut Islam yang taat dengan menempatkan Islam sebagai satu-satunya landasan utama dalam kehidupan mereka. Pemahaman terhadap keislaman masyarakat kelompok etnik Mandailing tersebut pada akhirnya turut menghapuskan anggapan (stereotip) masyarakat kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang. Hingga saat ini mereka tidak atau belum pernah terlibat konflik fisik yang berlatar belakang perbedaan etnik. Konflik yang terjadi umumnya sebatas stereotip negatif pada beberapa anggota masyarakat kelompok etnik tersebut. Hal ini pun secara berangsur-angsur telah mulai hilang atau tidak dibicarakan orang lagi. Saat ini mereka tidak lagi menganggap orang Mandailing sama dengan orang Batak yang beragama Kristen, kafir dan makan anjing. Namun demikian dalam pergaulan sehari-hari secara bergurau (olok-olok) mereka sering menyebutnya Batak apabila orang dari kelompok etnik Mandailing ini berlaku menjengkelkan. Ungkapan "dasar Batak" atau "Hei Batak" merupakan umpatan olok-olok biasa antar pemuda Minangkabau dan Mandailing yang tidak memiliki nuansa permusuhan. Seorang pemuda Mandailing yang berperilaku kasar dan tidak sopan di hadapan temannya (Minangkabau) dan

telah menjengkelkan temannya itu, maka ia akan mendapat umpatan tersebut. Informan penelitian Ini yang berasal dari kelompok etnik Minangkabau menyebutkan sebagai berikut:

Mereka bukan Batak tapi Mandailing dari Penyabungan. Islam juga seperti orang di sini (Minangkabau). Tapi terkadang kami suka memanggil Batak kalau lagi kesal. Dia tidak marah karena tahu kami cuma bergurau main-main. Orang Mandailing di sini lurus-lurus.

Tentang pandangan kelompok etnik Minangkabau terhadap kelompok etnik Mandailing tersebut, masyarakat kelompok etnik Mandailing menanggapi dengan anggapan bahwa keberadaan mereka yang identik dengan Islam telah mensejajarkan dengan etnik Minangkabau, yakni sama-sama sebagai Penganut Islam yang taat dan bahkan dapat lebih fanatik lagi dibandingkan dengan keislaman masyarakat kelompok etnik Minangkabau. Dalam hal ini mereka mengkaitkan dengan kebiasaan orang-orang Minangkabau yang walaupun Islam dan telah lama tinggal di perkotaan, tetapi masih suka memelihara anjing di rumahnya. Masyarakat kelompok etnik Mandailing berpandangan sebagai berikut:

Kami dulu dikira Kristen, air kamipun tidak mau meminumnya. Tapi akhirnya mereka tahu kalau kami juga Islam, bahkan kami tidak ada memelihara menuntun anjing. Elok (lebih baik) menuntun anak, tidak haram dapat pahala. Koto Nabi, Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada binatang haramnya

Perilaku adaptif kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang juga terlihat pada penampilannya yang tidak exclusive dengan hidup

bermewah-mewah. Beberapa keluarga dari kelompok etnik Mandailing yang dianggap berhasil dalam segi perekonomian karena usahanya di bidang perniagaan rempah-rempah dan semen di Pasar Gadang oleh masyarakat kelompok etnik Minangkabau dianggap biasa dan wajar sebagaimana umumnya bahwa orang akan mendapatkan imbalan keberhasilan jika mau berusaha keras. Pandangan 1n1 muncul mungkin karena orang Mandailing yang berhasil di Pasar Gadang pandai menyembunyikan kekayaannya di balik penampilannya yang sederhana, sehingga tidak kentara. Mereka tidak bergaya hidup mewah baik dalam penampilan sehari-hari maupun dalam bentuk fisik, seperti rumah dan kendaraan. Ada anggapan bahwa kekayaan mereka tersimpan dan dialihkan untuk membangun di kampung halamannya di Mandailing

2. Mandailing

Sebagai pendatang di daerah baru yang memiliki karakteristik sosial budaya berbeda, masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang memiliki keyakinan bahwa mereka dapat hidup di mana saja termasuk di Pasar Gadang yang banyak dihuni oleh orang Minangkabau. Keyakinan ini tampaknya merupakan perwujudan atas falsafah Boraspati dan ber-Sidapot Solup yang dianut oleh mereka, yakni seperti cecak yang dapat hidup dengan posisi apa saja, serta harus dapat menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan setempat.

Masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang pada umumnya tidak pernah tahu dan tidak bisa membedakan pengelompokkan etnik Minangkabau atas kelarasan Bodi Chantago

dan Koto Pilliang. Mereka menganggapnya sebagai orang Minang atau orang Padang yang bagi mereka bukan merupakan kelompok etnik yang baru dikenal. Mereka mengaku bahwa generasi sebelum mereka telah lama berhubungan dengan orang-orang Minangkabau sebelum mereka datang ke Pasar Gadang. Hal ini mungkin berkaitan dengan ekspansi para Padri Minangkabau ke Mandailing pada 1820-1836 sehingga mengislamkan Mandailing seperti yang dinukilkan oleh Abdullah dalam Pelly (1984). Efek dari peristiwa tersebut adalah berubahnya tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat kelompok etnik Mandailing. Dalam bidang pendidikan, guru-guru didatangkan untuk mengajar di sekolah-sekolah Mandailing. Dalam bidang agama pengaruhnya sangat kuat, sehingga Agama Islam dan budayanya merupakan sendi utama bagi kehidupan mereka menggantikan animisme. Bahkan menurut catatan Buys (dalam Pelly, 1984) pada tahun 1890-an semua orang di Mandailing memakai pakaian bergaya Minangkabau dan Eropa. Rumah-rumah juga tidak lagi menampilkan ciri-ciri Batak.

Kendati tidak jelas sejak kapan kelompok etnik Mandailing datang dan menetap di Pasar Gadang, namun mengingat perjalanan komunikasi antar dua kelompok etnik telah terjalin cukup lama sebelum mereka datang ke Pasar Gadang, masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang menganggap bahwa mereka telah cukup akrab dan peduli dengan masyarakat kelompok etnik Minangkabau. Mereka mengaku bergaul sesuai dengan landasan agama Islam, bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Ditambah lagi dengan aturan menurut adat mereka, bahwa orang Mandailing

memiliki ukuran dan aturan nilai-nilai yang terkandung di dalam takaran (Solup), dan apabila akan pergi merantau ke tempat orang tidak boleh membawa Solup miliknya, ia haruslah bersikap Sidapot Solup (menyesuaikan dengan adat istiadat atau kebiasaan di tempat itu).

Untuk dapat melakukan hal tersebut tentunya setiap orang Mandailing harus mampu pula menanggalkan aturan atau nilai-nilai (solup) yang mereka miliki. Walaupun hal ini tidak mungkin mereka lepaskan semuanya, beberapa tradisi yang lazim mereka lakukan di Mandailing tidak lagi mereka lakukan, seperti tahlil dan kirim do'a untuk arwah, tata cara perkawinan, dan sebagainya. Pelepasan Solup yang lazim mereka gunakan untuk selanjutnya mengikuti atau menyesuaikan dengan aturan maupun nilai-nilai tradisi Minangkabau yang berkembang di Pasar Gadang ini tentunya berdampak pada lunturnya pewarisan nilai-nilai sosial budaya asli mereka. Kondisi yang terjadi pada saat ini merupakan akumulasi dari berbagai perilaku adaptasi seperti itu, terutama pada segi bahasa, yang terjadi dalam kurun waktu cukup panjang telah menghasilkan generasi baru.

Generasi yang penulis maksudkan adalah masyarakat keturunan kelompok etnik Mandailing yang Minangkabauisme (berpaham pada tatanan nilai-nilai sosial budaya Minangkabau) atau orang Mandailing yang tidak lagi Mandailing tetapi Mandailing yang Padang. Oleh orang kebanyakan di Mandailing generasi seperti ini disebut sebagai orang Padang, Si Upik atau Si Buyung. Sebulan ini tidak berhubungan dengan tempat kelahiran, melainkan lebih

kepada kecenderungan perilaku sosial budaya mereka yang tidak lagi memahami sepenuhnya aturan dan nilai-nilai perilaku sosial budaya Mandailing. Dapat dipastikan jika saja orang Mandailing di Pasar Gadang ini tidak memiliki marga yang melekat pada nama anak dan keturunannya serta tidak dapat lagi menggunakan bahasa Mandailing, maka tidak ada lagi simbol-simbol budaya yang dapat dilihat untuk memastikan bahwa mereka adalah orang Mandailing. Mengenai kondisi ini beberapa informan menyatakan kekhawatiran atas anak-anaknya sebagai berikut:

Anak-anak kami tidak bisa lagi memakai bahasa kampung (Mandailing), mereka tahu artinya tapi tidak mau memakainya, padahal soya sama bapak (suami) sering mengajak mereka berbahasa kampung di rumah, tapi mereka menjawabnya pakai bahasa sini (Minangkabau). Payah juga nanti kalau pulang kampung kami malu dengan saudara-saudara kita di kampung. Di kampung orang itu akan menyebutnya (anak-anaknya) orang Padang, Si Buyung, Si Upik,

Pada umumnya masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang lebih setuju bahwa dalam pergaulan di masa sekarang ini untuk tidak lagi berpola pikir kesukuan. Semua orang dapat bergaul dengan siapa saja selagi tidak mengganggu dan merugikan satu sama lainnya. Gejala seperti ini tampaknya menjadi indikasi bahwa orientasi dalam proses adaptasi kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang adalah memang untuk mencari peruntungan hidup yang lebih baik dan terjamin keamanan dan kedamaiannya. Mereka berperilaku adaptif

dengan saling menghargai (toleransi) dalam ikatan solidaritas muslim, dan berusaha menjadi Minangkabau dengan memakai bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan kawin campuran, sehingga akan memperoleh kesempatan peranan yang luas. Gejala ini muncul seperti yang dikemukakan oleh informan penelitian ini sebagai berikut:

Orang Padang banyak di Mandailing, di mana-mana berdagang, jadi sama sajalah dengan kita di sini juga banyak di mana-mana, macam-macam kerja, bergaul sama semua orang. Kalau tidak begitu tidak bisa maju. Itu Cina Pondok pandai bahasa Padang, kita pun begitu, tapi tidak pandai bahasa Cina.

Dalam konteks teori fungsional yang dikembangkan Talcott Parsons (dalam Johnson, 1990) peran-peran semacam itu akan mengarah kepada satuan yang lebih besar berupa institusi-institusi, yang di dalamnya terdapat posisi dan tindakan yang saling berinteraksi secara kolektif sesuai perannya masing-masing yang diharapkan dapat terpenuhi (tujuan). Lebih dari itu mungkin gejala ini memang merupakan suatu tuntutan dan konsekuensi kehidupan di kawasan perekonomian (pasar) yang cenderung lebih terbuka lintas komunikasi dan interaksinya sebagaimana Pasar Gadang dan juga pasar-pasar lainnya, yang harus mereka siasati dengan melakukan pola adaptasi semacam ini.

E. Pola Adaptasi Kelompok Etnik Mandailing di Pasar Gadang

1. Menjadi Anggota Masyarakat Bahasa Minangkabau

Bahasa selain berfungsi sebagai sarana komunikasi bagi pemakainya juga berfungsi sebagai simbol yang dapat mewakili identitas diri dan sosial budaya masyarakat bahasa tersebut. Demikian halnya dengan bahasa Minangkabau, selain sebagai sarana komunikasi sehari-hari masyarakat kelompok etnik Minangkabau, juga berfungsi sebagai simbol identitas masyarakat kelompok etnik tersebut beserta dengan aspek-aspek sosial budayanya. Sejalan dengan kuantitas masyarakat pemakainya yang mayoritas, dengan sendirinya bahasa Minangkabau menjadi dominan dipergunakan oleh masyarakat di Pasar Gadang, termasuk oleh kelompok etnik Mandailing yang pada dasarnya bukan anggota masyarakat bahasa tersebut. Kedudukan bahasa Minangkabau di Pasar Gadang sebagaimana di Sumatera Barat pada umumnya sangatlah kokoh dan terjaga. Hal ini tampak pada pemakaian bahasa tersebut hampir dalam berbagai situasi sehari-hari. Kondisi seperti ini mengharuskan (suka atau tidak suka) para pendatang untuk dapat menguasai bahasa Minangkabau dan mampu memakainya dalam berinteraksi dengan masyarakat kelompok etnik Minangkabau. Dalam konteks teori Budaya Dominan (Bruner,1974), hal semacam itu menunjukkan bahwa dalam segi bahasa sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan di Pasar Gadang, masyarakat kelompok etnik Minangkabau dengan bahasa Minangkabanya mendominasi dan mengendalikan para pendatang untuk harus mampu menguasai dan mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari baik ketika berkomunikasi dengan

sesama kelompok etnik Mandailing maupun (apalagi) dengan etnik Minangkabau.

Pemakaian bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat kelompok etnik Mandailing yang bukan merupakan anggota masyarakat bahasa tersebut juga dapat dicermati sebagai alat menuju proses adaptasi dalam upaya untuk menjadi bagian dari sistem sosial budaya masyarakat kelompok etnik Minangkabau, khususnya di Pasar Gadang. Sebagaimana Johnson (1990) memandang adaptasi tidak hanya terjadi sebagai anggota masyarakat bahasa tersebut. Kedudukan bahasa Minangkabau di Pasar Gadang sebagaimana di Sumatera Barat pada umumnya sangatlah kokoh dan terjaga. Hal ini tampak pada pemakaian bahasa tersebut hampir dalam berbagai situasi sehari-hari. Kondisi seperti ini mengharuskan (suka atau tidak suka) para pendatang untuk dapat menguasai bahasa Minangkabau dan mampu memakainya dalam berinteraksi dengan masyarakat kelompok etnik Minangkabau. Dalam konteks teori Budaya Dominan (Bruner, 1974), hal semacam itu menunjukkan bahwa dalam segi bahasa sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan di Pasar Gadang, masyarakat kelompok etnik Minangkabau dengan bahasa Minangkabanya mendominasi dan mengendalikan para pendatang untuk harus mampu menguasai dan mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari baik ketika berkomunikasi dengan sesama kelompok etnik Mandailing maupun (apalagi) dengan etnik Minangkabau.

Pemakaian bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat kelompok etnik Mandailing yang bukan

merupakan anggota masyarakat bahasa tersebut juga dapat dicermati sebagai alat menuju proses adaptasi dalam upaya untuk menjadi bagian dari sistem sosial budaya masyarakat kelompok etnik Minangkabau, khususnya di Pasar Gadang. Sebagaimana Johnson (1990) memandang adaptasi tidak hanya terjadi sebagai Pasar Gadang, maka pola adaptasi dengan menjalankan strategi menjadi anggota masyarakat bahasa Minangkabau ini merupakan faktor atau pola yang dominan digunakan dibandingkan dengan strategi atau pola adaptasi lainnya.

2. Solidaritas Muslim (agama)

Agama Islam merupakan salah satu faktor yang cukup mendukung terciptanya proses adaptasi antar kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budayanya ini. Kelompok etnik Mandailing dan Minangkabau yang memiliki perbedaan mendasar dalam sistem kekerabatan maupun falsafahnya ini merupakan pemeluk agama Islam yang taat. Kedua kelompok etnik ini merupakan kelompok etnik yang menjalankan syariat Islam dengan baik dibandingkan kelompok etnik penganut Islam lainnya yang menetap di Pasar Gadang. Ketaatan kedua kelompok etnik ini terhadap Islam disebabkan oleh kesadaran dan pengetahuan mereka tentang agama Islam yang memang cukup baik.

Agama Islam yang mereka anut memang didapatkan secara turun-temurun dari orang tua atau leluhur mereka, namun pada umumnya mereka memperdalam dengan belajar di sekolah-sekolah formal maupun nonformal baik selama mereka masih di kampung halaman, maupun setelah mereka di perantauan. Sekolah-sekolah

formal yang mereka masuki adalah sekolah format yang bernaung di bawah panji organisasi Muhammadiyah, seperti TK Aisyiah, SD, SAM¹, SMU, maupun Universitas Muhammadiyah. Selain itu Juga ke IAIN Imam Bonjol. Adapun sekolah-sekolah nonformal yang mereka masuki adalah pesantren-pesantren yang tersebar di Sumatera Barat, seperti Sumatera Tawalib Parabek Bukit Tinggi, Darul Hikmah Bukit Tinggi, PERT1 di Candung, Bukit Tinggi, Sumatera Tawatlb Padang Panjang, Diniyah P uteri Padang Panjang, Perguruan Muhammadiyah Kauman di Padang Panjang, Sekolah Tarbiyah Islamiyah di Jaho, Padang Panjang, Islam College di Padang (di depan RSUD Jati), dan sebagainya. Adapun pesantren yang ada di Mandailing adalah Jami'atul Washliyah di Purba Baru, Kota Nopan.

Melihat kecenderungan pendalaman agama Islam melalui pendidikan format maupun nonformal yang demikian tinggi pada kedua kelompok etnik tersebut, dapat dimaklumi pula jika dalam beberapa aspek keagamaan antar kedua kelompok etnik tersebut memiliki pemahaman yang cukup baik. Hal yang terutama adalah proses adaptasi terhadap aspek-aspek keagamaan itu, yakni suatu proses adaptasi terhadap pemahaman keagamaan dalam Islam yang berkembang di Mandailing dan Pasar Gadang dari dua golongan paham yang berbeda. Kedua paham yang dimaksudkan adalah Muhammadiyah dan Ahlussunnah. Orang awam menyebutnya sebagai golongan Wahabi atau Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Secara umum masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang merupakan penganut Ahlussunnah. Sedangkan sebagian kecil lainnya merupakan penganut Muhammadiyah. Paham Muhammadiyah banyak dianut oleh masyarakat kelompok etnik Minangkabau. Dengan demikian sebagaimana dominannya masyarakat kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang, paham Muhammadiyah pun merupakan paham yang lebih dominan dibandingkan dengan paham Ahlussunnah. Tidak seperti Muhammadiyah, paham Ahlussunnah di Sumatera Barat tidak begitu berkembang. Pada masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang, paham tersebut dibawa dari kampung halaman-nya di Mandailing. Di Mandailing gotongan penganut paham Ini disebut sebagai pengikut Washliyah, yakni nama pesantren Jami'atul Washliyah di Purba Baru, Kota Nopan. Pesantren yang salah satu tujuannya meredam perkembangan paham dan gerakan Muhammadiyah di Mandailing yang dibawa dan dikembangkan oleh guru-guru agama dari Sumatera Barat ini dipimpin oleh Syekh Purba Baru.

Muhammadiyah yang secara umum mendominasi sendi-sendi peribadatan agama Islam masyarakat kelompok etnik Minangkabau ini demikian berpengaruh terhadap sendi-sendi peribadatan agama Islam di Pasar Gadang. Kelompok etnik Mandailing yang lebih banyak menganut paham Ahlussunnah pada akhirnya harus bersikap longgar, mau menerima dan menjalankan beberapa kaidah yang disyariatkan dalam paham Muhammadiyah. Kaidah tersebut antara lain; tidak membacakan talqin mayat saat

menguburkan jenazah, tidak mengadakan tahlil untuk arwah jenazah, tidak menghidangkan makanan dan atau minuman saat takziah dan mendoa untuk jenazah. Dalam pelaksanaan sholat lima waktu dan sholat tarawih di bulan Romadhon cukup dengan 11 raka'at (8 raka'at tarawih dan 3 raka'at witr).

Kaidah tersebut tentunya berbeda sekali dengan sendi-sendi peribadatan kelompok etnik Mandailing sebagai penganut paham Ahlussunnah. Bagi mereka selama di kampung halaman di Mandailing pembacaan talqin kepada mayat merupakan hal yang lazim dilakukan saat menguburkan jenazah. Menurut mereka pembacaan Talqin itu berfungsi untuk menuntun arwah jenazah sehingga akan lancar ketika menjawab pertanyaan dan pertanggungan jawaban aqidah keislaman jenazah dari dua malaikat yang bertugas menanyakan di dalam kubur, yakni malaikat Munqar dan Naqir.

Kebiasaan lainnya yang lazim mereka lakukan saat masih di kampung halaman di Mandailing adalah mengadakan tahlil untuk arwah jenazah selama tiga malam berturut-turut. Hal itu dilakukan dengan menghidangkan makanan dan atau minuman saat takziah dan mendoa untuk jenazah. Untuk keperluan Ini pihak keluarga yang mendapat musibah menyediakan satu sampai dua ekor kambing untuk disembelih dan dimasak oleh kerabat dan tetangga secara bergotong royong. Orang yang bertugas memasak gulai kambing ini semuanya adalah laki-laki. Sedangkan yang bertugas menanak nasi adalah kaum perempuan.

Penyelenggaraan semua kegiatan tersebut bagi mereka bukan sebagai bentuk pesta atau hura-hura pada saat suasana duka atau kematian seperti yang disebutkan oleh orang-orang yang berpaham Muhammadiyah. Bagi mereka makanan tersebut ditujukan untuk sanak saudara yang datang dari kampung atau tempat yang cukup jauh, sekaligus merupakan sedekah. Karena semua ini bersifat sedekah dan amalnya diniatkan untuk si mayat, maka tidak boleh bersifat kikir dalam bersedekah. Dalam pelaksanaan sholat lima waktu dan sholat tarawih di bulan Romadhan, mereka melakukannya dengan 23 raka'at (20 raka'at tarawih dan 3 raka'at witir). Sebaliknya dalam pandangan golongan Muhammadiyah semua kegiatan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga perbuatan tersebut bersifat mengada-ada dan tergolong bid'ah yang harus diberantas.

Pola adaptasi yang terjadi pada masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang berkaitan dengan sendi-sendi peribadatan seperti itu adalah terbentuknya sebuah percampuran dalam tata cara peribadatan yang berbentuk akulturasi. Mereka masih tetap melaksanakan takziah selama tiga malam berturut-turut untuk kirim do'a kepada arwah (mendoa), namun tidak dengan tahlil, dan tanpa hidangan makan-minum ataupun menyembelih kambing. Mereka juga tidak membacakan talqin saat menguburkan jenazah. Percampuran semacam ini juga terjadi dalam pelaksanaan Shalat lima waktu dan sholat tarawih. Mereka dapat bermakmum kepada imam yang berpaham Muhammadiyah tanpa diiringi sikap pertentangan. Dengan penerimaan semacam itu mereka menjadi

terbiasa melakukan sholat Shubuh tanpa membaca doa Qunut. Mereka tidak melakukan wind dengan bacaan zikir (ratib) yang dilanjutkan dengan berdoa bersama setiap selesai sholat wajib. Selain itu mereka pun lazim melaksanakan sholat tarawih dengan sebelas roka'at. Proses akulturasi semacam ini juga terungkap dalam hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

Di sini umumnya Muhammadiyah, tidak ada masalah dengan ibadah, Tuhan, Nabi, Malaikat, Kitabnya sama, masjidnya sama, kiblatnya sama, berpahala juga berkat. Biar saja semuanya baik. Orang Islam itu harus bisa jadi imam juga pandai jadi makmum yang percaya dengan imanya.

Tinggal dan menetap di Pasar Gadang, yakni memperbaiki kehidupan.

4. Perkawinan Campuran (amalgamasi)

Adanya kegiatan perdagangan yang cukup ramai di Pasar Gadang tidak hanya membuka peluang terjadinya pertemuan antar berbagai kelompok etnik yang menetap di Pasar Gadang. Lebih dari itu juga memungkinkan terjadinya proses perkawinan campuran antar kelompok etnik yang berbeda itu. Dalam kaitan penelitian ini, perkawinan campuran yang dimaksudkan adalah perkawinan antar suami yang berasal dari kelompok etnik Mandailing dengan istri dari kelompok etnik Minangkabau maupun sebaliknya. Amalgamasi tidak berupa perjanjian atau kesepakatan lainnya yang mempertukarkan penduduk, lebih tepatnya bukan pertukaran pria dengan wanita atau wanita dengan pria dari masing-masing

kelompok etnik yang untuk selanjutnya disatukan dalam ikatan perkawinan.

Amalgamasi yang terjadi di Pasar Gadang dapat muncul sebagai akibat sekaligus sebab atas kondisi dan perilaku adaptif dalam strategi atau pola adaptasi lainnya. Amalgamasi yang terjadi sebagai akibat dari strategi pola adaptasi lainnya itu karena amalgamasi merupakan kelanjutan atas keberhasilan mereka beradaptasi melalui pola menjadi anggota masyarakat bahasa Minangkabau, solidaritas muslim, dan pencarian atau pemerolehan peran fungsional. Sedangkan amalgamasi yang terjadi sebagai penyebab bagi strategi dan pola adaptasi lainnya adalah dengan menjadikan amalgamasi sebagai sarana Pencarian atau pemerolehan peran fungsional, atau agar dapat masuk ke dalam sistem sosial budaya kelompok etnik Minangkabau. Hal ini sebagaimana terungkap dari pernyataan informan yang anaknya menikah dengan wanita Minangkabau sebagai berikut:

Anak saya ada kawin dengan orang sini, biarlah mono tahu dia jadi alim seperti istrinya. Anaknya baik, Keluarganya juga kelihatannya orang baik-baik dan banyak yang menjadi.

Salah seorang informan yang melakukan amalgamasi, dan kebetulan adalah salah seorang keturunan orang Mandailing yang berpengaruh di Pasar Gadang saat itu, mengisahkan pengalamannya sebagai berikut:

Dulunya orang tua saya melarang juga, dia kurang suka dengan orang Padang, takut banyak dirongrong, menanggung keponakannya sekolah dan macam-macam inginnnya orang tua kan

waktu itu saya siap (sudah) kerja. Kebetulan keluarganya banyak yang jadi pegawai di Jakarta Orang itu (keluarga istri) banyak membantu juga sampai dua bulan mau menikah saya siap kerja di Pemda. Kalau istri sudah lebih dulu setahun.

Sebagaimana dalam teori struktural fungsional, fenomena-fenomena seperti itu berfungsi sebagai alat dalam proses adaptasi. Proses amalgamasi di Pasar Gadang oleh masyarakat kelompok etnik Mandailing dalam hal ini merupakan proses transformasi aktif mereka dalam menggunakan segi-segi situasi yang ada di lingkungannya untuk dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, Sejalan dengan itu perkawinan campuran menjadi dibenarkan oleh masyarakat kelompok etnik Mandailing dengan asumsi bahwa melalui perkawinan itu akan terbuka peluang bagi keluarga masing-masing pihak untuk saling membantu dalam pemerolehan kesempatan berperan dalam tatanan sistem sosial budaya masyarakat kelompok etnik Minangkabau yang dominan. Peran tersebut dapat berupa pekerjaan, menjadi pegawai negeri, membuka atau memperbesar usaha perdagangan, dan sebagainya.

Perkawinan campuran antara Laki-laki Mandailing dengan wanita Minangkabau, atau laki-laki Minangkabau dengan wanita Mandailing seperti ini setidaknya juga berpengaruh dalam penentuan pola menetap keluarga dan garis keturunan bagi anak-anak mereka. Kedua hal tersebut mengacu kepada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat dari kedua kelompok etnik tersebut. Masyarakat kelompok etnik Minangkabau yang menganut garis keturunan berdasarkan garis ibu (matrilineal) akan menjadikan seorang anak

yang lahir mengikuti suku (klan) dari pihak ibu. Jadi berkembangnya suatu klan atau keluarga dan dipertahankannya garis keturunan dengan melalui anak-anak wanita yang lahir. Kemudian dalam perkawinan adatnya, pengantin laki-laki akan tinggal di rumah pengantin wanita bersama mertuanya (istri membawa suami). Hal ini berbeda dengan kelaziman yang berlaku pada masyarakat kelompok etnik Mandailing yang menganut garis keturunan berdasarkan ayah (patrilinial). Dalam kekerabatan yang patrilinealis ini akan menjadikan seorang anak yang lahir mengikuti suku (klan) dari pihak ayah, dan berkembang atau dipertahankannya suatu klan atau keluarga dan garis keturunan dengan melalui anak laki-laki yang lahir. Selanjutnya dalam sistem perkawinan adat Mandailing ini, pengantin wanita akan tinggal di rumah pengantin laki-laki bersama mertuanya (suami membawa istri).

Implikasi dari perkawinan campuran antara kedua etnik yang secara mendasar berbeda dalam sistem kekerabatannya seperti itu adalah bahwa:

- a. Perkawinan campuran yang suaminya berasal dari etnik Mandailing dan istri dari etnik Minangkabau akan memiliki dua garis keturunan sekaligus, yakni dari pihak ayah dan pihak ibunya. Dengan demikian suami atau istri sama-sama akan diterima untuk masuk atau tinggal dan menetap pada Keluarga kedua belah pihak.
- b. Perkawinan campuran yang suaminya berasal dari etnik Minangkabau dengan istri dari etnik Mandailing, baik suami maupun istri akan kehilangan atau terputus garis keturunannya

dari keluarga kedua belah pihak sekaligus beserta haknya (pewatlsan). Dalam hal ini biasanya pihak keluarga orang tua mereka mengemballkan kepada hukum Islam sebagai landasan-nya, sehingga anak tetap memperoleh hak-haknya. Namun demikian keturunan mereka tetap tidak berhak memakai marga keluarga ibunya. Adapun pola menetap keluarga campuran seperti ini lazimnya akan tinggal bersama keluarga pihak orang tua istri sebagaimana lazimnya dalam adat Minangkabau. Sikap menerima adat kebiasaan Minangkabau ini merupakan sikap yang mencerminkan bahwa mereka telah berlaku "ber-Sidapot Solup" atau dalam pepatah Minangkabau dikenal dengan "Dimana bumi dlpajak, di situ langit dijunjung".

Berkaitan dengan pola menetap keluarga baru tersebut, pada perkawinan campuran di Pasar Gadang, baik yang pengantin wanitanya berasal dari kelompok etnik Minangkabau dan pengantin pria dari etnik Mandailing ataupun sebaliknya, pada umumnya mereka tidak lagi mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam adatnya masing-masing. Keputusan mereka dalam memilih tempat tinggal mengacu kepada kesepakatan mereka. Lazimnya sebelum menikah mereka telah memiliki rencana dan bersepakat dalam memilih tempat tinggal dan menetap sementara dengan orang tua mereka. Keputusan seperti itu lebih rasional dan realistis untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing-masing pihak. Situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi mereka dalam memilih apakah akan tinggal dan

menetap pada keluarga atau orang tua pengantin laki-laki ataukah pada keluarga. atau orang tua pengantin wanita itu berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Faktor kesiapan pasangan suami istri

Hal ini berkaitan dengan kesiapan mental suami atau Istri dalam bergaul dan hidup bersama dengan keluarga orang tua suami atau istri mereka yang berbeda etnik dan sistem sosial budayanya.

b. Kemampuan orang tua dan suami istri

Kendati masalah kekayaan material dan finansial bersifat relatif, hal ini menjadi pertimbangan bagi mereka. Dalam pemikiran mereka, orang tua yang mampu (kaya) pasti akan mampu pula dalam membantu rumah tangga yang baru mereka bina. Selain itu hal ini pun menyangkut dengan pekerjaan dan penghasilan yang didapatkan suami. Suami yang belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap merasa mace untuk tinggal dengan mertuanya. Ia merasa lebih baik tinggal bersama orang tuanya sendiri daripada dengan orang tua Istrinya (mertua). namun demikian jika sang suami tersebut kebetulan adalah orang Mandailing dan merupakan perantau tunggal (tidak bersama orang tuanya atau tidak memiliki keluarga dekat) di Pasar Gadang, ia akan memilih tinggal bersama orang tua istrinya.

c. Kondisi rumah orang tua

Hal ini berkaitan dengan besar-kecil daya tampung rumah orang tua mereka. Jika rumah orang tua suami lebih besar dan memiliki kamar yang dapat mereka tempati, sementara rumah orang tua istri tidak seperti itu, maka mereka akan memilih tinggal dan

menetap bersama orang tua dan keluarga pihak suami. Hal ini juga berkaitan dengan banyak dan tidaknya jumlah saudara atau keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Beberapa informan dalam penelitian ini tinggal di dalam satu rumah bersama dalam dua hingga tiga kepala keluarga.

d. Faktor kedudukan anak atau kepercayaan orang tua

Kedudukan suami atau istri dalam keluarga yang menempatkan mereka sebagai anak kesayangan atau kepercayaan orang tua dan menantu kesayangan atau menantu kepercayaan mertua turut menentukan dalam pemilihan tempat tinggal mereka setelah menikah. Selain itu kedudukan suami atau Istri yang merupakan anak tunggal, anak bungsu, atau bukan anak tunggal dan bukan anak bungsu tetapi hanya dia yang masih tinggal bersama orang tuanya pun turut mempengaruhi.

Dalam perkembangan lebih lanjut, umumnya para keluarga di Pasar Gadang yang melakukan perkawinan campuran ini pada awalnya saja mengikuti kebiasaan yang berlaku di dalam adatnya. Setelah satu sampai tiga bulan tinggal bersama mertuanya atau setelah memiliki satu hingga dua orang anak, mereka memisahkan diri dengan orang tuanya untuk hidup mandiri di rumah yang baru, baik rumah pribadi maupun rumah kontrakan, untuk membentuk keluarga kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Pemilihan tempat tinggal seperti itu menunjukkan bahwa pola menetap keluarga dalam perkawinan campuran ini telah menggeser pola menetap yang mengacu pada adat dengan sistem kekerabatannya dan menggantinya dengan pola menetap yang lebih rasional dan realistis

berdasarkan kondisi yang tengah mereka hadapi. Fenomena sosial budaya yang dilematis namun harus diterima kenyataannya oleh semua pihak. Berdasarkan uraian temuan dan pembahasan tersebut, pola adaptasi yang ditempuh oleh masyarakat kelompok etnik Mandailing terhadap masyarakat kelompok etnik Minangkabau di kelurahan Pasar Gadang Kecamatan Padang Selatan, secara berurutan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi anggota masyarakat bahasa Minangkabau.

Hal ini sebagai konsekuensi logis bahwa mereka adalah masyarakat minoritas yang harus menyesuaikan dengan masyarakat yang memiliki budaya dominan. Selain itu sebagai sarana yang memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat.

2. Melalui solidaritas muslim (agama)

Proses ini juga merupakan konsekuensi yang harus dihadapi atas dominasi masyarakat setempat dalam bidang keagamaan yang paham Muhammadiyahnya lebih dominan dari pada paham Ahlussunnah. Selain itu juga berfungsi sebagai landasan yang merekatkan hubungan antar kedua kelompok etnik tersebut.

3. Mencari peran (fungsional)

Keterlibatan peran secara fungsional ini merupakan upaya aktif untuk mewujudkan tujuan hidupnya (*Coat Attainment*) dalam merantau serta wujud kepedulian mereka terhadap daerah barunya dan sistem sosial budaya masyarakat setempat.

4. Melakukan perkawinan campuran (amalgamasi)

Perkawinan campuran ini dapat muncul selain sebagai Implikasi dari upaya atau perilaku dalam pola adaptasi yang telah dilalui tersebut, juga sebaliknya dapat sebagai pola adaptasi tersendiri yang dilakukan untuk memperdeh peran fungsional (pola ketiga).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keberadaan kelompok etnik Mandailing dan kelompok etnik Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang memiliki posisi yang sama, yakni sama-sama sebagai pendatang. Masyarakat kelompok etnik Mandailing di Pasar Gadang pada umumnya berasal dari daerah Penjabung dan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Propinsi Sumatera Utara. Adapun masyarakat kelompok etnik Minangkabau adalah penduduk laras Bodi Chaniago dan Koto Piliang yang berasal dari Selayo-Solok, dan Luhak Agam. Keberadaan kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan kelompok etnik Mandailing.

Dengan didukung oleh kuantitas yang besar (mayoritas) dan kedudukannya sebagai masyarakat atau penduduk pribumi tuan rumah (*host populations*), kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang menjadi lebih dominan atas kelompok etnik Mandailing. Dominasi ini selain berlaku dalam pemakaian bahasa Minangkabau yang "harus dikuasai" atau "harus dimahiri" oleh pendatang Mandailing di Pasar Gadang, juga dalam kehidupan beragama yang menempatkan pendatang Mandailing untuk "tunduk" dan mengikuti

tata cara peribadatan paham Muhammadiyah yang lazim dianut oleh masyarakat Minangkabau di Pasar Gadang.

Menyadari dominasi tersebut serta posisinya sebagai pendatang yang berasal dari luar wilayah sosial budaya Minangkabau, masyarakat

kelompok etnik Mandailing berusaha untuk bersikap adaptif terhadap masyarakat kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang melalui cara atau pola-pola adaptasi tertentu. Pola adaptasi yang diterapkan itu adalah melalui cara-cara yang secara berurutan sebagai berikut:

1. Menjadi anggota masyarakat bahasa Minangkabau,
2. Melalui solidaritas muslim (agama)
3. Mencari peran (fungsional), dan
4. Melakukan perkawinan campuran (amalgamasi).

Memperhatikan bentuk strategi dan pola adaptasi tersebut, jalinan interaksi yang cukup baik antar kelompok etnik Mandailing dan Minangkabau di Pasar Gadang dapat disebabkan oleh beberapa hal yang sangat berkaitan dengan konsep teori Budaya Dominan, yakni: 1) Adanya situasi dan posisi dominan pada masyarakat kelompok etnik Minangkabau di Pasar Gadang, yang suka ataupun tidak suka akan memunculkan kondisi alamiah yang mendominasi dan mengendalikan kelompok pendatang Mandailing yang minoritas untuk "tunduk" pada tatanan sistem sosial budaya dominan setempat, 2) Adanya upaya aktif dari kelompok minoritas (Mandailing) untuk bersikap adaptif terhadap kelompok mayoritas yang lebih dominan (Minangkabau).

Berdasarkan temuan penelitian ini, mengimplikasikan bahwa untuk memposisikan diri serta menentukan strategi dan pola adaptasi yang dapat diterima oleh masyarakat setempat yang memiliki budaya dominan, masyarakat kelompok etnik pendatang harus dapat memiliki pemahaman dan pengertian terhadap tatanan sistem sosial budaya masyarakat setempat- Selain itu sebagaimana teori Budaya Dominan

yang dikembangkan Bruner (1974), masyarakat kelompok etnik pendatang tersebut harus siap dengan situasi dan kondisi yang menempatkan mereka sebagai masyarakat yang harus "tunduk", menerima dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam tatanan sistem sosial budaya masyarakat budaya dominan itu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Budaya Dominan sangat berperan dalam penentuan perilaku adaptif kelompok etnik pendatang terhadap masyarakat kelompok etnik pribumi (*host populations*) yang memiliki budaya dominan.

B. Saran-Saran

Memperhatikan bentuk strategi dan pola adaptasi yang diterapkan oleh kelompok etnik Mandailing terhadap kelompok etnik Minangkabau di Kelurahan Pasar Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang sebagaimana terungkap dalam penelitian Ini, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat tatanan sosial budaya masyarakat Minangkabau bersifat dominan atas kelompok etnik Mandailing, dan cukup menentukan perilaku strategi dan pola adaptasinya, maka sangat dimungkinkan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya pada masyarakat kelompok etnik pendatang tersebut. Untuk itu di samping terus menjalankan perilaku strategi dan pola adaptasi yang telah ada, masyarakat kelompok etnik tersebut juga harus mengupayakan pelestarian nilai-nilai budaya leluhurnya dengan tetap menjaga tumbuhnya sifat etnosentris yang berlebihan.

2. Pentingnya bagi kelompok etnik pendatang yang minoritas lainnya di Indonesia agar dalam berperilaku adaptif terhadap kelompok etnik pribumi (*host populations*) yang mayoritas dan memiliki budaya dominan, untuk bersikap arif dalam memahami tatanan sistem sosial budaya masyarakat setempat, sehingga dapat menempatkan posisi dan menentukan strategi dan pola adaptasi yang sesuai, yang tidak memicu timbulnya konflik dengan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (1996). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abizar dkk. (1999). *Baku Panduan Penulisan Tesis*. Padang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
- Adimiharja, Kusnaka. (1993). *Kebudayaan dan lingkungan*. Bandung: Ilham Jaya.
- Ahmad, Rofiq (Ed.). (1997). *Budaya Kepeloporan dalam Mobilitas Penduduk*. Jakarta: Puspaswara.
- Amran, Rush. (1986). *Padang Riwayatmu Dulu*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Ball, Van J. (1988). *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya Hingsa Dekade 1970* (terjemahan). Jakarta: PT. Gramedia.
- Barth, Fredrik. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI Press.
- Bruner, E. M. (1974). *The Expression of Ethnicity in Indonesia - dalam Abner Cohen (peny.) Urban Ethnicity*. London: Tavistock.

Depdikbud. (1983/1984). *Majalah Analisis Kebudayaan*. Th.IV. No.2.
Jakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI.

Eriyenti, Fitri. (1989). *Suatu Tinjauan Tentang Pembauran Masyarakat Nias dengan Masyarakat Minangkabau di Desa Pasar Usang*. (skripsi). Padang: IKIP Padang.

Esten, Mursal. (1993). *Minangkabau: Tradisi dan Perubahan*. Padang: Angkasa Raya.

Faisa, Sanapiah. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh {YA3 Malang}.

Falah, W. Anwar. dkk. (2000). *Menyingkap Riwayat dan Pesona Kota Padang Lama yang Tersisa*. Padang: Museum Negeri Propinsi Sumatera Barat - Adhityawarman.

Hakimy Dt. Rajo Penghulu, H. Idrus. (1984). *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya.

Haviland, William A. (1985). *Antropologi Jilid 1*, New York: CHS College Publishing.

_____, (1993), *Antropologi Jilid 2*. New York: CHS College Publishing.

Norton, B. Paul, dan Chester L. Hunat. (1992). *Sosiologi*. Surabaya: Erlangga.

Johnson. Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid II.
Jakarta: PT. Gramedia.

Jurusan Antropologi FISIPOL UI. (1999). Jurna! Antropologi Indonesia,
Th.XXIII, No.58. Januari - April 1999. Jakarta: UI dan Yayasan
Obor Indonesia.

Koentjaraningrat. (1980). Pengantar Ilmu Antropologi- Jakarta: Aksara
Baru.

Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
(1995). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta:
Djambatan.

_____ (Ed.). (1977). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.
Gramedia.

_____ . (1996). *Pengantar ilmu Antropologi I* Jakarta: Rineka Cipta.

Lauer, Robert H. (1993). *Perspektif Tentang perubahan Sosial*.
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Manan, Irnan. (1989). *Dasar-dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Jakarta:
Proyek Pengembangan LPTK.

- Marpaung, Phillipus Jarongki dan Bien Pasaribu. (2000). *Ruma Gorga, Sosok Pribadi Orang Batak*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Miles, B N. dan A. Michael Huberman.(terjemahan Tjejep Rohendi Rohid!) (1992). *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moteong, Lexy J. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Radesa Rasih.
- Muhadjir, Noeng. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nairn, Mochtar. (1984). *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Najib, Muhammad dkk. (Ed.). (1996). *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta: LKPSM.
- Mavis, A.A. (1984). *Atom Terkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Gratiti Pers.
- Petty, Usman. (1994). *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*- Jakarta: Pustaka LP3ES
- Poloma M, Margaret. (2000). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.

- Ritzer, George, (terjemahan: Alimandan). (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Sos/ologi teutons Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, (1987). *Sosiologi suatu Pen^antar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemardjan. Seio dan Soelaiman Soemardi. (1964). *Setangkai Bunga Rampai Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Sofwan, Mardanas. dkk. (1987). *Sejarah Kota Padang*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Oepdikbud.
- Spradley, James P. (1997). *Metode Etnoyrafi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Suparlan, Parsudi, (1972). *The Javanese in Bandung: Ethnicity in e Medium Sized Indonesian City*. M.A, thesis. USA: University of IElionis.
- Suparlan, Parsudi (Ed.). (1993). *Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syamsir. (2000). *Hubungan Sosmi Oran\$ Minang dan orang Nias di Kodya Padang*(Tesis). Bandung: PPSUNPAD.

- Sya'roni. (2000). (Tesis). *Interaksi Sosial Antar Kelompok Etnik : Kasus Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan*. Padang; PPS UNP.
- Tarigan, Nismawati. (1995). *Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga Daerah Sumatera Utara*. Medan: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Depdikbud Sumatera Utara.
- Veeger, Jam[^] T. (1990), *Realitas Sosial* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zed, Mestika. dkk. (Ed.). (1992). *Perubahan Sosiai di Minangkabau*. Padarig: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas.